



# **PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**( BAPPEDA ) KOTA PONTIANAK**

**Jalan Zainuddin No.5 Tlp.(0561) 734294 – 733045 Fax.(0561) 733045 Kode Post 78111**



## **LAPORAN AKHIR**



**REVIEW KAWASAN SENTRA AGRIBISNIS  
KOTA PONTIANAK**



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

## Kata Pengantar

---

Laporan Akhir ini disampaikan sebagai salah satu laporan dari rangkaian pelaporan atas pekerjaan penyusunan “**Review Kawasan Sentra Agribisnis**” Dimana materi dalam laporan ini lebih ditekankan pada metodologi dan rencana pelaksanaan pekerjaan. Penulisan laporan ini disusun secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai rencana kerja yang akan dilakukan.

Dalam pelaksanaan pekerjaan ini diselenggarakan atas kerjasama antar **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pontianak** dengan sebagai pihak konsultan.

Laporan Akhir ini merupakan dasar atau acuan dalam pelaksanaan pekerjaan maupun penyusunan laporan berikutnya.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung tersusunya dokumen ini.

Pontianak , Agustus 2018

BAPPEDA KOTA PONTIANAK



## LAPORAN AKHIR

---

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan harus disertai dengan pembangunan yang merata dalam segala bidang serta menyeluruh kepada semua golongan masyarakat. Konsep pembangunan yang diterapkan mulai tahun 1970-an adalah pembangunan yang bersifat *growth pole*. Menurut Rustiadi dan Hadi (2006), konsep pertumbuhan *growth pole* yang diperkirakan akan terjadi penetasan (*trickle down effect*) dari kutub pusat pertumbuhan ke wilayah *hinterland*-nya, ternyata *neteffect*-nya menimbulkan pengurasan besar (*masive backwash effect*) atau telah terjadi transfer neto sumberdaya dari wilayah perdesaan ke kawasan perkotaan secara besar besaran. Friedman dan Douglass (1975) menyarankan suatu bentuk pendekatan agropolitan sebagai aktivitas pembangunan yang terkonsentrasi di wilayah perdesaan dengan jumlah penduduk antara 50 ribu sampai 150 ribu jiwa. Salah satu ide pendekatan pengembangan perdesaan yang dikemukakan adalah mewujudkan kemandirian pembangunan perdesaan yang didasarkan pada potensi wilayah desa tersebut. Keterkaitan dengan perekonomian kota harus bisa diminimalkan, sehingga terbentuk kemandirian desa dalam pertumbuhan ekonominya.

Pada dasarnya setiap bagian wilayah Indonesia memiliki keunggulan komparatif berkenaan dengan produk-produk pertanian. Hal ini dimungkinkan karena kekuatan ekonomi bertumpu pada sektor pertanian sebagai *recource base*. Keragaman potensi alam di Indonesia jika di perhatikan lebih jauh, akan sampai kepada suatu titik dimana suatu komoditas tertentu dapat dijadikan unggulan. Produk pertanian unggulan dapat dijadikan sebagai penggerak perekonomian masyarakat pedesaan. Berbagai kalangan mulai dari dunia usaha swasta, petani, pedagang dapat



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

melibatkan diri dan merasa berkepentingan dalam sistem agribisnis, sehingga akan tercipta suatu rangkaian usaha yang melibatkan sisi on farm dan of farm.

Kultur masyarakat yang agraris merupakan bagian dari potensi usaha agribisnis yang masih memerlukan pengembangan lebih lanjut terutama dari sisi pengembangan sumber daya manusia, hal ini disebabkan karena pembangunan pertanian pada dasarnya berorientasi pada manusia, dimana pembangunan pertanian meletakkan atau memposisikan petani dan nelayan sebagai subjek. Pengembangan kapasitas masyarakat dimaksudkan untuk lebih mempercepat upaya memberdayakan ekonomi petani – nelayan. Pengembangan ini dilakukan untuk mempersiapkan masyarakat pertanian menjadi mandiri dan mampu menentukan nasibnya sendiri. Dalam sistem agribisnis, makna globalisasi dapat mencakup globalisasi produksi maupun globalisasi pasar. Dalam globalisasi produksi : setiap negara atau perusahaan dapat melakukan kegiatan produksi dimana saja yang paling menguntungkan baginya, baik untuk komponen maupun sebagian komponennya atau menurut bentuk produknya seperti primer, setengah jadi maupun produk jadi.

Dalam globalisasi pasar, maka senantiasa yang harus dicermati adalah proses terintegrasinya pasar domestik sebagai pasar regional, ini memberi arti bahwa pasar domestik dengan pasar regional adalah bagian dari pasar dunia. Untuk dapat menembus pasar dunia regional / antar negara yang semakin terbuka dalam era perdagangan bebas, maka menjadi penting bagi masyarakat pelaku agribisnis untuk mengembangkan paradigma competitiveness dan efisiensi sebagai landasan di dalam meningkatkan peran kegiatan pertanian dalam perekonomian, bersamaan dengan mengembangkan bangunan institusional (*institutional building*). Berkenaan pula dengan era globalisasi yang harus dicermati adalah hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan internasional maupun komitmen regional (WTO, APEC dan AFTA). Iklim kebijaksanaan penanaman modal dan pemahaman terhadap sumber daya.



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Sistem agribisnis dikembangkan dalam cakupan makro, dalam hal ini menyangkut suatu kawasan yang terintegrasi, terpadu dengan berbagai stake holder yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Kawasan pedesaan pada umumnya adalah daerah pemasok hasil produksi pertanian yang memiliki fungsi penting, terutama dalam hal penyedia bahan baku untuk industri dan penghasil komoditi untuk diekspor keluar negeri. Oleh karena itu basis pembangunan adalah pembangunan pedesaan. Salah satu program keterpaduan tersebut adalah pengembangan kawasan agropolitan yang dilakukan pada daerah pemasok hasil produksi pertanian melalui pengembangan Daerah Pusat Pertumbuhan (DPP) yang diharapkan dapat mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan agribisnis di desa – desa hinterland dan desa–desa sekitarnya.

Agropolitan menjadi relevan diterapkan di Indonesia karena potensi wilayah Indonesia yang dominan pada sektor pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam merupakan mata pencaharian utama sebagian besar masyarakat perdesaan. Perencanaan dan pengambilan keputusan bersifat desentralisasi sehingga masyarakat perdesaan mempunyai tanggung jawab penuh terhadap perkembangan dan pembangunan daerahnya sendiri. Kabupaten Sambas merupakan salah satu wilayah yang mengembangkan pembangunannya ke arah Agropolitan. Ini ditunjukkan dengan potensi alamnya di bidang pertanian yang sangat besar. Komoditi unggulan yang ada di Kabupaten Sambas yaitu pertanian padi dan jeruk. Selain itu juga dilihat dari kondisi alamnya juga wilayah ini memang cocok dikembangkan pembangunan berbasis pertanian karena tanahnya yang subur juga lahan-lahan yang tersedia untuk pertanian relatif cukup luas. Hal ini menandakan bahwa Kabupaten Sambas meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayahnya dipengaruhi oleh sektor pertanian.



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Agripolitan (kota pertanian) adalah kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya, Kota pertanian atau agripolitan berada dalam kawasan pemasok hasil pertanian (sentra produksi pertanian) yang mana kawasan tersebut memberikan kontribusi yang besar terhadap mata pencarian dan kesejahteraan masyarakatnya, berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang mendorong pertumbuhan pembangunan pedesaan dan desa–desa hinterland atau wilayah sekitarnya melalui pengembangan ekonomi, yang tidak terbatas sebagai pusat pelayanan sektor pertanian, tetapi juga pembangunan sektor secara luas seperti usaha pertanian (on farm dan of farm) industri kecil, parawisata, jasa pelayanan.

Kota Pontianak merupakan ibu kota dari Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan daerah kawasan strategis nasional, berdasarkan data dari Bappenas untuk daerah yang di Kalimantan Barat mempunyai 13 kawasan agripolitan yang tersebar di daerah. Pengembangan dilaksanakan melalui penyediaan infrastruktur yang memadai dan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah. Pengadaan infrastruktur juga ditujukan bagi peningkatan produktivitas, pengolahan, serta pemasaran hasil pertanian. Pengembangan kawasan Agripolitan dirasakan begitu penting, mengingat pengembangannya yang memanfaatkan dan mengusung konsep sesuai dengan keunikan, keunggulan, dan keandalan lokal. Dengan demikian, pemerataan pembangunan dapat ditingkatkan serta menjamin kelangsungan perkembangan kawasan sehingga memiliki keunggulan yang berdaya saing.

Berdasarkan kondisi eksisting lokasi wilayah kegiatan berada di Kecamatan Pontianak Utara yang mayoritas masyarakatnya mengandalkan hidup melalui bercocok tanam, maka dengan adanya kajian kawasan agripolitan ini merupakan membantu dalam mensinergikan pemerintah dan masyarakat. Untuk mengetahui langkah-langkah apa yang harus di rencanakan pemerintah harus mengidentifikasi



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

lokasi-lokasi untuk tata guna lahan sekarang berdasarkan referensi kegiatan ini pernah di kaji sebelumnya pada tahun 2008 -2012 pastinya ada perubahan selama di tahun 2018 sekarang ini. Dengan sinergi harmonis antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait, diharapkan mampu mendukung pengembangan Kawasan Agropolitan yang utuh dan terintegrasi. Dengan demikian, hasil pembangunan dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat dan membawa masyarakat kepada kesejahteraan serta kehidupan yang lebih baik.

Kawasan Agropolitan yang dikembangkan merupakan bagian dari potensi wilayah kabupaten/kota. Pengembangan kawasan melalui penguatan sentra-sentra produksi petani yang berbasis potensi lokal. Dengan demikian, Kawasan Agropolitan mampu memainkan peran sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi yang berdaya kompetensi interregional maupun intraregional. Selain itu, pengembangan juga berorientasi pada kekuatan pasar yang dilaksanakan melalui pemberdayaan usaha budidaya dan kegiatan

Alih-guna lahan hutan menjadi lahan pertanian disadari menimbulkan banyak masalah seperti penurunan kesuburan tanah, erosi, kepunahan flora dan fauna, banjir, kekeringan dan bahkan perubahan lingkungan global. Masalah ini bertambah berat dari waktu ke waktu sejalan dengan meningkatnya luas areal hutan yang dialih-gunakan menjadi lahan usaha lain. Agriforestri adalah salah satu sistem pengelolaan lahan yang mungkin dapat ditawarkan untuk mengatasi masalah yang timbul akibat adanya alih-guna lahan tersebut di atas dan sekaligus juga untuk mengatasi masalah pangan. Agriforestri, sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan baru di bidang pertanian dan kehutanan, berupaya mengenali dan mengembangkan keberadaan sistem agriforestri yang telah dipraktikkan petani sejak dulu kala. Secara sederhana, agriforestri berarti menanam pepohonan di lahan pertanian, dan harus diingat bahwa petani atau masyarakat adalah elemen pokoknya (subyek). Dengan demikian kajian agriforestri tidak hanya terfokus pada masalah teknik dan biofisik saja tetapi juga



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

masalah sosial, ekonomi dan budaya yang selalu berubah dari waktu ke waktu, sehingga agriforestri merupakan cabang ilmu yang dinamis.

Selama kurun waktu 2002-2003 realisasi pendapatan regional perkapita yang tercermin dalam PDRB per kapita atas dasar harga yang berlaku mengalami peningkatan dari 4.921.364,18 rupiah menjadi 5.369.621,84 rupiah atau naik sebesar 9,04 persen. Kondisi struktur perekonomian daerah menunjukkan bahwa sektor pertanian masih tetap mendominasi dalam pembentukan PDRB Kota Pontianak dengan kontribusi 43,79% pada selanjutnya secara berurutan ditempati oleh perdagangan 27,83%, industri 10,82%.

### **1.2 Tujuan**

Tujuan dari kegiatan ini adalah :

1. Menyusun Masterplan pengembangan kawasan bisnis Agriforestri-Pariwisata di Kecamatan Pontianak Utara yang sesuai dengan RTRW, RDTR dan peraturan zonasi.
2. Menyusun masterplan pengembangan kawasan bisnis Agriforestri-Pariwisata di Kecamatan Pontianak Utara yang sesuai visi misi rencana pembangunan jangka panjang Kota Pontianak dan rencana pembangunan jangka Kota Pontianak 2015-2019.

### **1.3 Sasaran**

Sasaran yang ingin dicapai didalam pekerjaan ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religious, cerdas sehat,berbudaya dan hurmonis.
2. Menerapkan prinsip-prinsip *good government* dalam penyelenggaran pemerintahan dan implementasi zona integritas melalui penetapan wilayah bebas korupsi di sector pelayanan publik.





**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

3. Meningkatkan sarana dan prasarana dasar perkotaan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan kota dan wilayah.
4. Mewujudkan tata ruang kota berwawasan lingkungan yang nyaman, aman dan layak huni.
5. Menciptakan iklim usaha yang kondusif guna memacu pertumbuhan ekonomi kota yang berdaya saing.

#### **1.4 Referensi Hukum**

1. Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033.
2. Rencana Detail Tata Ruang Kota Pontianak
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang/Menengah Daerah 2015-2019.
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Sistem Budidaya Tanaman.
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian.
8. Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Kriteria Pedoman Teknis Kawasan Budidaya
9. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak

#### **1.5 Keluaran Hasil Pekerjaan**

Hasil yang diharapkan dari Masterplan pengembangan kawasan bisnis pertanian dengan konsep *agriforestry* pariwisata adalah tersusunnya Program Perencanaan dan



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Pengembangan kawasan bisnis pertanian dengan konsep agriforestry pariwisata yang di dalamnya berisikan tentang :

- Mengkaji kondisi eksisting sistem agri bisnis yang telah ada di Kelurahan Siantan Hilir
- Kondisi sosial dan Ekonomi yang mencakupi :
  - Kependudukan, Pendidikan, Kesehatan, Pengangguran, mata pencaharian, pendapatan, kemiskinan, indeks pendapatan masyarakat.
  - Kelembagaan masyarakat dan pemerintah yang terkait dengan pengembangan sistem
- Produk kebijakan pemerintah Kota Pontianak dan pemerintah pusat yang terkait dengan pengembangan sistem : Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, peraturan Menteri Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Perda, Peraturan Walikota/keputusan Walikota.
- Kondisi Infrastruktur di lokasi studi mencakupi : jalan, jembatan, drainase, energi, komunikasi, transportasi/perhubungan.
- Iklim : curah hujan, suhu kelembababan, kecepatan angin.
- Kondisi pemanfaatan lahan : kepemilikan lahan, status kepemilikan lahan, luas kepemilikan dan produktivitas lahan.
- Potensi pengembangan usaha pertanian : jenis tanah, kesuburan tanah, spesies tanaman pertanian yang cocok (eksisting/introdusir), pola pertanian yang biasa dilakukan, teknologi yang dipakai (pembukaan lahan, penanaman, pemeliharaan panen/produksi, penyimpanan, pengolahan) pemasaran (setempat, regional, nasional dan internasional).



## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **Bab I Pendahuluan:**

Berisi latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, referensi hukum, ruang lingkup, keluaran dan sistematika laporan.

### **Bab II Kebijakan Terkait Perencanaan**

Berisi tentang peraturan yang terkait dalam merencanakan Rivew kawasan Sentra Agribisnis Kota Pontianak.

### **Bab III Kondisi Umum Wilayah:**

Berisi gambaran kondisi secara lengkap tentang kedudukan Kota Pontianak., dan penjelasan tentang kependudukan, perekonomian, kondisi tata guna lahan, kebutuhan air, kondisi irigasi dan tutupan lahan.

### **Bab IV Hasil Perencanaan**

Berisi tentang rencana kerja yang akan dilakukan konsultan terkait dengan pelaksanaan kegiatan.

### **Bab V Kesimpulan Dan Rekomendasi**

Berisi hasil keputusan yang dirangkum menjadi singkat dan menjelaskan arahan kebijakan untuk kedepannya dalam perencanaan.



## **Kebijakan Terkait Perencanaan**

---

### **2.1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan**

Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

- Bagian Kedua, Asas, Tujuan, dan Fungsi

#### Pasal 2

Perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan.

#### Pasal 3

Perkebunan diselenggarakan dengan tujuan :

- a. meningkatkan pendapatan masyarakat;
- b. meningkatkan penerimaan negara;
- c. meningkatkan penerimaan devisa negara;
- d. menyediakan lapangan kerja;
- e. meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing;
- f. memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri; dan
- g. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Pasal 4

Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. ekonomi, yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional;
- b. ekologi, yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung; dan
- c. sosial budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

➤ Jenis dan Perizinan Usaha Perkebunan

Pasal 15

- a. Usaha perkebunan terdiri atas usaha budi daya tanaman perkebunan dan/ atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
- b. Usaha budi daya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan serangkaian kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi.
- c. Usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kegiatan pengolahan yang bahan baku utamanya hasil perkebunan untuk memperoleh nilai tambah.
- d. Industri pengolahan hasil perkebunan merupakan pengolahan hasil perkebunan yang bahan bakunya karena menurut sifat dan karekteristiknya tidak dapat dipisahkan dengan usaha budi daya tanaman perkebunan terdiri dari gula pasir dari tebu, teh hitam dan teh hijau serta ekstraksi kelapa sawit.
- e. Penambahan atau pengurangan jenis usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.



- Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

Bagian Kesatu, Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan

Pasal 27

- a. Usaha industri pengolahan hasil perkebunan dilakukan untuk memperoleh nilai tambah melalui penerapan sistem dan usaha agribisnis perkebunan.
- b. Pemerintah, provinsi, kabupaten/kota melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan usaha industri pengolahan hasil perkebunan untuk memberikan nilai tambah yang maksimal.
- c. Usaha industri pengolahan hasil perkebunan dapat dilakukan di dalam atau di luar kawasan pengembangan perkebunan, dan dilakukan secara terpadu dengan usaha budi daya tanaman perkebunan.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan keterpaduan usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan usaha budi daya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

## **2.2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Sistem Budidaya Tanaman**

Sistem budidaya tanaman adalah sistem pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam nabati melalui upaya manusia yang dengan modal, teknologi, dan sumberdaya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik.



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

➤ Penyelenggaraan Budidaya Tanaman

Bagian Kesatu, Pembukaan dan Pengolahan Lahan, dan Penggunaan Media Tumbuh Tanaman

Pasal 7

- a. Setiap orang atau badan hukum yang membuka dan mengolah lahan dalam luasan tertentu untuk keperluan budidaya tanaman wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup.
- b. Setiap orang atau badan hukum yang menggunakan media tumbuh tanaman untuk keperluan budidaya tanaman wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan.
- c. Ketentuan mengenai tata cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Pemerintah. Bagian Kedua Perbenihan

Pasal 8

Perolehan benih bermutu untuk pengembangan budidaya tanaman dilakukan melalui kegiatan penemuan varietas unggul dan/atau introduksi dari luar negeri.

Pasal 9

- a. Penemuan varietas unggul dilakukan melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
- b. Pencarian dan pengumpulan plasma nutfah dalam rangka pemuliaan tanaman dilakukan oleh Pemerintah.
- c. Kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum berdasarkan izin.
- d. Pemerintah melakukan pelestarian plasma nutfah bersama masyarakat.



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

- e. Ketentuan mengenai tata cara pencarian, pengumpulan, dan pelestarian plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**2.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian**

Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

➤ Prinsip Dasar Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertanian

a. Kesesuaian lahan untuk pertanian

Kawasan peruntukan pertanian ditetapkan berdasarkan kesesuaian lahan dalam pengembangan komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Tipologi lahan kawasan pertanian berdasarkan kesesuaian lahan dan persyaratan agroklimat tersaji dalam tabel 2.1

**Tabel 2.1** Tipologi lahan kawasan berdasarkan kesesuaian lahan dan persyaratan agroklimat

No.	Kawasan	Kesesuaian Lahan	Persyaratan Agroklimat
01.	Tanaman Pangan	Dataran rendah dan dataran tinggi, dengan bentuk lahan datar sampai berombak (lereng <8%), kesesuaian lahan tergolong S1 S2 atau S3, memiliki dan atau tidak memiliki prasarana inigasi untuk pengembangan.	Disesuaikan dengan komoditas yang dikembangankan sesuai dengan agripedoklimat setempat
02.	Hortikultura	Dataran rendah dan dataran tinggi, dengan bentuk lahan datan sampai berbukit, kesesuaian lahan tergolong SI, S2 atau S3, dan	Disesuaikan dengan komoditas yang dikembangankan sesuai dengan agripedokllmat





**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

No.	Kawasan	Kesesuaian Lahan	Persyaratan Agriklimat
		tersedia sumber air yang cukup.	setempat
03.	Perkebunan	Dataran rendah dan dataran tinggi, dengan bentuk lahan datar sampai berbukit, kesesuaian lahan tergolong S1, S2 atau S3.	Disesuaikan dengan komoditas yang dikembangkan sesuai dengan agripedoklimat setempat
04.	Peternakan	Dataran rendah dan dataran tinggi sampai berbukit di luar pemukiman dengan sistem sanitasi yang cukup. Tidak beradadi permukiman dan memperhatikan aspek lingkungan.	Disesuaikan dengan komoditas yang dikembangkan sesuai dengan agripedoklimat setempat

Keterangan :

S1 = lahan sangat sesuai,  
S2 = lahan cukup sesuai.  
S3 = sesuai marjinal.

b. Lahan Pertanian Berkelanjutan

Kawasan peruntukan pertanian yang meliputi kawasan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan selanjutnya akan ditetapkan sebagai lahan pertanian berkelanjutan. Dengan demikian mekanisme perencanaan, pemanfaatan, pengembangan, pengendalian dan pembiayaan kawasan peruntukan pertanian mengikuti peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku.

c. Mendukung ketahanan pangan nasional

Kawasan peruntukan pertanian ditetapkan dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional. Hal ini sesuai dengan UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan khususnya dalam Pasal 45 ditegaskan bahwa pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Lebih lanjut dalam pasal 47 ditegaskan guna mewujudkan cadangan pangan nasional, pemerintah akan berupaya: a) mengembangkan, membina, dan atau membantu penyelenggaraan cadangan pangan masyarakat, b). mengembangkan, menunjang, dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi peran koperasi dan swasta dalam mewujudkan cadangan pangan setempat dan atau nasional. Dengan demikian melalui penetapan kawasan peruntukan pertanian maka pengembangan pembangunan pertanian akan berorientasi dan fokus pada upaya peningkatan produksi dan produktivitas yang optimal.

d. Tingkat Ketersediaan Air

Ketersediaan air merupakan salah satu faktor penentu yang mendasar untuk keberhasilan dan keberlanjutan kawasan peruntukan pertanian. Ketersediaan air tersebut terutama untuk menunjang sub sistem usahatani primer (on-farm agribusiness) dalam peningkatan produksi budidaya pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Guna mewujudkan pertanian berkelanjutan maka sumber daya air perlu dikelola secara berdaya guna dan berhasil guna.

➤ Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian

Berdasarkan komoditinya, kawasan budidaya pertanian dibagi menjadi :

a. Kawasan Budidaya Tanaman Pangan

Ciri-ciri Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan, sebagai berikut :



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

- ✚ Lokasi mengacu pada RTRW provinsi dan kabupaten/kota, dan mengacu pada kesesuaian lahan baik pada lahan basah maupun lahan kering.
- ✚ Pengembangan komoditas tanaman pangan pada lahan gambut mengacu pada kelas kesesuaian lahan gambut yang telah berlaku.
- ✚ Dibangun dan dikembangkan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan atau masyarakat sesuai dengan biofisik dan sosial ekonomi dan lingkungan.
- ✚ Berbasis komoditas tanaman pangan nasional dan daerah dan, atau komoditas lokal yang mengacu pada kesesuaian lahan
- ✚ Dapat diintegrasikan dengan komoditas budidaya lainnya
- ✚ Kawasan pertanian pangan pada lahan basah yang telah diusahakan secara terus menerus tanpa melakukan alih komoditas yang mencakup satu atau lebih dan 7 (tujuh) komoditas utama tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubijalar).
- ✚ Kawasan pertanian pangan pada lahan kering yang telah diusahakan secara terus menerus di musim hujan tanpa melakukan alih komoditas yang mencakup satu atau lebih dan 7 (tujuh) komoditas utama tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan Ubi jalar), dan tanaman pangan alternatif sesuai potensi daerah masing-masing.

Syarat-syarat petani lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah sebagai berikut :

- ✚ Petani tergabung dalam wadah kelompok tani, gabungan kelompok tani, Perkumpulan Petani Pemakai Air yang diarahkan menjadi kelompok usaha atau koperasi.
- ✚ Petani bersedia dan atau sudah melaksanakan operasional dan pemeliharaan infrastruktur pertanian di tingkat usaha tani secara swadaya dan atau swadana maupun alokasi dana dan pemerintah dan atau pemerintah daerah.
- ✚ Petani bersedia untuk tidak mengalihfungsikan lahannya menjadi lahan bukan pertanian



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

- ✚ Petani berdomisili di desa atau desa yang berdekatan dan lahan usahatani tersebut.

Syarat pengembangan kawasan pertanian pangan sebagai berikut:

- ✚ Lahan yang dipilih mempunyai kelas kesesuaian lahan S1 (sangat sesuai), S2 (cukup sesuai) atau S3 (sesuai marginal). Diutamakan yang tergolong S1 atau S2.
- ✚ Lahan pengembangan bukan merupakan lahan pertanian yang telah diusahakan, dan diutamakan pada lahan yang memiliki potensi, lahan tenlantar atau lahan tidur
- ✚ Letak kawasan pengembangan tidak jauh dan tempat tinggal petani dan potensi untuk pengembangan infrastruktur cukup mudah.
- ✚ Pengembangan lahan tanaman pangan pada lahan basah mengikuti rencana pembangunan inigasi sebagai sumber air, sedangkan pengembangan lahan tanaman pangan di lahan kering harus mempertimbangkan jumlah curah hujan dan rencana pengembangan dan ketersediaan sumber air permukaan lainnya.

b. Kawasan Budidaya Hortikultura

Berdasarkan dominasi komoditasnya, tipe kawasan agribisnis hortikultura dapat dibedakan atas :

- ✚ Kawasan dengan dominasi komoditas hortikultura dengan sedikit atau tanpa tambahan/sisipan komoditas lainnya.
- ✚ Kawasan budidaya hortikultura yang seimbang atau hampir seimbang antara komoditas hortikultura dan komoditas lainnya.
- ✚ Kawasan dengan dominasi komoditas nonhortikultura dengan sedikit atau banyak tambahan/ sisipan komoditas hortikultura di dalamnya.

Kriteria yang menjadi dasar penetapan kawasan budidaya hortikultura adalah :



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

- ✚ Mempunyai kesesuaian lahan yang didukung adanya sarana dan prasarana budidaya, panen dan pasca panen.
  - ✚ Memiliki potensi untuk pengembangan sistem dan usaha agribisnis hortikultura.
  - ✚ Mempunyai akses dan prasarana transportasi jalan dan pengangkutan yang mudah, dekat dengan pusat pemasaran dan pengumpulan produksi
- c. Kawasan Budidaya Perkebunan

Ciri-ciri Kawasan Peruntukan Perkebunan :

- ✚ Lokasi mengacu pada RTRW provinsi dan kabupaten/kota, dan mengacu pada kesesuaian lahan baik pada lahan basah maupun lahan kering.
- ✚ Pengembangan perkebunan pada lahan gambut mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ✚ Dibangun dan dikembangkan oleh pemerintah, peminintah daerah, swasta dan atau masyarakat sesuai dengan biofisik dan sosial ekonomi dan lingkungan.
- ✚ Berbasis komoditas perkebunan nasional dan daerah dan atau komoditas lokal yang mengacu pada kesesuaian lahan.
- ✚ Pengembangan kelompok tani, gabungan kelompok tani, kelompok usaha atau koperasi atau petani perorangan.
- ✚ Dapat diintegrasikan dengan komoditas budidaya lainnya.

Syarat Pemanfaatan dan Pengembangan Kawasan Budidaya Perkebunan:

- ✚ Kawasan perkebunan yang diusahakan pada lahan basah, terutama lahan rawa dan gambut mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ✚ Kawasan peruntukan perkebunan yang diusahakan pada lahan kering di dataran rendah dan atau dataran tinggi mengacu pada kesesuaian lahan yang diterbitkan oleh Departemen Pertanian.



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

- ✚ Kawasan peruntukan komoditas spesifik dan dilindungi yang diusahakan pada lahan basah atau lahan kering mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Kawasan Budidaya Peternakan

Kawasan peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terintegrasi dengan subsektor lainnya sebagai komponen usahatani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses industri hulu sampai hilir. Kawasan budidaya peternakan pada saat ini relatif semakin sulit dijumpai di tingkat kabupaten/kota, karena kompetisi penggunaan lahan semakin tinggi dan dukungan pemerintah daerah yang terbatas. Di lain pihak, kebutuhan dan konsumsi daging semakin meningkat seiring dengan penambahan penduduk dan usia serta kesejahteraan penduduk yang semakin baik. Pada saat ini diperkirakan masih terdapat sekitar 2 juta ha luas lahan padang penggembalaan dan hijauan makan ternak sebagai sumber kawasan budidaya peternakan yang dapat dijadikan dan ditingkatkan menjadi kawasan peruntukan peternakan.

Ciri-ciri Kawasan Peruntukan Peternakan :

- ✚ Lokasi mengacu pada RTRW provinsi dan kabupaten/kota, dan mengacu pada kesesuaian lahan.
- ✚ Dibangun dan dikembangkan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan atau masyarakat sesuai dengan biofisik dan sosial ekonomi dan lingkungan.
- ✚ Berbasis komoditas ternak unggulan nasional dan daerah dan atau komoditas ternak strategis.
- ✚ Pengembangan kelompok tani menjadi kelompok usaha.
- ✚ Dapat diintegrasikan pada kawasan budidaya lainnya.



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

- ✚ Didukung oleh ketersediaan sumber air, pakan, teknologi, kelembagaan serta pasar.

Komponen Kawasan Peruntukan Peternakan :

- ✚ Lahan

Lahan sebagai basis ekologis pendukung pakan dan lingkungan budidaya harus dioptimalkan pemanfaatannya. Dalam pengembangan kawasan agribisnis peternakan perlu memperhatikan kesesuaian lahan, agriklimat yang mendukung keunggulan lokasi yang bersangkutan. Dalam penetapan lokasi kawasan peternakan yang dikelola oleh perusahaan swasta, pemerintah daerah dan badan usaha mUik pemerintah dan pemerintah daerah serta masyarakat mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- ✚ Peternak

Peternak diarahkan untuk berkelompok dan berkembang menuju terbentuknya suatu wadah/koperasi usaha peternakan yang mandiri.

- ✚ Ternak

Pemilihan jenis ternak didasarkan atas potensi jenis ~ternak yang menghasilkan keuntungan dengan skala usaha ekonomis dan potensi pemasarannya, dapat diterima oleh masyarakat setempat serta selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- ✚ Teknologi

Untuk menghasilkan produk yang berdaya saing, maka perlu dikembangkan komoditas yang memenuhi persyaratan baik kuantitas maupun kualitas melalui penyediaan teknologi terapan yang tepat guna dan tepat lokasi baik budidaya, pasca produksi dan pengolahan hasil.

- ✚ Sarana dan Prasarana Pendukung

Berkembangnya kawasan peruntukan peternakan sangat ditentukan oleh tersedianya sarana dan prasarana pendukung atau kemudahan dalam mencapai



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

akses terhadap pemasaran dan sarana produksi. Sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan untuk pengembangan peternakan antara lain :

- Sarana pendukung industri yaitu industri pakan, industri bibit/bakalan ternak, industri obat dan vaksin, industri alat dan mesin pertanian dan lain sebagainya.
- Sarana pendukung budidaya yaitu pos kesehatan hewan, pos Inseminasi Buatan, sarana pembuatan kompos dan sebagainya.
- Sarana pendukung pasca panen dan pengolahan hasil seperti: rumah potong hewan industri pengolah susu, industri pengolah daging dan produk ternak lainnya.
- Sarana pendukung pemasaran yaitu holding ground, pasar hewan, sarana transportasi dan lain sebagainya.
- Sarana pendukung pengembangan usaha yaitu kelembagaan permodatan, kelembagaan penyuluhan, kelembagaan koperasi, kelembagaan penelitian, kelembagaan pasar dan lain sebagainya.

Klasifikasi Kawasan peruntukan peternakan dapat dibedakan berdasarkan :

- + Komoditas yang terdiri atas kawasan sapi perah, sapi potong, kambing/domba, ayam buras, itik, babi dan ayam ras petelur dan pedaging.
- + Sistem Usaha Peternakan yang meliputi sistem ekstensifikasi (kawasan pastura/padang penggembalaan) dan Sistem Intensifikasi (kawasan usaha peternakan).

Kawasan pastura terdiri atas kawasan penggembalaan umum dan kawasan rand:

- + Kawasan ranci sebagai kawasan peternakan yang sama dengan kawasan umum hanya pada umumnya dimiliki oleh sebuah badan usaha, sudah memanfaatkan teknologi sistem pembenihan pakan yang baik dan pemagaran kawasan.

Sistem intensifikasi (kawasan usaha peternakan) :





**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

- ✚ Sistem intensifikasi adalah kawasan peternakan dalam suatu hamparan lahan dan umumnya meliputi satu jenis ternak yang dimiliki oleh perorangan, kelompok atau badan usaha peternakan (KUNAK) dan yang sudah mengarah kepada industrialisasi disebut kawasan industri peternakan (KINAK).

## **2.4 Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Kriteria Pedoman**

### **Teknis Kawasan Budidaya**

#### ➤ **Kawasan Budidaya**

wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

##### a. Kawasan Peruntukan Pertanian

kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, kawasan pertanian tanaman tahunan/perkebunan, perikanan, peternakan.

##### b. Kegiatan Kawasan Pertanian

Kegiatan kawasan peruntukan pertanian meliputi pertanian tanaman pangan dan palawija, perkebunan tanaman keras, peternakan, perikanan air tawar, dan perikanan laut.

Fungsi utama, Kawasan peruntukan pertanian memiliki fungsi antara lain :

- ✚ Menghasilkan bahan pangan, palawija, tanaman keras, hasil peternakan dan perikanan;
- ✚ Sebagai daerah resapan air hujan untuk kawasan sekitarnya;
- ✚ Membantu penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

##### c. Karakteristik lokasi dan kesesuaian lahan

Karakteristik kawasan peruntukan pertanian terdiri dari pertanian lahan basah, pertanian lahan kering dan pertanian tanaman tahunan. Masing-



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

masing-masing karakteristik kawasan peruntukan pertanian tersebut memiliki kriteria teknis seperti ditunjukkan pada **Tabel 2.2**

Kriteria teknis :

- ✚ Pemanfaatan dan pengelolaan lahan harus dilakukan berdasarkan kesesuaian lahan;
- ✚ Upaya pengalihan fungsi lahan dari kawasan pertanian lahan kering tidak produktif (tingkat kesuburan rendah) menjadi peruntukan lain harus dilakukan secara selektif tanpa mengurangi kesejahteraan masyarakat;

Kawasan pertanian lahan basah mencakup :

- ✚ Pola tanam: monokultur, tumpang sari, campuran tumpang gilir;
- ✚ Tindakan konservasi berkaitan dengan Vegetatif: pola tanam sepanjang tahun, penanaman tanaman penutup tanah atas air tersedia dengan jumlah dan mutu yang memadai yaitu 5 - 20 L/detik/ha untuk mina padi, mutu air bebas polusi
- ✚ suhu 23 - 30°C, oksigen larut 3 - 7 ppm, amoniak 0.1 ppm dan pH 5 - 7;
- ✚ Mekanik: pembuatan pematang, teras, dan saluran drainase.

Kawasan pertanian lahan kering mencakup :

- ✚ Kemiringan 0 - 6%: tindakan konservasi secara vegetatif ringan, tanpa tindakan konservasi secara mekanik;
- ✚ Kemiringan 8 - 15%: tindakan konservasi secara vegetatif ringan sampai berat yaitu pergiliran tanaman, penanaman menurut kontur, pupuk hijau, pengembalian bahan organik, tanaman penguat keras;
- ✚ Tindakan konservasi secara mekanik (ringan), teras gulud disertai tanaman penguat keras;



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

- ✚ Tindakan konservasi secara mekanik (berat), teras gulud dengan interval tinggi 0,75 – 1,5 m dilengkapi tanaman penguat, dan saluran pembuang air ditanami rumput. Dan Kemiringan 15 - 40%:
- ✚ Tindakan konservasi secara vegetatif (berat), pergiliran tanaman, penanaman menurut kontur, pemberian mulsa sisa tanaman, pupuk kandang, pupuk hijau, sisipan tanaman tahunan atau batu penguat teras dan rokrak;

Kawasan pertanian tanaman tahunan mencakup :

- ✚ Kemiringan 0 -6 %: pola tanam monokultur, tumpang sari, interkultur atau campuran. Tindakan konservasi, vegetatif tanaman penutup tanah, penggunaan mulsa, pengolahan tanah minimum. Tanpa tindakan konservasi secara mekanik;
- ✚ Kemiringan 8 - 15%: Pola tanam, monokultur, tumpang sari, interkultur atau campuran; dan Tindakan konservasi secara vegetatif, tanaman penutup tanah, penggunaan mulsa, pengolahan tanah minimal;
- ✚ Tindakan konservasi secara mekanik, saluran drainase, rokrak teras bangku, diperkuat dengan tanaman penguat atau rumput. Kemiringan 25 - 40%: Pola tanam, monokultur, interkultur atau campuran; dan Tindakan konservasi secara vegetatif, tanaman penutup tanah, penggunaan mulsa, pengolahan tanah minimal;
- ✚ Tindakan konservasi secara mekanik, saluran drainase, rokrak teras individu.



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

d. Kawasan Perikanan

Kawasan perikanan mencakup luas lahan untuk kegiatan budidayatambak udang/ ikan dengan atau tanpa unit pengolahannya adalah = 25 Ha, budi daya perikanan terapung di air tawar luas = 2,5 Ha atau jumlah= 500 unit;

- e. Pemanfaatan dan penggunaan lahan untuk usaha perkebunan, luasmaksimum dan luas minimumnya ditetapkan oleh Menteri denganberpedoman pada jenis tanaman, ketersediaan tanah yang sesuai secaraagriklimat, modal, kapasitas pabrik, tingkat kepadatan penduduk, polapengembangan usaha, kondisi geografis, dan perkembangan teknologi; Hak guna usaha untuk usaha perkebunan diberikan dengan jangka waktupaling lama 35 (tiga puluh lima) tahun; dan Lahan perkebunan besar swasta yang terlantar (kelas V) yang tidakberupaya untuk melakukan perbaikan usaha setelah dilakukandibinaan, pemanfaatan lahannya dapat dialihkan untuk kegiatan nonperkebunan.

**Tabel 2.2** Karakteristik Kawasan Peruntukan Pertanian

KriteriaTeknis		Pertanian Lahan Basah	Pertanian Lahan Kering	Pertanian Tanaman Tahunan
<b>Iklm:</b>				
Kelembaban	(%)	33-90	29-32	42-75
Curah Hujan	(mm)	A, B, C(Schmidt &	350-600	1200-1600
<b>SifatFisik Tanah:</b>				
Drainase		agakbaik s/dagak terhambat	baik s/dagak terhambat	baik s/dagak terhambat
<b>Tekstur:</b>		h, ah , s	h, ah , s	h, ah , s
Bahan Kasar	(%)	<15	<15	<35
KedalamanTanah	(cm)	>30	>30	>60



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Kriteria Teknis		Pertanian Lahan Basah	Pertanian Lahan Kering	Pertanian Tanaman Tahunan
Ketebalan Gambut	(cm)	<200	<200	<200
Kematangan Gambut		saprik, hemik	saprik, hemik	saprik, hemik
<b>Retensi Hara:</b>				
Kejuhan Basa	(%)	>30	>30	>30
Kemasaman Tanah (pH)		5,5-8,2	5,6-7,6	5,2-7,5
Kapasitas Tukar Kation	(Cmol)	>12	>12	>12
Kandungan C-Organik	(%)	>0,8	>0,8	>0,8
<b>Toksitas:</b>				
Kedalaman Bahan Sulfidik	(cm)	>50	>50	>50
Salinitas	(dS/m)	<4	<4	<4
<b>Bahaya Erosi:</b>				
Lereng	(%)	<8	<15	<40
Tingkat Bahaya Erosi		r	sd	sd
<b>Bahaya Banjir:</b>				
Genangan		F0, F11, F12, F21, F23	F0, F11, F12, F21, F23	F0, F11, F12, F21, F23
Penyiapan Lahan:				
Batu di Permukaan	(%)	<atau= 25	<atau= 25	<atau= 25
Singkapan Batuan	(%)	<atau= 25	<atau= 25	<atau= 25

*Sumber : Puslitbang Tanah, Departemen Pertanian*



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Keterangan :

<b>Tekstur Tanah</b>	<b>Bahaya Erosi</b>	<b>Kelas Bahaya Banjir (F)</b>
ak : agak kasar	sr : sangat ringan	F0 : tanpa
s : sedang	r : ringan	F1 : ringan
a : agak halus	sd : sedang	F2 : sedang
h : halus	b : berat	F3 : agak berat
k : kasar	sb : sangat berat	F4 : berat

**2.5 Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial**

**2.5.1 Rencana Pengembangan Informasi Geospasial**

Informasi Geospasial (IG) merupakan alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihantian. IG sangat berguna sebagai sistem pendukung pengambilan kebijakan dalam rangka mengoptimalkan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan ketahanan nasional, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam, penyusunan rencana tata ruang, perencanaan lokasi investasi dan bisnis perekonomian, penentuan garis batas wilayah, pertanahan, dan kepariwisataan. IG juga merupakan informasi yang amat diperlukan dalam penanggulangan bencana, pelestarian lingkungan hidup, dan pertahanan keamanan.

Menyadari pentingnya IG dalam pembangunan di berbagai sektor, IG harus dijamin kemutakhiran dan keakuratannya serta diselenggarakan secara terpadu. Hal ini untuk menghindari adanya kekeliruan, kesalahan, dan tumpang tindih informasi yang berakibat pada ketidakpastian hukum, inefisiensi anggaran pembangunan, dan inefektivitas informasi. IG secara umum bersifat terbuka dan harus mudah diakses oleh para pengguna sehingga secara optimal dapat dimanfaatkan. Keterbukaan IG



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

juga menjadi jaminan adanya pelayanan publik yang baik oleh aparat pemerintah dalam menyediakan IG bagi kepentingan masyarakat.

Mewujudkan keterpaduan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan IG, perlu diatur kategorisasi secara pasti. Secara umum IG terbagi menjadi Informasi Geospasial Dasar (IGD) dan Informasi Geospasial Tematik (IGT). IGD mencakup acuan posisi dan peta dasar, adapun IGT mencakup berbagai ragam tema, seperti kehutanan, pertanian, perikanan, dan pertambangan. IGD menjadi acuan pembuatan berbagai IGT. Salah satu ciri penting IGD adalah unsur-unsurnya tidak berubah dalam waktu yang lama sesuai dengan karakteristik dari unsur-unsur tersebut.

Selain kategorisasi IG, perlu diatur pula masalah kelembagaan dalam penyelenggaraan IG. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian siapa yang bertanggung jawab atas data dan informasi tertentu. Selanjutnya diperlukan pengaturan tentang sumber daya manusia dan badan usaha di bidang IG, sehingga industri IG dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kemajuan industri IG akan menjamin ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan IG di tengah masyarakat dan dalam proses pembangunan.

### **2.5.2 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan**

Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 22 (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (IG), Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) berubah menjadi Badan Informasi Geospasial (BIG). Dengan perubahan ini tugas dan fungsi BIG di bidang survei dan pemetaan semakin luas. Perpres Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (BIG) telah disahkan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 2011, menjelaskan bahwa kedudukan BIG berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas BIG adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan tugas tersebut, BIG menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang informasi geospasial



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

- b. Penyusunan rencana dan program di bidang informasi geospasial
- c. Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar (IGD) yang meliputi pengumpulan data, pengolahan, penyimpanan data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial dasar;
- d. Pengintegrasian Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang belum diselenggarakan selain big meliputi pengumpulan data, pengolahan, penyimpanan data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial tematik;
- f. Penyelenggaraan Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG) meliputi penyimpanan, pengamanan, penyebarluasan data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial;
- g. Penyelenggaraan dan pembinaan jaringan informasi geospasial;
- h. Akreditasi kepada lembaga sertifikasi di bidang informasi geospasial;
- i. Pelaksanaan kerjasama dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri;
- j. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan big;
- k. Pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaporan, penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- l. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, keprotokolan, kehumasan, kerjasama, hubungan antar lembaga, kearsipan, persandian, barang milik negara, perlengkapan, dan rumah tangga big;
- m. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BIG dikoordinasikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang riset dan teknologi.





### **2.5.3 Sistem Informasi Geografis (SIG)**

Pemanfaatan dan penggunaan lahan merupakan bagian kajian geografi yang perlu dilakukan dengan penuh pertimbangan dari berbagai segi. Tujuannya adalah untuk menentukan zonifikasi lahan yang sesuai dengan karakteristik lahan yang ada. Misalnya, wilayah pemanfaatan lahan di kota biasanya dibagi menjadi daerah pemukiman, industri, perdagangan, perkantoran, fasilitas umum, dan jalur hijau. SIG dapat membantu pembuatan perencanaan masing-masing wilayah tersebut dan hasilnya dapat digunakan sebagai acuan untuk pembangunan utilitas-utilitas yang diperlukan. Lokasi dari utilitas-utilitas yang akan dibangun di daerah perkotaan (*urban*) perlu dipertimbangkan agar efektif dan tidak melanggar kriteria-kriteria tertentu yang bisa menyebabkan ketidakselarasan. Contohnya, pembangunan tempat sampah. Kriteria-kriteria yang bisa dijadikan parameter antara lain: di luar area pemukiman, berada dalam radius 10 meter dari genangan air, berjarak 5 meter dari jalan raya, dan sebagainya.

Dengan kemampuan SIG yang bisa memetakan apa yang ada di luar dan di dalam suatu area, kriteria-kriteria ini nanti digabungkan sehingga memunculkan irisan daerah yang tidak sesuai, agak sesuai, dan sangat sesuai dengan seluruh kriteria. Di daerah pedesaan (*rural*) manajemen tata guna lahan lebih banyak mengarah ke sektor pertanian. Dengan terpetakannya curah hujan, iklim, kondisi tanah, ketinggian, dan keadaan alam, akan membantu penentuan lokasi tanaman, pupuk yang dipakai, dan bagaimana proses pengolahan lahannya. Pembangunan saluran irigasi agar dapat merata dan minimal biayanya dapat dibantu dengan peta sawah ladang, peta pemukiman penduduk, ketinggian masing-masing tempat dan peta kondisi tanah. Penentuan lokasi gudang dan pemasaran hasil pertanian dapat terbantu dengan memanfaatkan peta produksi pangan, penyebar konsumen, dan peta jaringan transportasi. Selain untuk manajemen pemanfaatan lahan, SIG juga dapat membantu dalam hal penataan ruang. Tujuannya adalah agar penentuan pola pemanfaatan ruang disesuaikan dengan kondisi fisik dan sosial yang ada, sehingga lebih efektif dan



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

efisien. Misalnya penataan ruang perkotaan, pedesaan, permukiman, kawasan industri, dan lainnya. (diklatgeospasial.net/2012/03)

1. Inventarisasi sumber daya alam

Secara sederhana manfaat SIG dalam data kekayaan sumber daya alam adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui persebaran berbagai sumber daya alam, misalnya minyak bumi, batubara, emas, besi dan barang tambang lainnya.
- b) Untuk mengetahui persebaran kawasan lahan, misalnya:
- c) Kawasan lahan potensial dan lahan kritis;
- d) Kawasan hutan yang masih baik dan hutan rusak;
- e) Kawasan lahan pertanian dan perkebunan;
- f) Pemanfaatan perubahan penggunaan lahan;
- g) Rehabilitasi dan konservasi lahan.

2. Untuk pengawasan daerah bencana alam

Kemampuan SIG untuk pengawasan daerah bencana alam, misalnya:

- a) Memantau luas wilayah bencana alam;
- b) Pencegahan terjadinya bencana alam pada masa datang;
- c) Menyusun rencana-rencana pembangunan kembali daerah bencana;
- d) Penentuan tingkat bahaya erosi;
- e) Prediksi ketinggian banjir;
- f) Prediksi tingkat kekeringan.

3. Bidang sosial

Selain dalam inventarisasi sumber daya alam dan perencanaan pola pembangunan, SIG juga dapat dimanfaatkan dalam bidang sosial. Dalam bidangsosial SIG dapat dimanfaatkan pada hal-hal berikut:

- a) Mengetahui potensi dan persebaran penduduk.
- b) Mengetahui luas dan persebaran lahan pertanian serta kemungkinan pola drainasenya.



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

- c) Untuk pendataan dan pengembangan jaringan transportasi.
- d) Untuk pendataan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan.

## **2.6. Kajian Kebijakan RPJMD Tahun 2015-2019**

RPJMD Kota Pontianak Tahun 2015-2019 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun yang ditetapkan untuk memberikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas serta indikasi pendanaan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Pontianak. Secara substansial, RPJM Kota Pontianak Tahun 2015-2019 juga memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

### **2.6.1 Tujuan RPJMD**

RPJMD Kota Pontianak Tahun 2015-2019 disusun dengan tujuan :

1. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam tujuan, sasaran dan strategi pembangunan untuk periode tahun 2015-2019, disertai dengan program-program prioritas dengan berpedoman pada RPJP Kota Pontianak Tahun 2005-2025 serta mengacu kepada agenda jangka menengah propinsi dan nasional, yang selanjutnya menjadi landasan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
2. Menyiapkan rancangan arah pembangunan tahunan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam periode 2015-2019 dan selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD di Pemerintah Kota Pontianak;
3. Merumuskan rancangan kerangka perekonomian daerah serta pembiayaan pembangunan di Kota Pontianak untuk periode Tahun Anggaran 2015-2019;



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

4. Menetapkan rumusan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam bentuk program-program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2015-2019. Indikator kinerja tersebut selanjutnya menjadi Tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota, serta tolok ukur penilaian keberhasilan kepala SKPD dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program kepala daerah;
5. Menyiapkan instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Pontianak untuk periode 2015-2019.

## **2.7. Kajian Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak**

### **2.7.1 Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota**

Penataan ruang wilayah Kota Pontianak bertujuan untuk mewujudkan kota perdagangan dan jasa terdepan di Kalimantan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

### **2.7.2 Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota**

Kebijakan penataan ruang Kota Pontianak terdiri atas :

- pemantapan fungsi dan peran Kota sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Barat dan Pusat Kegiatan Nasional;
- pengembangan pusat-pusat kegiatan kota secara hirarkhis dan merata;
- peningkatan aksesibilitas dan transportasi yang dapat mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan keterkaitan antar pusat kegiatan dan keterkaitan dengan Kabupaten di sekitarnya;
- peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana perkotaan;



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

- penetapan dan pengelolaan kawasan lindung yang mampu memperhatikan kelestarian dukungan fungsi lingkungan hidup
- pengembangan kawasan perdagangan dan jasa secara merata di pusat-pusat kegiatan kota;
- Penetapan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

## **2.8. Kajian Kebijakan Rencana Detail Tata Ruang Kota Pontianak**

### **2.8.1 Fungsi Dan Manfaat RDTR Kota**

RDTR dan Peraturan Zonasi berfungsi sebagai berikut:

- Mendorong perwujudan pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan program pembangunandaerah dan nasional
- Menjaga konsistensi pembangunan dan keserasian pengembangan kawasan fungsional sesuai RTRW;
- Terwujudnya keterkaitan antar program pembangunan yang selaras, serasi dan efisiensi penataan ruang;
- Sebagai perangkat pengendalian pemanfaatan ruang;
- Sebagai acuan pemberian insentif dan disinsentif
- Sebagai acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang
- Sebagai panduan teknis dalam pemberian izin pemanfaatan ruang
- Sebagai acuan dalam penyusunan Panduan Rancangan Kota dan
- Sebagai dasar pengenaan sanksi. UU 26/2007 tentang Penataan Ruang PERATURAN ZONASI (Permen PU No. 20/PRT/M/2011) RTRW Kota (Permen PU No. 17 Tahun 2009)
- RDTR (Permen PU No. 20/PRT/M/2011)



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Manfaat RDTR dan PZ untuk:

- Menjaga kualitas ruang dengan pengendalian pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan zona dan sub zona peruntukan;
- Memperkecil gangguan atau dampak kegiatan dalam pemanfaatan ruang
- Penentuan lokasi berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi dan lingkungan permukiman dengan karakteristik tertentu
- Alat operasional dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan, pembangunan
- fisik yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat;
- Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk setiap sub zona sesuai fungsinya di dalam struktur ruang kecamatan secara keseluruhan dan
- Ketentuan bagi penetapan kawasan yang diprioritaskan untuk disusun program
- pengembangan kawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.



### **2.8.2 Tujuan dan Sasaran Penyusunan RDTR Kota**

Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kota Pontianak dimaksudkan untuk mewujudkan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi yang mendukung terciptanya kawasan strategis maupun kawasan fungsional secara aman, produktif dan berkelanjutan. Sedangkan tujuan pekerjaan ini adalah untuk mewujudkan keseimbangan, keharmonisan, keselarasan dan keterpaduan antar unsur pemanfaatan ruang sehingga pembangunan Kota Pontianak menjadi lebih terarah, jelas, serta memberikan kepastian terhadap berbagai jenis investasi yang akan masuk di Kota Pontianak. Diharapkan pada akhirnya akan terjadi “multiplier effect” yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan penyusunan RDTR dan peraturan zonasi adalah menyediakan perangkat pengendali dan operasional baik bagi pemerintah kota, serta profesional dan praktisi penataan ruang dalam melaksanakan pemanfaatan dan pengendalian ruang kota agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang sudah ditetapkan dan sesuai dengan amanat undang-undang dan peraturan pemerintah terkait. Tujuan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- Tujuan Zoning Regulation sesuai Undang-undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang dan disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang;
- Menjamin bahwa pembangunan yang akan dilaksanakan dapat mencapai standar kualitas lokal minimum (health, safety and welfare);
- Melindungi atau menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu penghuni atau pemanfaat ruang yang telah ada;
- Memelihara nilai property;
- Memelihara/memantapkan lingkungan dan melestarikan kualitasnya;
- Menyediakan aturan yang seragam di setiap zona;



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

- Meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai;
- Meningkatkan pelayanan terhadap fasilitas yang bersifat publik;
- Menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat;
- Mendorong pengembangan ekonomi.

Adapun sasaran yang hendak dicapai melalui penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kota Pontianak adalah:

- Tersajinya data dan informasi wilayah Kota Pontianak yang akurat dan aktual.
- Teridentifikasinya potensi dan permasalahan wilayah Kota Pontianak, sebagai masukan dalam proses penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Zoning Regulation Kota Pontianak, termasuk kawasan perkotaan yang layak dibuat RDTR nya.
- Tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi pada Bagian Wilayah Kota (BWK) di Kota Pontianak.
- Tersusunnya tahapan pembangunan pada BWK yang berkesinambungan dan realistis.
- Memberikan pedoman untuk penyusunan peraturan zonasi, pemberian advice planning, pengaturan bangunan setempat dan dalam pemberian perijinan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.

Manfaat dari disusunnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi ini adalah sebagai berikut:

- Penentu lokasi berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi dan lingkungan permukiman dengan karakteristik tertentu
- Alat operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik Kota Pontianak yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta dan/atau Masyarakat;





**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

- Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk setiap bagian wilayah sesuai dengan fungsinya di dalam struktur ruang Kota Pontianak secara keseluruhan; dan
- Ketentuan bagi penetapan kawasan diprioritaskan untuk disusun program pengembangankawasan dan pengendalian pemanfaatan ruangnya pada tingkat BWP atau Sub BWP.

## **2.9. Pengertian Secara Umum**

### **2.9.1 Pengertian Agripolitan**

Berdasarkan Departemen Pertanian (2002), agripolitan berasal dari kata agri yang berarti pertanian dan politan yang berarti kota. Agripolitan menurut konsep dari Departemen Pertanian adalah kota pertanian yang tumbuh dan berkembang yang mampu memacu perkembangan sistem dan usaha agribisnis sehingga dapat melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya.

Menurut kamus istilah penataan ruang dan pengembangan wilayah (2007), pendekatan agripolitan atau ancangan kota tani adalah konsep yg diperkenalkan oleh John Friedman; mengenalkan elemen-elemen kehidupan perkotaan pada daerah pertanian untuk merubah suasana desa menjadi suasana kota-desa (suasana perkotaan di tengah-tengah daerah pertanian); kepadatan efektif penduduk adalah 200 jiwa per km<sup>2</sup> dan mempunyai cukup kewenangan otonomi dan kemampuan sumber daya ekonomi sendiri untuk menyelenggarakan pembangunan kotanya. Untuk menghadapi arus urbanisasi yang begitu cepat khususnya di wilayah Asia, salah satu strategi pembangunan perkotaan yang patut diperhatikan ialah menggunakan ancangan kota tani bagi daerah-daerah perdesaan yang terpilih (secara selektif).

Menurut Rustiadi dan Pranoto (2007), agripolitan adalah : (1) suatu model pembangunan yang mengandalkan desentralisasi, mengandalkan pembangunan infrastruktur setara kota di wilayah perdesaan, sehingga mendorong urbanisasi (peng-



kotaan dalam arti positif); (2) bisa menanggulangi dampak negative pembangunan seperti migrasi desa-kota yang tidak terkendali, polusi, kemacetan lalu lintas, pengkumuhan kota, kehancuran massif sumberdaya alam, pemiskinan desa, dan lain-lain.

### **2.9.2 Pengertian Kawasan Agripolitan**

Kawasan agripolitan menurut Rustiadi dan Pranoto (2007) merupakan kawasan perdesaan yang secara fungsional merupakan kawasan dengan kegiatan utama adalah sektor pertanian. Departemen Pertanian (2002), kawasan agripolitan adalah kawasan agribisnis yang memiliki fasilitas perkotaan. Kawasan agripolitan terdiri dari kota pertanian dan desa-desa sentra produksi pertanian yang ada di sekitarnya, dengan batasan yang tidak ditentukan oleh batasan administrasi pemerintahan, tetapi lebih ditentukan dengan memperhatikan skala ekonomi yang ada.

Berdasarkan [www.baritokuala.go.id](http://www.baritokuala.go.id) (2003), kawasan agripolitan adalah kawasan terpilih dari kawasan agribisnis atau sentra produksi pertanian terpilih dimana pada kawasan tersebut terdapat kota pertanian (agripolis) yang merupakan pusat pelayanan agribisnis yang melayani, mendorong dan memacu pembangunan pertanian kawasan dan wilayah-wilayah sekitarnya. Lokasi kawasan agripolitan adalah kawasan agribisnis terpilih (sentra produksi pertanian) yang memiliki komoditi unggulan (spesifik lokasi) yang merupakan sumber pendapatan sebagian besar masyarakat. Terdapat empat prinsip yang diterapkan pada kawasan agripolitan, yaitu :

- ✚ Prinsip kerakyatan, pembangunan diutamakan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat banyak, bukan kesejahteraan orang per orang atau kelompok, berdasarkan prinsip keadilan.



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

- ✚ Prinsip swadaya, bimbingan dan dukungan kemudahan (fasilitas) yang diberikan haruslah mampu menumbuhkan keswadayaan dan kemandirian, bukan menumbuhkan ketergantungan.
- ✚ Prinsip kemitraan, memperlakukan pelaku agribisnis sebagai mitra kerja pembangunan yang berperan serta dalam seluruh proses pengambilan keputusan akan menjadikan mereka sebagai pelaku dan mitra kerja yang aktif dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- ✚ Prinsip bertahap dan berkelanjutan, pembangunan dilaksanakan sesuai dengan potensi dan kemampuan masyarakat setempat serta memperhatikan kelestarian lingkungan.

Menurut Rivai seperti yang dikutip oleh Rahmawati (2005), suatu kawasan agripolitan yang sudah berkembang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- ✚ Sebagian besar masyarakat di kawasan tersebut memperoleh pendapatan dari kegiatan pertanian (agribisnis).
- ✚ Kegiatan di kawasan tersebut sebagian besar didominasi oleh kegiatan pertanian atau agribisnis, termasuk di dalamnya usaha industri (pengolahan) pertanian, perdagangan hasil-hasil pertanian (termasuk pertanian dan permodalan), agriwisata dan jasa pelayanan.
- ✚ Hubungan antara kota dan daerah-daerah *hinterland* di sekitar kawasan agripolitan bersifat *interpendensi* atau timbal balik yang harmonis dan saling membutuhkan dimana kawasan pertanian mengembangkan usaha budidaya (*on farm*) dan produk olahan skala rumah tangga (*off farm*), sebaliknya kota menyediakan fasilitas untuk berkembangnya usaha budidaya dan agribisnis seperti penyediaan sarana pertanian, modal, teknologi, informasi pengolahan hasil dan penampungan (pemasaran) hasil produksi/produk pertanian.
- ✚ Kehidupan masyarakat di kawasan agripolitan mirip dengan suasana kota karena keadaan sarana kawasan agripolitan yang tidak jauh berbeda dengan di kota.



### **2.9.3 Konsep Pengembangan Agripolitan**

Pengembangan kawasan agripolitan menurut Departemen Pertanian (2002), adalah pembangunan ekonomi berbasis pertanian di kawasan agribisnis, yang dirancang dan dilaksanakan dengan jalan menyinergikan berbagai potensi yang ada untuk mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi, yang digerakkan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah. Pengembangan agripolitan pertama kali diperkenalkan Friedman dan Mc. Douglas (1974) sebagai suatu siasat untuk percepatan pembangunan perdesaan. Yang terkait dengan pengembangan agripolitan adalah pembangunan dalam arti luas, seperti redistribusi tanah, kesesuaian lahan, mendesain tata guna lahan dan pembangunan sarana dan prasarana.

Dalam [www.baritokuala.go.id](http://www.baritokuala.go.id) (2003), gerakan pengembangan kawasan agripolitan merupakan gerakan membangun ekonomi berbasis pertanian di kawasan agribisnis (kawasan sentra produksi pertanian) terpilih yang dirancang dan dilaksanakan dengan jalan menyinergikan dan mengelola berbagai potensi untuk mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi yang digerakkan dan difasilitasi oleh pemerintah terutama pemerintah daerah. Salah satu persyaratan pokok dalam mengembangkan suatu kawasan agripolitan adalah komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dan salah satu wujudnya dengan memiliki masterplan agripolitan atau rencana pengembangan kawasan. Masterplan dapat disusun untuk kurun waktu tertentu, biasanya lima sampai sepuluh tahun tergantung dari kepentingan dan kondisi masing-masing daerah. Masterplan harus merupakan bagian dari pembangunan wilayah di kabupaten dan penyusunannya harus melibatkan masyarakat, praktisi dan pakar setempat.



## **2.10 Terbentuknya Konsep Agropolitan**

### **2.10.1 Permasalahan Pedesaan**

Secara formal, desa didefinisikan dalam Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pemerintahan daerah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang mendefinisikan kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Menurut Rustiadi dan Pranoto (2007), ada beberapa hal yang menyebabkan sulitnya perdesaan menyejajarkan posisinya dengan perkotaan antara lain akibat : (1) kualitas sumberdaya manusia, dan (2) kualitas dan ketersediaan infrastruktur. Kondisi riil di lapangan memperlihatkan secara jelas perbedaan desa dengan kota. Desa lebih dikenal sebagai wilayah yang masih memiliki sumberdaya dan potensi alam yang besar tetapi sumberdaya manusia yang relatif masih terbelakang. Perkotaan cenderung bersifat kaya teknologi, tersedia bermacam-macam fasilitas dan kegiatan ekonomi dengan sumberdaya manusia yang lebih maju daripada keadaan di perdesaan. Kondisi tersebut menyebabkan ketimpangan yang semakin lama semakin besar seiring dengan pertumbuhan penduduk.

Lipton dalam Rustiadi dan Pranoto (2007) menyatakan bahwa meskipun secara historis negara-negara di Asia mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi sebagian (proportion) dari masyarakat perdesaan masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan yang jumlahnya tidak banyak berkurang. Kemudian secara umum dapat disimpulkan bahwa di dalam perekonomian telah terjadi misalokasi sumberdaya antara kawasan perkotaan dan wilayah perdesaan yang disebut sebagai urban biased. Walaupun jumlah penduduk perdesaan lebih banyak



dibandingkan jumlah penduduk perkotaan, tetapi bentuk permukiman penduduk lebih tersebar, lebih miskin, tidak berpikiran inovatif dan kurang terorganisasi dengan baik dibanding dengan penduduk kota. Akibatnya terjadi bias dalam alokasi sumberdaya yang tercermin dalam kepincangan antara wilayah perdesaan dengan perkotaan yang secara ekonomi tidak efisien.

### **2.10.2 Permasalahan Perkotaan**

Dalam Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang disebutkan bahwa perkotaan atau kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Tenaga kerja dari perdesaan, karena tidak mampu mengelola potensi desa yang dimilikinya akan bermigrasi ke kota. Keadaan tersebut juga memperburuk keadaan perekonomian di kota. Tenaga kerja dari desa tidak memiliki keterampilan setara dengan tenaga kerja perkotaan, cenderung memilih menjadi pekerja serabutan serta menimbulkan peningkatan kriminalitas, sanitasi buruk, dan masalah kesehatan manusia. Selain itu, migrasi besar-besaran penduduk desa menuju perkotaan menyebabkan terkurasnya sumberdaya manusia berkualitas dari desa menuju perkotaan. Kondisi tersebut terjadi karena sumberdaya manusia berkualitas tidak dapat mengekspresikan kemampuan yang dimiliki terkait dengan terbatasnya sarana dan prasarana di perdesaan.

Menurut Rahardjo (1985) berdasarkan penelitian PBB, faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan penduduk desa ke perkotaan adalah tingkat pendapatan perorangan meningkat, penambahan pendapatan cenderung dibelanjakan terutama untuk barang-barang bukan pertanian, produksi dan konsumsi lebih berdayaguna di perkotaan. Karseno dan Reksohadiprodjo (1981) menyebutkan berbagai masalah kota yang muncul akibat penduduk yang terlalu padat antara lain berakibat negatif pada



lingkungan hidup, penduduk yang tidak berkesempatan kerja yang akhirnya meningkatkan kemiskinan, kejahatan, dan sebagainya.

### **2.11 Agripolitan Sebagai Strategi Pengembangan Wilayah**

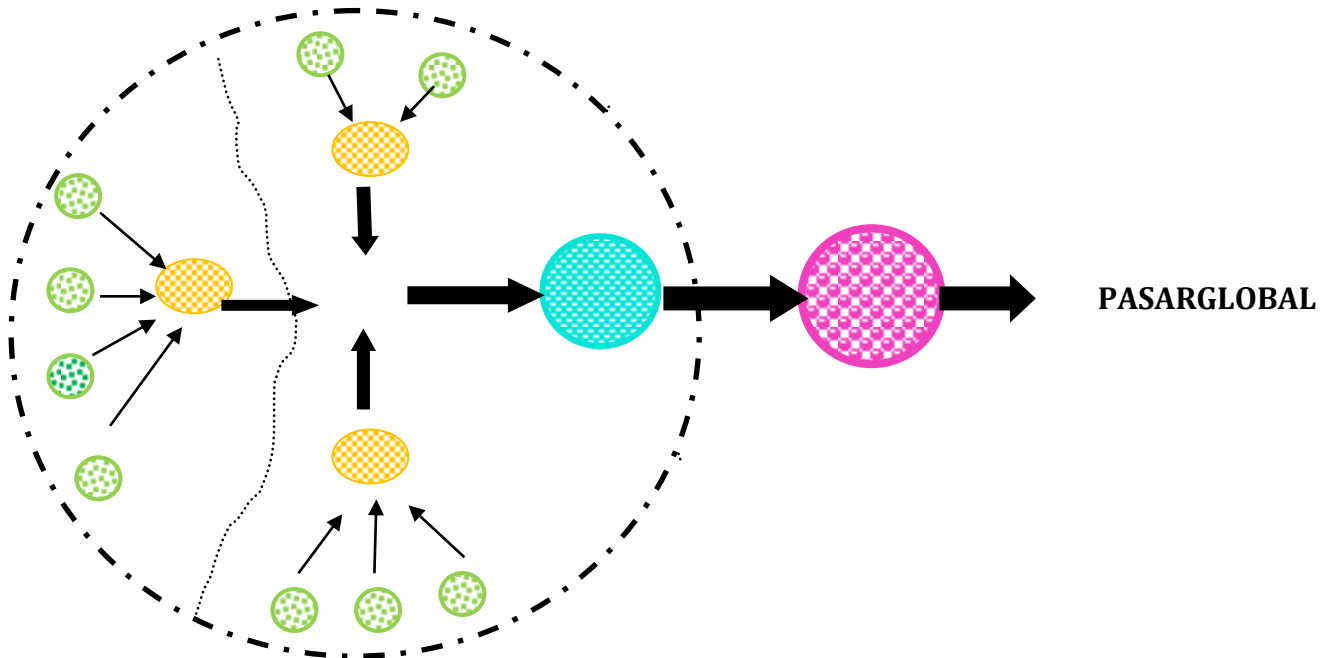
Menurut Rustiadi (2006), pengembangan wilayah merupakan proses “memanusiakan manusia”. Pengembangan wilayah memiliki makna yang hampir sama dengan pembangunan wilayah atau upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap masyarakat. Pengembangan wilayah lebih ditekankan pada pemberdayaan, kedaerahan atau kewilayahan dan lokalitas. Pengertian lain dari pengembangan wilayah merupakan suatu kegiatan yang tidak dimulai dari awal tetapi meningkatkan kuantitas atau kualitas dari sesuatu yang sudah ada. Soenarno (2007) menyatakan bahwa pengembangan agripolitan menjadi sangat penting dilakukan dalam konteks pengembangan wilayah karena (1) kawasan dan sektor yang ditetapkan untuk pengembangan agripolitan merupakan keunikan lokal masing-masing kawasan, (2) pengembangan kawasan agripolitan meningkatkan pemerataan, (3) keberlanjutan pengembangan kawasan dan sektor menjadi lebih pasti karena sektor yang dipilih mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif dibandingkan dengan sektor lainnya, (4) penetapan sistem pusat agripolitan terkait dengan sistem nasional, propinsi dan kabupaten.

Disamping itu, pentingnya pengembangan kawasan agripolitan di Indonesia diindikasikan oleh ketersediaan lahan pertanian dan tenaga kerja yang murah, telah terbentuknya kemampuan (skills) dan pengetahuan (knowledge) di sebagian besar petani, jaringan (network) terhadap sektor hulu dan hilir yang sudah terjadi, dan kesiapan pranata (institusi). Kondisi ini menjadikan suatu keuntungan kompetitif (competitive advantage) Indonesia dibandingkan dengan negara lain karena kondisi ini sangat sulit untuk ditiru (copying) (Porter, 1998). Lebih jauh lagi, mengingat pengembangan kawasan agripolitan ini menggunakan potensi lokal, maka konsep ini



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

sangat mendukung perlindungan dan pengembangan budaya sosial local (local social culture). (lihat **gambar 2.1**) :



**Gambar 2.1** Konsepsi Pengembangan Kawasan Agropolitan

*Sumber : Badan Pemerintahan Daerah*

**Keterangan :**

- |                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Penghasil Bahan Baku        | → Jalan dan Dukungan Infrastruktur |
| Pengumpul Bahan Baku        | Batas Kaw. Lindung, Budidaya, dll  |
| Sentra Produksi             | - - - Batas Kaw. Agropolitan       |
| Kota Kecil/ Pusat Regional  |                                    |
| Kota Sedang/ Besar (outlet) |                                    |

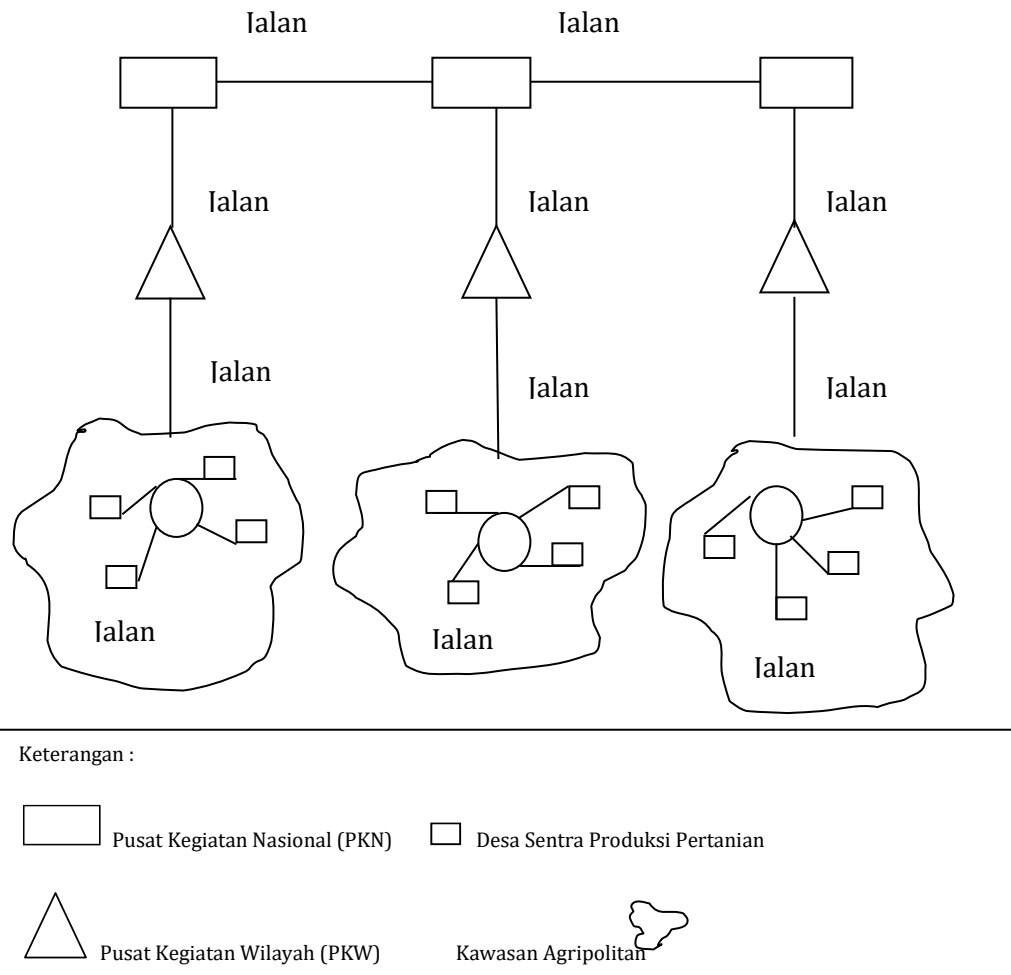
Secara lebih luas, pengembangan kawasan agropolitan diharapkan dapat mendukung terjadinya sistem kota-kota yang terintegrasi. Hal ini ditunjukkan dengan keterkaitan antar kota dalam bentuk pergerakan barang, modal, dan manusia. Melalui





**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

dukungan sistem infrastruktur transportasi yang memadai, keterkaitan antar kawasan agripolitan dan pasar dapat dilaksanakan. Dengan demikian, perkembangan kota yang serasi, seimbang, dan terintegrasi dapat terwujud (lihat gambar 4) :



**Gambar 2.2** Konsep Pengembangan Kawasan Agripolitan dalam Konteks Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)

Sumber : Badan Pemerintahan Daerah

Dalam rangka pengembangan kawasan agripolitan secara terintegrasi, perlu disusun Master Plan Pengembangan Kawasan Agripolitan yang akan menjadi acuan



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

penyusunan program pengembangan. Adapun muatan yang terkandung didalamnya adalah :

1. Penetapan pusat agripolitan yang berfungsi sebagai (Douglas, 1986) :
  - ✚ Pusat perdagangan dan transportasi pertanian (agricultural trade/transport center).
  - ✚ Penyedia jasa pendukung pertanian (agricultural support services).
  - ✚ Pasar konsumen produk non-pertanian (non agricultural consumers market).
  - ✚ Pusat industri pertanian (agri-based industry).
  - ✚ Penyedia pekerjaan non pertanian (non-agricultural employment).
  - ✚ Pusat agripolitan dan hinterlannya terkait dengan sistem permukiman nasional, propinsi, dan kabupaten (RTRW Propinsi/ Kabupaten).
2. Penetapan unit-unit kawasan pengembangan yang berfungsi sebagai (Douglas, 1986) :
  - ✚ Pusat produksi pertanian (agricultural production).
  - ✚ Intensifikasi pertanian (agricultural intensification).
  - ✚ Pusat pendapatan perdesaan dan permintaan untuk barang-barang dan jasa non pertanian (rural income and demand for non-agricultural goods and services).
  - ✚ Produksi tanaman siap jual dan diversifikasi pertanian (cash crop production and agricultural diversification).
3. Penetapan sektor unggulan :
  - ✚ Merupakan sektor unggulan yang sudah berkembang dan didukung oleh sektor hilirnya.
  - ✚ Kegiatan agribisnis yang banyak melibatkan pelaku dan masyarakat yang paling besar (sesuai dengan kearifan lokal).



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

- ✚ Mempunyai skala ekonomi yang memungkinkan untuk dikembangkan dengan orientasi ekspor.

4. Dukungan sistem infrastruktur

Dukungan infrastruktur yang membentuk struktur ruang yang mendukung pengembangan kawasan agropolitan diantaranya : jaringan jalan, irigasi, sumber-sumber air, dan jaringan utilitas (listrik dan telekomunikasi).

5. Dukungan sistem kelembagaan.

- ✚ Dukungan kelembagaan pengelola pengembangan kawasan agropolitan yang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah dengan fasilitasi Pemerintah Pusat.
- ✚ Pengembangan sistem kelembagaan insentif dan disinsentif pengembangan kawasan agropolitan.

Melalui keterkaitan tersebut, pusat agropolitan dan kawasan produksi pertanian berinteraksi satu sama lain secara menguntungkan. Dengan adanya pola interaksi ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah (value added) produksi kawasan agropolitan sehingga pembangunan perdesaan dapat dipacu dan migrasi desa-kota yang terjadi dapat dikendalikan.

## **2.12 Sistem Dalam Agropolitan**

### **2.12.1 Sistem Agribisnis**

Menurut Soekartawi (2003) konsep agribisnis adalah suatu konsep yang utuh, mulai dari proses produksi, mengolah hasil, pemasaran dan aktivitas lain yang berkaitan dengan kegiatan pertanian. Konsep agribisnis menurut Arsyat (1985) adalah suatu kesatuan kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan hasil dan pemasaran yang ada hubungannya dengan pertanian dalam arti luas. Secara tradisional, pertanian di Indonesia hanya dianggap sebagai kegiatan bercocok tanam saja. Kegiatan pertanian lebih berorientasi kepada peningkatan produksi komoditi primer dan kurang memberi kesempatan untuk



memikirkan perkembangan produk hilir. Dari sisi kebijakan, pembangunan pertanian cenderung terlepas dari pembangunan sektor lain, kebijakan di bidang pertanian tidak selalu diikuti oleh kebijakan pendukung lain secara sinergis. Akhir dasawarsa 1950-an muncul konsep agribisnis yang mencoba melihat pertanian sebagai sebuah sistem yang lebih kompleks.

David dan Goldberg dalam Jiaravanon (2007) mendefinisikan agribisnis sebagai kesatuan kegiatan yang meliputi industri dan distribusi sarana produksi pertanian, kegiatan budidaya tanaman dan ternak, dan penanganan pasca panen (penyimpanan, pemrosesan dan pemasaran komoditi). Dalam masterplan kawasan agripolitan disebutkan bahwa sistem agribisnis merupakan suatu sistem kegiatan usaha dibidang pertanian yang bernuansa dagang (business), yang pelakunya paling tidak terdiri dari (1) sub sistem penyediaan prasarana, sarana dan teknologi usahatani, (2) subsistem produksi usahatani, (3) subsistem pengolahan hasil (agriindustri), (4) subsistem pasar dan (5) subsistem penunjang. Kelima subsistem tersebut tidak dapat saling mengganti tetapi saling tergantung satu sama lain.

### **2.12.2 Sistem Agriindustri**

Dalam masterplan kawasan agripolitan disebutkan bahwa sistem agriindustri pada dasarnya merupakan perpaduan antara dua hal yaitu pertanian dan industri. Keterkaitan antara kedua hal tersebut yang kemudian menjadi sistem pertanian dengan basis industri yang selanjutnya dinamakan agriindustri. Industri yang dikembangkan adalah industri yang terkait dengan pertanian terutama pada sisi penanganan pasca panen.

Sajise dalam Soekartawi (2000), menerangkan bahwa agriindustri adalah fase pertumbuhan setelah pembangunan pertanian tetapi sebelum pembangunan tersebut memulai ke tahapan pembangunan industri. Selain itu, ahli yang lain Soeharjo, Soekartawi dan Badan Agribisnis Departemen Pertanian dalam Soekartawi 2000 menyebutkan bahwa agriindustri adalah pengolahan hasil pertanian dan karena itu



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

agriindustri merupakan bagian dari enam subsistem agribisnis yang disepakati selama ini yaitu subsistem penyediaan sarana produksi dan peralatan, usahatani, pengolahan hasil (agriindustri), pemasaran, sarana dan pembinaan.

### **2.12.3 Sistem Agriwisata**

Dalam pasal 1 ayat 5 Surat Keputusan Bersama Menparpostel dan Menteri Pertanian No. KM. 47PW.004/MPPT/1989 dan No. 204/KPTS/HK050/4/1989 seperti dikutip oleh Rahmawati (2005), tentang koordinasi pengembangan agriwisata mendefinisikan agriwisata sebagai suatu bentuk kegiatan wisata yang memanfaatkan usaha agri sebagai obyek wisata dengan tujuan memperluas pengetahuan, pengalaman, rekreasi dan hubungan usaha di bidang agri. Pengembangan agriwisata di setiap lokasi merupakan pengembangan yang terpadu antara pengembangan masyarakat desa, alam terbuka yang khas, permukiman desa, budaya dan kegiatan pertanian serta sarana pendukung wisata seperti transportasi, akomodasi dan komunikasi. Dalam hubungannya dengan pembangunan wilayah kegiatan pariwisata seringkali menyebabkan kebocoran wilayah yang disebabkan oleh rendahnya kemampuan sektor lain dalam mendukung kebutuhan sektor pariwisata. Untuk itu, usaha yang dilakukan dalam pembangunan wilayah adalah memadukan hubungan sektor pariwisata, sektor pertanian, sektor transportasi dan sektor industri. Sektor pertanian harus mampu berkembang baik sebagai penyedia bahan pangan maupun sebagai alternatif obyek wisata yang bernuansa alam dan sosial budaya yang unik. Dalam hal ini maka sektor pertanian diharapkan dapat menyediakan produk-produk yang berkualitas untuk memenuhi keperluan para wisatawan.

### **2.12.4 Strategi Pembangunan Agripolitan**

Dalam karyanya, Rustiadi dan Hadi (2007) menyebutkan pada prinsipnya strategi pembangunan agripolitan adalah mendorong kegiatan sektor pertanian dan sektor komplemennya di wilayah perdesaan melalui pembangunan agripolitan (kota kecil di lingkungan pertanian) atau mikropolitan (kota menengah-kecil) atau



merupakan pembangunan pusat-pusat pelayanan pada kotakota kecil yang diberikan beberapa perlengkapan infrastruktur fasilitas public perkotaan. Fasilitas publik tersebut antara lain seperti air bersih, tenaga listrik, pusat pasar, pusat hiburan (amenities), lembaga perbankan dan keuangan, sekolah menengah sampai cabang universitas bersama pusat pendidikan dan latihan serta terdapat bangunan-bangunan lain, ruang terbuka dan taman, saluran pembuangan (sewerage) fasilitas tersebut diperlukan guna mendorong dan mendukung dalam mencapai keberhasilan strategi pembangunan pertanian dan ekonomi perdesaan yang dapat menyumbang kepada peningkatan kinerja sistem perekonomian nasional.

### **2.13 Definisi Agriwisata**

Agriwisata merupakan pengembangan wisata yang bertujuan memanfaatkan usaha agri sebagai objek wisata alternatif yang ditawarkan selain produk industri lain yang telah ada. Perkembangan agriwisata tidak terlepas dari peranan wisatawan sebagai pengonsumsi objek agriwisata. Potensi agriwisata mencakup daya tarik objek, ketersediaan fasilitas pendukung, aksesibilitas, kesiapan sumber daya manusianya, serta keragaman kegiatan wisata yang ditawarkan.

Pembinaan dan pengembangan agriwisata adalah segala upaya untuk memperkenalkan, membimbing, menumbuhkan, memperluas dan mengendalikan kegiatan agriwisata yang dilakukan secara terus menerus. Sedangkan tujuan pengembangan agriwisata sebagai unsur diversifikasi pertanian yang mencakup penganeekaragaman hasil pertanian serta perluasan pasar. Pengembangan agriwisata diharapkan dapat memberikan dampak positif yaitu percepatan pembangunan perekonomian pedesaan, dan terhimpunnya kemampuan industri agri dan agriwisata dalam negeri yang makin tangguh, sehingga dapat mengaktualisasikan potensi pasar domestik maupun pasar ekspor.

Pertanian skala kecil dengan produk yang beragam (diversifikasi produk) merupakan tempat yang ideal bagi kegiatan agriwisata yang menghibur (agri-



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

entertainment). Dalam hal ini pertanian skala kecil dapat menghasilkan cara kegiatan bertani yang lebih sederhana sehingga dapat memenuhi kebutuhan, keinginan dan pengharapan wisatawan dalam berekreasi. Terdapat tiga komponen utama yang berperan dalam pengembangan kegiatan agrowisata, yaitu (Entertainment Farming and Agri-Tourism, Business Management Guide, 2004):

- Adanya sesuatu yang dapat dilihat oleh wisatawan (what to see), misalnya saja kegiatan edukasional seperti wisata pendidikan bagi anak sekolah, adanya museum yang memuat alat dan produk kegiatan agri; festival dan event berkala lainnya (festival panen/serentaun, festival makanan, festival bunga); pameran hasil-hasil pertanian; serta keberadaan desa/kampung wisata.
- Adanya sesuatu untuk dikerjakan berupa aktivitas yang dilakukan oleh wisatawan (what to do), meliputi kegiatan workshop (teknik menata bunga/floral arrangements, melukis, teknik membuat pupuk dan kompos, teknik kegiatan bercocok tanam, teknik memancing); kegiatan alam/nature based activities (birdwatching, wildlife viewing); olahraga (canoeing/boating, memancing, berkuda, hiking, sepeda gunung); aktivitas pertanian (memberi makan binatang, farm/ranch work experience); rekreasi (berkemah, piknik, naik delman/andong); u-pick operation.
- Adanya sesuatu untuk dijual (what to sell), meliputi penjualan cenderamata/souvenir, katering (makanan dan minuman), serta berbagai produk pertanian (misalnya menjual pupuk atau bibit pertanian).

Tingkat kesuksesan dan keberhasilan dari pengembangan suatu kawasan agrowisata adalah seberapa jauh suatu pengusaha dapat mengolah relasi atau hubungan dari ketiga komponen utama tadi yang diungkapkan ke dalam sebuah tema tertentu.



### **2.13.1 Pengembangan Agriwisata**

Tujuan pengembangan agriwisata secara umum adalah “Meningkatkan penerimaan devisa negara dari sektor ekspor non migas, menciptakan kesempatan berusaha dan kerja, melalui pemanfaatan yang optimal dari potensi agriwisata sebagai objek kunjungan wisatawan”.

Adapun tujuan khususnya adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para wisatawan untuk berkunjung ke objek agriwisata.
2. Menciptakan iklim berusaha yang baik kepada para pengusaha/pemilik di bidang agri dan pariwisata di dalam penyelenggaraan dan pelayanan agriwisata.
3. Menciptakan pola pemasaran terpadu agriwisata.
4. Mengamankan dan melestarikan keberadaan dan citra produk pertanian sebagai salahsatu diversifikasi produk wisata Indonesia.

Pengembangan agriwisata berdasarkan pada 2 azas yaitu :

1. Azas Manfaat, dalam arti bahwa penyelenggaraan program agriwisata diarahkan agar dapat memberikan manfaat dan dampak positif bagi politik, ekonomi, sosial, budayamaupun lingkungan.
2. Azas Pelestarian, dalam arti bahwa penyelenggaraan program agriwisata diarahkan agar dapat berperan dalam peningkatan pelestarian plasma nutfah sebagai sumber dayautama bagi kelestarian alam dan lingkungan.

Penggunaan kedua azas ini dimaksudkan untuk dapat lebih menjamin program agriwisatabermanfaat bagi perkembangan dan pertumbuhan di bidang pertanian dan pariwisata di satu segi dan dilain segi kelestarian dan pengamanan produk pertanian tetap terjaga. Agar penyelenggaraan program agriwisata ini dapat bermanfaat, maka yang perlu diperhatikan adalah :

- Memberi nilai tambah bagi pengelola/pemilik usaha agri, jasa pelayanan akomodasimakanan/minuman dan lain-lain di kawasan usaha agri;





**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

- Kunjungan wisatawan ke lokasi usaha agri diharapkan merupakan promosi langsung untuk produk yang dihasilkan dalam rangka meningkatkan pemasaran produk baik di dalam negeri maupun ke luar negeri;
- Meningkatkan rasa cinta kepada alam dan kesadaran pengunjung akan besar dan beraneka ragamnya potensi agri yang dimiliki oleh negara kita, sehingga penyelenggaraan agriwisata terutama untuk generasi muda akan menambah pengetahuan mereka di bidang agri;
- Penduduk sekitar lokasi usaha agri tergerak untuk berpartisipasi dan penyediaan jasa pelayanan serta barang-barang hasil kerajinan setempat untuk dijadikan cenderamata bagi agriwisata;
- Membuka pandangan generasi muda bahwa usaha agri yang lokasinya di perdesaan dapat memberikan kehidupan yang tidak kalah baiknya dengan kehidupan di kota.

### **2.13.2 Ruang Lingkup dan Potensi Agriwisata**

Ruang lingkup dan potensi agriwisata terdiri dari potensi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan sebagai berikut :

Daya tarik tanaman pangan sebagai sumber daya wisata antara lain sebagai berikut :

- Tanaman pangan: tanaman padi dan barisan petak-petak sawah (terasering), proses budidaya padi, termasuk membajak sawah.
- Bunga-bunga : bunga yang mempunyai kekhasan sebagai bunga Indonesia; cara-cara tradisional pemeliharaan; bunga yang dikaitkan dengan seni/keindahan antara lain senimerangkai bunga, pameran bunga, taman bunga dan sebagainya; budi daya bunga yang terdapat di nursery dan taman bunga.
- Buah-buahan : kebun buah-buahan pada umumnya di desa atau di pegunungan dan mempunyai pemandangan alam di sekitarnya yang indah; memperkenalkan kota-kota di Indonesia berdasarkan daerah asal buah



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

tersebut; cara-cara tradisional pemetikan buah;tingkat pengelolaan buah di pabrik, dan sebagainya; budidaya buah-buahan seperti apel,anggur, jeruk dan lain-lain, baik di kebun buah, taman buah ataupun dalam tambulapot(tanaman buah dalam pot), sentra produksi buah.

- Sayuran; kebun sayuran pada umumnya di desa atau di pegunungan dan mempunyaipemandangan alam di sekitarnya yang indah; cara-cara tradisional pemeliharaan danpemetikan sayuran; tingkat teknik pengelolaan, dan sebagainya; budidaya sayuran danlain-lain.
- Jamu-jamuan: pemeliharaan dan pengadaan bahan; pengolahan bahan (tradisional danmodern); demonstrasi; berbagai khasiat dari jamu-jamuan; jamu sebagai kosmetiktradisional dan modern.

Ruang lingkup kegiatan subsektor tanaman pangan adalah sebagai berikut :

- Lingkup komoditas yang ditangani meliputi komoditas tanaman padi, palawija dan komoditas tanaman hortikultura;
- Lingkup kegiatan yang ditangani meliputi kegiatan : usaha tani tanaman pangan (padi, palawija, dan hortikultura) yang terdiri dari berbagai proses kegiatan pra panen, pascapanen/pengolahan hasil sampai kegiatan pemasarannya.

Daya tarik wisata yang dapat dikembangkan dalam lingkup tanaman pangan tersebut dapat dipilih secara spesifik yang dapat dikombinasikan dengan daya tarik wisata lainnya pada lokasi yang sama.



## **1. Perkebunan**

Tanaman perkebunan merupakan tanaman tahunan yang memiliki karakteristik tertentu dan teknik budidaya yang tertentu pula. Daya tarik perkebunan sebagai sumber daya wisata antara lain sebagai berikut :

- Daya tarik historis bagi wisata alam;
- Lokasi perkebunan, pada umumnya terletak di daerah pegunungan dan banyak mempunyai pemandangan alam dan berhawa segar;
- Cara-cara tradisional dalam pola bertanam, pemeliharaan, pengelolaan dan prosesnya;
- Tingkat teknik pengelolaan yang ada, dan sebagainya.

Ruang lingkup bidang usaha perkebunan meliputi perkebunan tanaman keras dan tanaman lainnya yang dilakukan oleh perkebunan besar swasta nasional ataupun asing atau BUMN serta perkebunan rakyat. Berbagai kegiatan objek wisata perkebunan dapat berupa pra produksi (pembibitan), produksi dan pasca produksi (pengolahan dan pemasaran).

## **2. Peternakan**

Daya tarik peternakan sebagai sumber daya wisata antara lain sebagai berikut:

- Pola peternakan yang ada;
- Cara-cara tradisional dalam peternakan;
- Tingkat teknik pengelolaan dan sebagainya;
- Budidaya hewan ternak dan lain-lain.

Ruang lingkup objek wisata peternakan :

- a. Pra produksi; yaitu pembibitan ternak, pabrik pakan ternak, pabrik obat-obatan dan lain-lain;
- b. Kegiatan produksi; yaitu usaha peternakan unggas, ternak perah, ternak potongan dan aneka ternak, dengan pola PIR,



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

pola bapak angkat, perusahaan swasta, koperasi, BUMN dan usaha perorangan;

- c. Pasca produksi; yaitu pasca panen susu, daging, telur, kulit dan lain-lain;
- d. Kegiatan lain; yaitu penggemukan ternak (fattening).

### **3. Perikanan**

Daya tarik perikanan sebagai sumber daya wisata antara lain sebagai berikut:

- a. Adanya pola perikanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
- b. Cara-cara tradisional dalam perikanan;
- c. Tingkat teknik pengelolaan dan sebagainya;
- d. Budidaya perikanan dan pengolahannya, baik di pantai, danau, ataupun waduk. Ruang lingkup kegiatan perikanan di Indonesia terdiri dari :
  - Kegiatan penangkapan ikan, yang merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil perikanan melalui usaha/upaya penangkapan pada suatu kawasan perairan tertentu di laut atau perairan umum (danau, sungai, rawa, waduk atau genangan air lainnya).
  - Kegiatan penangkapan ikan ini ditunjang oleh penyediaan prasarana di darat berupa pusat pendaratan ikan dan pelabuhan perikanan.
  - Kegiatan perikanan budidaya, yang merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil perikanan melalui usaha/upaya budi daya perikanan yaitu mencakup usaha pembenihan dan pembesaran.

Kegiatan perikanan budidaya ini terbagi menjadi :



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

- Kegiatan budidaya air tawar (yaitu usaha budidaya perikanan yang dilakukan di perairan tawar, baik di kolam maupun di perairan umum).
- Kegiatan air payau (yaitu usaha budidaya perikanan yang dilakukan di perairan payau atau kawasan pasang surut dan biasa dikenal dengan tambak).Kegiatan budidaya laut (yaitu usaha budidaya perikanan yang dilakukan di perairan laut, termasuk ikan, kerang atau rumput laut).Kegiatan pasca panen, yang merupakan kegiatan penanganan hasil perikanan yang dilakukan pada periode setelah ditangkap dan sebelum dikonsumsi. Kegiatan ini merupakan upaya
- penanganan (handling), pengolahan (processing) dan pemasaran hasil perikanan (marketing).

Sesuai dengan lingkup kegiatan perikanan, maka beberapa diantaranya merupakan sumber daya yang dapat dibina dan dikembangkan menjadi objek agriwisata

Penentuan klasifikasi agriwisata didasari oleh studi tentang konsepsi dan tujuan pengembangan agriwisata, jenis-jenis objek agriwisata beserta daya tarik objek tersebut. Daya tarik agriwisata terdiri dari komoditi usaha agri; sistem sosial ekonomi dan budaya; sistem teknologi dan budi daya usaha agri; peninggalan budaya agri; budaya masyarakat; keadaan alam dan prospek investasi pada usaha agri tersebut. Sedangkan tujuan pengembangan agriwisata adalah memperluas pengetahuan, pemahaman dan pengalaman dalam usaha agri (agriwisata scientific), memperkenalkan nilai dan budaya bangsa (agriwisata budaya), memperluas hubungan usaha dan promosi produk usaha agri (agriwisata bisnis) serta memperkenalkan alam dan memperluas rekreasi di bidang agri (agriwisata rekreasi). Sesuai dengan pengklasifikasian tersebut, agriwisata terdiri dari 4 jenis yaitu:



- **Agriwisata Scientific (Pendidikan Agriwisata)**

Agriwisata scientific merupakan agriwisata dengan motivasi wisatawannya adalah untuk menambah pengetahuan pada bidang agri. Bidang agri yang diminati dapat bersifat khusus maupun bersifat umum. Sesuai dengan hakekat sains tersebut adalah untuk menambah pengetahuan, maka dalam konteks ini adalah menambah pengetahuan yang berkaitan dengan bidang agri. Pengetahuan yang dimaksud dapat berupa pengetahuan yang berhubungan dengan komoditi atau teknologi pada usaha agri (eksakta), maupun pengetahuan dibidang sosial mengenai budaya, ekonomi atau sistem sosial pada masyarakat agri yang menjadi objeknya. Pada wisata ini ada suatu proses mempelajari sesuatu, sehingga aspek yang penting adalah adanya sesuatu yang menarik untuk dipelajari. Wisatawan yang diprediksikan akan menjadi konsumen adalah wisatawan yang mempunyai minat yang besar pada pengetahuan dalam bidang agri dan orang-orang atau lembaga yang mempunyai profesi keilmuan dalam bidang agri. Sarana khusus pada objek wisata ini meliputi sarana-sarana yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan penelitian dalam science tersebut, yang dapat berupa laboratorium, tempat penelitian, atau dalam perkebunan adanya kebun untuk melakukan penelitian, sarana-sarana literatur yang berkaitan dengan objek yang diteliti dan adanya tenaga ahli yang berkaitan dengan objek tersebut.

- **Agriwisata Bisnis**

Agri wisata ini adalah kegiatan wisata yang dilakukan secara bersama-sama dengan kegiatan bisnis dalam bidang agri. Secara umum wisata ini dilakukan dengan motivasi utama untuk melakukan kegiatan bisnis. Namun dalam kegiatan bisnis yang diikutinya, ia juga mendapatkan kepuasan akan kebutuhan wisatanya. Bentuk agriwisata bisnis dapat dikategorikan dalam tiga bentuk, yaitu agriwisata dengan penekanan pada produk yang dapat dibisniskan, wisata usaha agri yang layak bisnis (investasi), dan kombinasi



dari keduanya. Dalam agriwisata dengan penekanan pada produk usaha agri yang layak bisnis faktor yang paling penting adalah adanya usaha agri yang mempunyai prospek bisnis yang baik dan terbuka bagi investor. Objek wisata yang dapat dikategorikan dalam jenis wisata ini sangat beragam sesuai dengan banyaknya usaha agri yang dapat dimasukkan dalam usaha agri dengan komoditas ekspor atau usaha agri yang terbuka bagi penanaman modal. Yang terpenting untuk objek agriwisata bisnis yang dapat dikembangkan adalah adanya komoditi yang layak untuk dibisniskan, atau adanya peluang untuk investasi dalam bidang usaha yang berkaitan dengan usaha agri objek wisata tersebut. Wisatawan yang menjadi konsumen dalam wisata ini meliputi orang-orang yang bergerak dalam bisnis komoditi agri atau orang-orang yang mempunyai minat dalam investasi dalam bidang usaha agri. Sarana khusus yang diperlukan adalah sistem informasi yang berisi informasi-informasi yang dibutuhkan misalnya tempat pameran/promosi bisnis dan adanya fasilitas lobbying.

- **Agriwisata Budaya**

Agriwisata budaya ditandai dengan motivasi perjalanan seorang wisatawan untuk memperkaya informasi dan menambah pengetahuan tentang budaya/kehidupan masyarakat pertanian yang alami/tradisional, di samping untuk mendapat kepuasan dari kebudayaan suatu bangsa, seperti tari-tari tradisional, dan budaya lainnya. Hal yang penting adalah adanya kekhasan suatu budaya agri, karena pada dasarnya wisatawan mencari budaya yang khas yang berbeda dengan tempatnya berasal. Wisatawan yang menjadi konsumen wisata ini adalah mereka yang mempunyai minat besar dalam budaya masyarakat pertanian khususnya atau dapat juga budaya keseluruhan. Berdasarkan pengklasifikasian di atas, suatu daya tarik agriwisata dapat termasuk dalam lebih dari satu jenis. Suatu daya tarik agriwisata dapat



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

termasuk dalam agriwisata scientific, bisnis sekaligus rekreasi (misalnya kebun teh).

Wisata Pendidikan merupakan suatu program yang menggabungkan unsur kegiatan wisata dengan muatan pendidikan didalamnya. Edu-Tourism atau Pariwisata Pendidikan dimaksudkan sebagai suatu program dimana peserta kegiatan wisata melakukan perjalanan wisata pada suatu tempat atau destinasi tertentu dalam suatu kelompok dengan tujuan utama mendapatkan pengalaman belajar secara langsung terkait dengan lokasi yang dikunjungi (Rodger, 1998 - Hal 28)

Program ini dikemas sedemikian rupa menjadikan kegiatan wisata reguler atau kegiatan ekstrakurikuler memiliki kualitas dan berbobot. Materi-materi dalam pemanduan telah disesuaikan dengan bobot siswa dan kurikulum pendidikan. Setiap kali mengunjungi obyek wisata akan disesuaikan dengan ketertarikan obyek dan bidang ilmu yang akan dipelajari berbasis kurikulum.

Pendidikan Untuk Pembangunan Berkelanjutan (Education for Sustainable Development)“Tujuan Education for Sustainable Development adalah untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip, nilai, dan praktek pembangunan berkelanjutan ke dalam semua aspek pendidikan dan pemberdayaan. Upaya ini diharapkan akan mendorong terjadinya perubahan sikap dan perilaku yang dapat menciptakan masa depan yang berkelanjutan dalam konteks integritas lingkungan, pembangunan ekonomi, komunitas yang adil bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.”(UNESCO, 2011, pp. 1-2)

Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (Education for Sustainable Development) merupakan konsep dinamis yang mencakup sebuah visi baru pendidikan yang mengusahakan pemberdayaan orang segala usia untuk turut bertanggungjawab dalam menciptakan sebuah masa depan berkelanjutan. ESD merupakan upaya untuk mengubah perilaku dan gaya hidup bagi transformasi





**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

masyarakat yang positif. Nilai-nilai yang perlu dikembangkan dalam pembangunan berkelanjutan melalui pendidikan untuk mengubah perilaku dan gaya hidup bagi transformasi masyarakat yang positif adalah sebagai berikut.

- a. Menghargai nilai-nilai dan hak-hak semua manusia diseluruh planet bumi dan komitmen terhadap keadilan sosial dan ekonomi bagi semua.
- b. Menghargai hak-hak azasi manusia generasi mendatang dan komitmen terhadap tanggungjawab antar-generasi.
- c. Menghargai dan peduli pada kehidupan komunitas dengan keanekaragamannya yang mencakup perlindungan dan perbaikan terhadap ekosistem planet bumi.
- d. Menghargai keanekaragaman budaya dan komitmen untuk membangun toleransi budaya lokal dan global, perdamaian dan anti kekerasan (non-violence).

Pembangunan berkelanjutan memiliki tiga perspektif, komponen dan aspek penting, yakni sosial-budaya, lingkungan, dan ekonomi.

- a. Perspektif Sosial-Budaya, merupakan sebuah pemahaman terhadap institusi sosial dan peran manusia dalam perubahan dan pembangunan. Sama halnya dengan sistem demokrasi dan partisipasi yang memberikan peluang untuk mengemukakan pendapat, memilih pemerintahan, mengembangkan kesepakatan dan menyadari adanya perbedaan.
- b. Perspektif Lingkungan, merupakan suatu kesadaran terhadap sumber-sumber daya alam,
- c. lingkungan hidup fisik yang sensitif, dampak aktifitas manusia, dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan komitmen untuk menciptakan kebijakan pembangunan sosial dan ekonomi.



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

- d. Perspektif Ekonomi, merupakan kepekaan terhadap keterbatasan dan potensi pertumbuhan ekonomi serta dampaknya terhadap masyarakat maupun lingkungan, dikaitkandengan komitmen untuk mengevaluasi tingkat konsumsi individu dan masyarakat sebagai bentukkeprihatinan terhadap lingkungan serta keadilan sosial. Ketiga perspektif tersebut saling terkait dan merupakan pilar pendorong bagi pembangunan berkelanjutan.

Ini berarti dalammelakukan pembangunan berkelanjutan tidak bisa mempertimbangkan satu aspek saja, seperti aspek ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek lainnya seperti aspek sosial-budaya dan lingkungan.Program Wisata Pendidikan yang dikembangkan merupakan bagian integral (tak terpisahkan) dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sistem Pendidikan Nasional maupun Muatan Lokal (mulok) sehingga menjadi suatu kebutuhan dan wahana bagi sekolah untuk membina dan mendidik para siswa. Selain program pembelajaran di dalam kelas, Program wisata Pendidikan telah terbukti efektif untuk meningkatkan pola pembelajaran dan sosialisasi para siswa melalui pendekatan pembelajaran aktif dan pengalaman langsung (experiential learning).

Program Wisata Pendidikan juga harus didukung oleh tenaga ahli, seniman, budayawan serta para kalangan akademisi perguruan tinggi dalam menyampaikan materi dilapangan. Sehingga program ini betul-betul disusun untuk memenuhi kegiatan wisata sekolah dengan berkualitas dan sesuai perkembangan kebutuhan dan masalah global. Program wisata pendidikan dikembangkan sebagai proses pembelajaran siswa tentang cinta bangsa, negara dan tanah air ataupun pembelajaran langsung mengenai praktek-praktek terbaik yang secara langsung dapat dilihat dan dipelajari.

Idealnya wisata pendidikan didesain khusus untuk memenuhi kapasitas ilmu pengetahuan para pelajar untuk mengisi wawasan kebangsaan dan kompetensi global melalui kegiatan perjalanan, mengenal wilayah dan



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

potensi sumber daya lokal antarkabupaten, provinsi serta antarpulau di Indonesia. Kegiatan perjalanan dalam tur wisata pelajar akan berdampak luas bagi pengembangan ekonomi di daerah karena dapat mendukung pergerakan ekonomi rakyat sekaligus membuka kantong-kantong seni dan budaya yang perlu diketahui pelajar. Sangat diharapkan kegiatan wisata pendidikan dapat menjadi sarana pelajar untuk melestarikan budaya dan mengenalkan nilai luhur sejarah dan budaya bangsa Indonesia. Prospek wisata pendidikan berbasis pelajar sekolah di Indonesia diprediksikan makin cerah. Jika jumlah pelajar di tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) di Indonesiasebanyak 39,2 juta orang seperti yang dicatat Badan Pusat Statistik (BPS), bisa dibayangkan besarnya potensi wisata pendidikan di Indonesia. Dengan pergerakan pelajar sebanyak itu ke berbagai daerah di Indonesia, bisa dibayangkan nilai rupiah yang bisa berputar karena dibelanjakan oleh mereka saat berwisata di objek wisata di jenis wisata ini.

Konsep wisata pendidikan sengaja didisain khusus untuk memenuhi kapasitas ilmu pengetahuan para pelajar. Dengan demikian mereka akan mampu mengisi wawasan kebangsaan dengan kegiatan perjalanan wisata mengenal wilayah dan potensi sumber daya lokal antar-daerah, kabupaten, provinsi serta antar-pulau di seluruh negeri ini.

Kegiatan perjalanan wisata pelajar akan menjadi pergerakan ekonomi rakyat, sekaligus membuka kantong seni dan budaya yang perlu diketahui dan dipahami oleh para pelajar. Karena itu, wisata pelajar diharapkan menjadi sarana pelajar untuk ikut melestarikan budaya dan mengenal nilai luhur sejarah dan budaya bangsa Indonesia.

Dari kegiatan tersebut diharapkan banyak bermunculan ragam obyek wisata yang bisa dimanfaatkan oleh penjual jasa pariwisata, sehingga dapat mendukung terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat kalangan bawah. Dengan demikian objek wisata pendidikan, seni dan budaya yang dikunjungi



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

pelajar dapat memberikan lapangan kerja bagi warga setempat, sehingga ketika objek wisata tersebut berkembang dapat dipetik manfaatnya oleh pemerintah dan masyarakat daerah itu. Melalui promosi, program Wisata Pendidikan Cinta Indonesia yang dikhususkan untuk pelajar sekolah, dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena diprediksikan kegiatan ini mampu mengentaskan warga sekitar objek wisata menuju kehidupan yang lebih baik. Dengan menggerakkan arus pelajar sekolah untuk mengikuti program wisata pendidikan dengan mewajibkan pelajar mengikuti studi banding ke berbagai daerah, akan memberikan angin segar bagi pembangunan pariwisata nasional.

**Program Pariwisata Pendidikan dapat berupa:**

- Permainan Tradisional dengan Pengembangan Kurikulum Pendidikan
- Ekowisata
- Wisata Warisan Budaya (Heritage Tourism)
- Wisata Pedesaan/Pertanian (Rural Tourism)
- Wisata Komunitas (Community Tourism)
- Demoplot tentang Praktek-praktek Terbaik mengenai Pertanian, Perikanan, Peternakan.

Kampanye Hijau (Green Campaign) dalam Kaitan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim, Energi Terbarukan dan Efisiensi Sumber Daya (Resource Efficiency) Pendidikan Seni dan Kebudayaan Lokal Inisiatif-inisiatif serta kumpulan inovasi yang brilliant.

**Segmentasi Pariwisata Pendidikan / Edutourism**

- Fokus pada kegiatan wisata (tourism first) yang merupakan program wisata untuk siswa dan masyarakat dimana sejumlah bentuk kegiatan belajar menjadi bagian penting dalam kegiatan wisata.



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

- Fokus pada pendidikan (education first) yang merupakan program dimana kegiatan Pendidikan menjadi tujuan utama

**Segmentasi Berdasar Objek Wisata:**

- Segmentasi demographic and sosial-ekonomi
- Segmentasi geografi
- Segmentasi psikografi

**Unsur-unsur Dalam Pengelolaan Wisata Pendidikan, meliputi :**

- Demografi wisata pendidikan, motivasi, persepsi dan menghasilkan perilaku perjalanan.
- Pribadi dampak wisata pendidikan yang dihasilkan dari pengalaman.
- Keterkaitan faktor dalam atau di antara kelompok-kelompok yang terlibat.
- Pengelolaan dan pemasaran pariwisata untuk pendidikan;
- Sumber daya untuk pendidikan pariwisata;
- Tujuan dan dampak yang berkaitan dengan pariwisata pendidikan;
- Keterkaitan faktor dalam atau di antara kelompok-kelompok.

**Aspek Pendukung :**

- Transportasi seperti akses menuju destinasi, transportasi bus dan moda sebagai bagian dari sebuah perjalanan independen atau paket, termasuk perjalanan ke dan dari titik departure-arrival.
- Layanan Restoran, termasuk catering, rekreasi, hiburan, kegiatan sosial dan pilihan akomodasi.
- Perjalanan layanan, termasuk agen perjalanan, perusahaan

**2.14.~ Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Ohkawa (1983), suatu fase pertumbuhan adalah suatu segmen waktu tertentu yang lain dari yang lain dalam pertumbuhan jangka panjang, yang ciri-ciri



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

uniknya dapat ditunjukkan dengan indikator-indikator tertentu. Definisi pertumbuhan ekonomi (economic growth) suatu negara menurut Prof. Simon Kuznets dalam Solihin (2005) adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada.

Menurut Solihin (2005), terdapat tiga faktor utama pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia, pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja, serta kemajuan teknologi. Berdasarkan informasi yang didapat dari [id.wikipedia.org](http://id.wikipedia.org), keberhasilan pertumbuhan ekonomi lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan.



## **Kondisi Umum Wilayah**

---

### **3.1 Kondisi Geografis & Administratif**

#### **3.1.1 Kondisi Geografis & Administratif Kota Pontianak**

Secara astronomis, Kota Pontianak terletak antara 0° 02' 24" Lintang Utara dan 0° 05' 37" Lintang Selatan dan antara 109° 16' 25" Bujur Timur sampai dengan 109° 23' 01" Bujur Timur. Berdasarkan letak geografis yang spesifik ini, Kota Pontianak berada tepat dilalui oleh garis khatulistiwa, sehingga menjadikan Kota Pontianak sebagai salah satu daerah tropik dengan suhu udara cukup tinggi serta diiringi kelembaban yang tinggi. Bagian Kedua, Asas, Tujuan, dan Fungsi.

Wilayah Kota Pontianak secara keseluruhan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya, yaitu:

- Bagian Utara: Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah
- Bagian Selatan: Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya
- Bagian Barat: Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya
- Bagian Timur: Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya

Kota Pontianak merupakan ibukota Propinsi Kalimantan Barat. Luas wilayah Kota Pontianak mencapai 107,82 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 6 kecamatan dan 29 kelurahan. Kota Pontianak dilalui oleh garis khatulistiwa, yaitu terletak pada 0° 02' 24" Lintang Utara sampai dengan 0° 05' 37" Lintang Selatan, dan 109° 16' 25" Bujur Timur sampai dengan 109° 23' 01" Bujur Timur.



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Ketinggian Kota Pontianak berkisar antara 0,10 sampai 1,50 meter di atas permukaan laut (mdpl). Kecamatan di Kota Pontianak yang mempunyai wilayah terluas adalah Kecamatan Pontianak Utara (34,52 persen), diikuti oleh Kecamatan Pontianak Barat (15,25 persen), Kecamatan Pontianak Kota (14,39 persen), Kecamatan Pontianak Tenggara (13,75 persen), Kecamatan Pontianak Selatan (13,49 persen) dan Kecamatan Pontianak Timur (8,14 persen).

Di dalam wilayah Kota Pontianak banyak terdapat sungai dan parit yang keseluruhannya berjumlah 61 sungai/parit. Sungai/parit tersebut dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk keperluan sehari-hari dan sebagai penunjang sarana transportasi. Kondisi tanah di Kota Pontianak terdiri dari jenis tanah Organosol, Gley, Humus dan Aluvial yang masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda.

**Tabel 3.1** Luas Wilayah Kota Pontianak Tahun 2016

No	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Presentase
1	Pontianak Selatan	14,54	13,49
2	Pontianak Tenggara	14,83	13,75
3	Pontianak Timur	8,78	8,14
4	Pontianak Barat	16,47	15,28
5	Pontianak Kota	15,98	14,82
6	Pontianak Utara	37,22	34,52
<b>Jumlah</b>		<b>107,82</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Pontianak

### **3.1.2 Kondisi Geografis & Administratif Kecamatan Pontianak Utara**

Kota Pontianak terdiri dari enam 6 kecamatan yaitu Kecamatan Pontianak Selatan, Kecamatan Pontianak Timur, Kecamatan Pontianak Barat, Kecamatan Pontianak Kota, Kecamatan Pontianak Tenggara, dan Kecamatan Pontianak Utara. Berdasarkan arah mata angin yang di lintasi oleh dua buah sungai yaitu Sungai Kapuas dan sungai landak, Kecamatan Pontianak Utara terletak di bagian sebelah utara. Batas-batas wilayah selengkapnya untuk Kecamatan Pontianak Utara adalah:





**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Wajok Hulu  
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Sungai Kapuas  
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Mega Timur dan  
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Wajok Hulu.

Kelurahan yang paling Luas adalah Kelurahan Siantan Tengah yaitu 13,70 Km<sup>2</sup> atau 34,27 persen dari jumlah luas Kecamatan. Kelurahan yang paling Kecil adalah Kelurahan Siantan Hilir yaitu 7,87 Km<sup>2</sup> atau sebesar 19,69 persen dari jumlah luas Kecamatan Pontianak Utara.

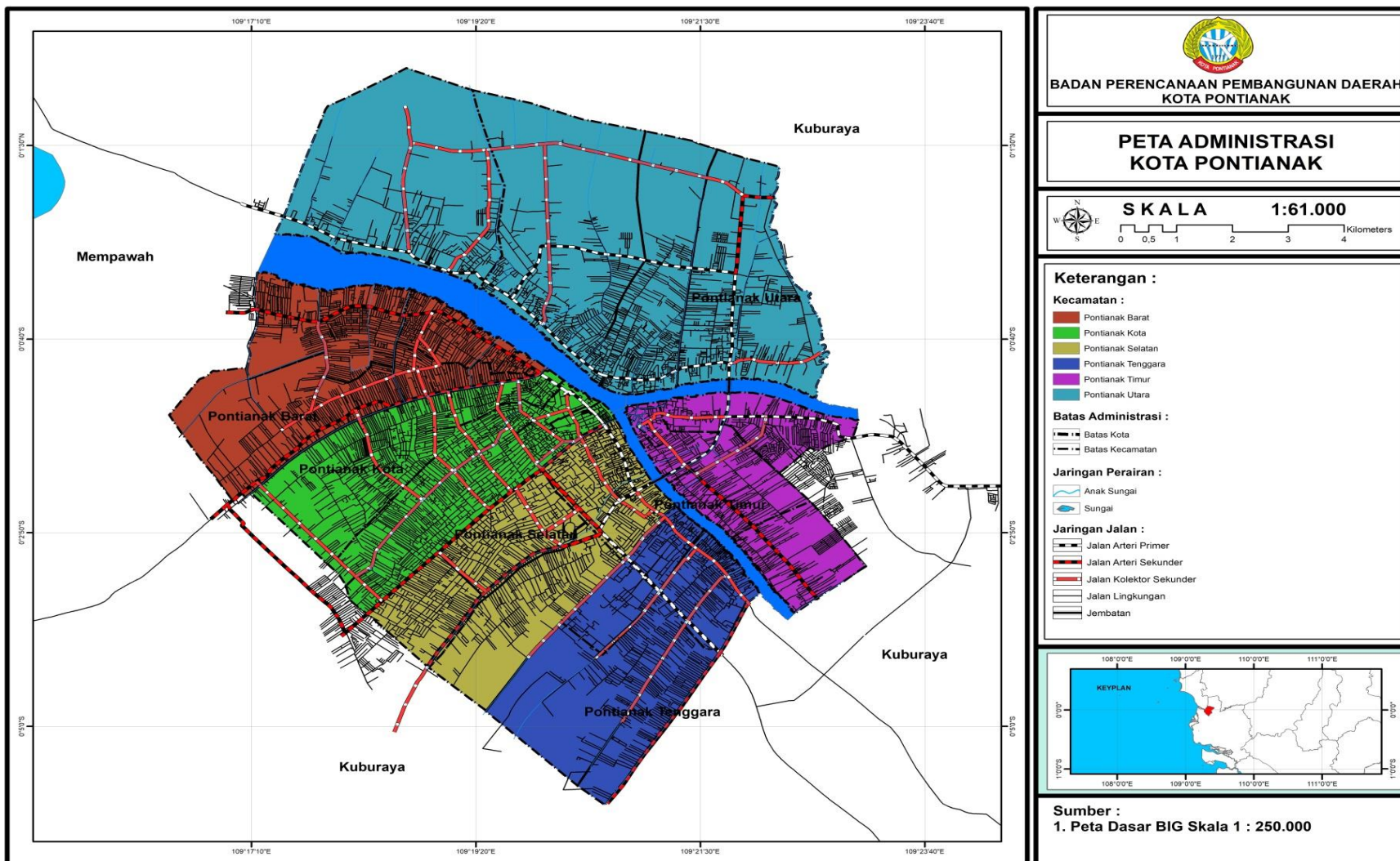
**Tabel 3.2** Luas Wilayah Kecamatan Pontianak Utara Tahun 2016

No	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Presentase
1	Batu Layang	9,20	920
2	Siantan Hilir	7,87	787
3	Siantan Tengah	13,70	1.370
4	Siantan Hulu	9,20	920
<b>Jumlah</b>		<b>39,97</b>	<b>3.997</b>

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Pontianak



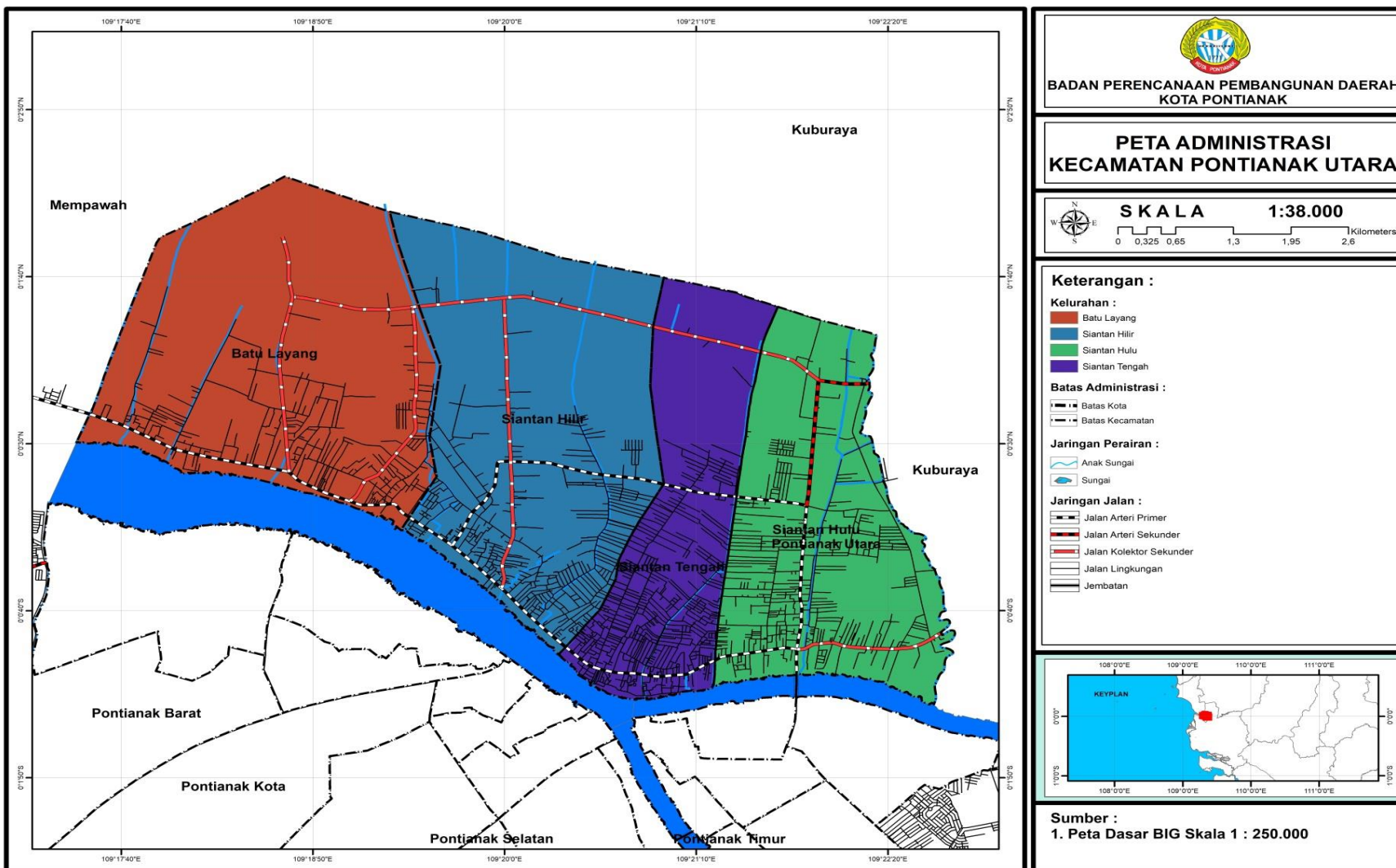
**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**



**Gambar 3.1** Peta Administrasi Kota Pontianak



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

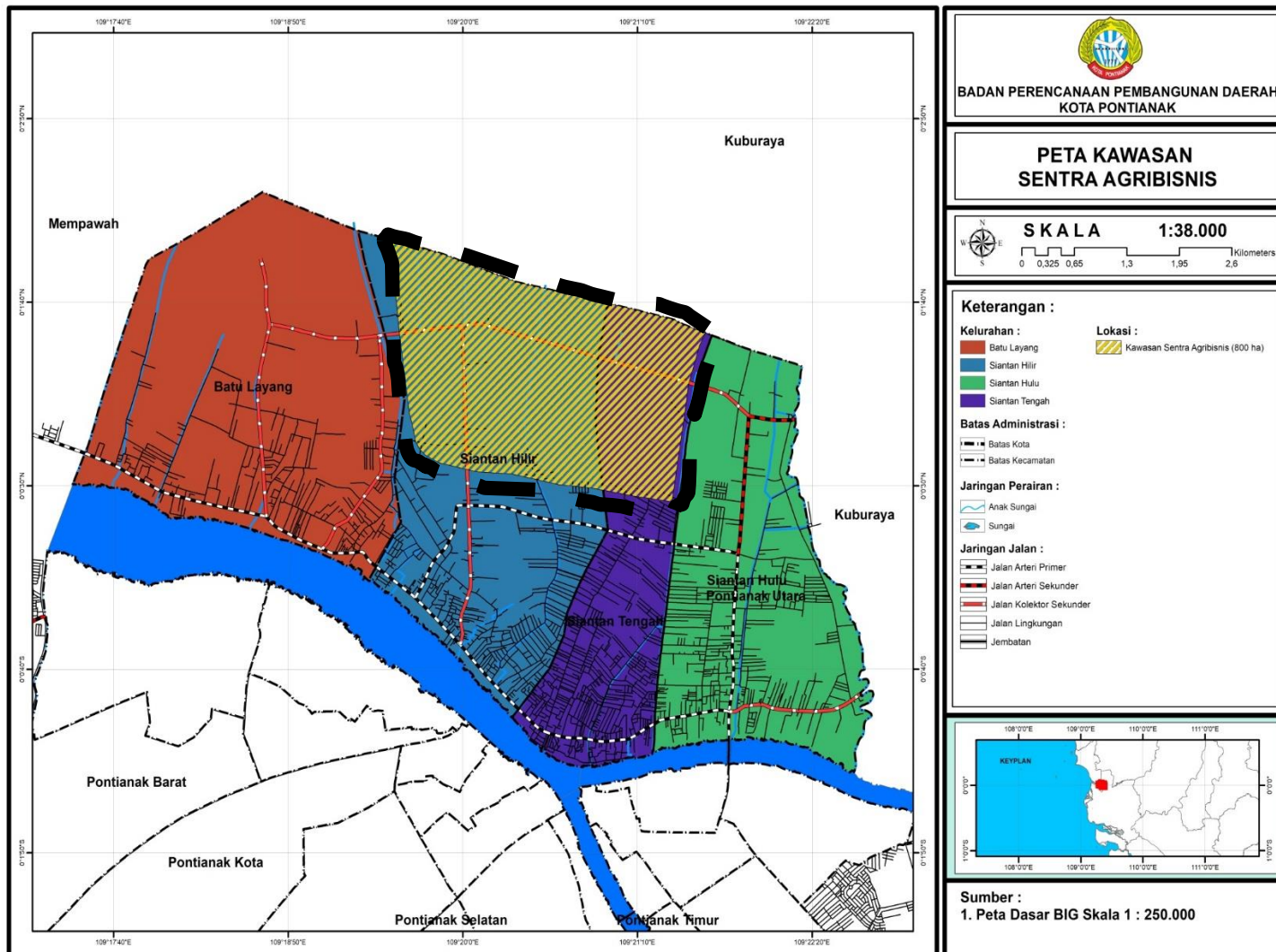


Gambar 3.2 Peta Administrasi Kecamatan Pontianak Utara





**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**



**Gambar 3.3** Peta Kawasan Sentral Agribisnis Kecamatan Pontianak Utara



## **3.2 Jumlah Penduduk**

### **3.2.1 Jumlah Penduduk Kota Pontianak**

Jumlah penduduk Kota Pontianak pada tahun 2016 diperkirakan sebanyak 618.388 jiwa, dimana untuk setiap kilometer persegi wilayahnya rata-rata dihuni oleh 5.736 jiwa. Kecamatan Pontianak Timur merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk terbesar yaitu dihuni oleh 10.459 jiwa per km<sup>2</sup>, sedangkan wilayah kecamatan yang kepadatannya paling kecil adalah Kecamatan Pontianak Utara dengan tingkat kepadatan penduduknya sebesar 3.349 jiwa per km<sup>2</sup>.

Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Pontianak pada periode 1990- 2000 adalah 0,7 persen pertahun, sedangkan untuk periode 2000-2010 meningkat menjadi sebesar 1,8 persen per tahun. Pada tiga tahun terakhir, perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dan perempuan di Kota Pontianak menunjukkan jumlah yang cukup berimbang, hal ini dapat dilihat dari Sex Ratio yang rata-rata bernilai 100, ini berarti terdapat 100 penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan.

**Tabel 3.3** Jumlah Penduduk Kota Pontianak Tahun 2016

Kelurahan	Luas		Penduduk		Kepadatan Penduduk (Orang/km <sup>2</sup> )
	Luas (Km <sup>2</sup> )	%	Jumlah	%	
Pontianak Selatan	15,14	14,04	92.952	15,03	6.139
Pontianak Tenggara	14,22	13,19	50.038	8,09	3.519
Pontianak Timur	8,78	8,14	91.830	14,85	10.459
Pontianak Barat	16,47	15,28	136.805	22,12	8.306
Pontianak Kota	15,98	14,82	122.118	19,75	7.642
Pontianak Utara	37,22	34,52	124.645	20,16	3.349
<b>Jumlah</b>	<b>107,81</b>	<b>100,00</b>	<b>618.388</b>	<b>100,00</b>	<b>5.736</b>

Sumber : BPS Kota Pontianak



### 3.2.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Pontianak Utara

Jumlah Penduduk Kecamatan Pontianak Utara Tahun 2016 sebanyak 123.272 jiwa, Jumlah Penduduk yang paling banyak adalah di kelurahan Siantan Hulu yaitu 40.406 jiwa atau sebesar 32,77 persen dari jumlah penduduk Kecamatan Pontianak Utara. Jumlah penduduk yang paling sedikit di kelurahan Batu layang yaitu 20.743 atau sebesar 16,83 persen dari total jumlah penduduk di Kecamatan Pontianak Utara. Kepadatan penduduk yang paling padat berada di kelurahan siantan Hulu yaitu dengan kepadatan 4.392 jiwa/Km<sup>2</sup>, lebih padat bila di bandingkan dengan Kepadatan penduduk Kecamatan Pontianak Utara yaitu dengan Kepadatan 3.312 Jiwa/Km<sup>2</sup>.

Sex ratio yang paling besar adalah di kelurahan Siantan Tengah yaitu 1,04, sex ratio ini lebih tinggi bila di bandingkan dengan sex ratio tingkat Kecamatan Pontianak Utara yaitu sebesar 1,02. Sex ratio yang rendah adalah di kelurahan siantan Hilir dan Siantan Hulu yaitu 1,01.

**Tabel 3.4** Jumlah Penduduk Kecamatan Pontianak Utara Tahun 2016

Kelurahan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk	Kepadatan (Km <sup>2</sup> )
Batu Layang	6,45	20.743	3.216
Siantan Hilir	7,87	29.443	3.741
Siantan Tengah	13,70	32.680	2.385
Siantan Hulu	9,20	40.406	4.392
<b>Jumlah</b>	<b>37,22</b>	<b>123.272</b>	<b>3.312</b>

Sumber : BPS Kota Pontianak

### 3.3 Keadaan Sosial

#### 3.3.1 Keadaan Sosial Kota Pontianak

##### 3.3.1.1 Keadaan Sosial Pendidikan Kota Pontianak

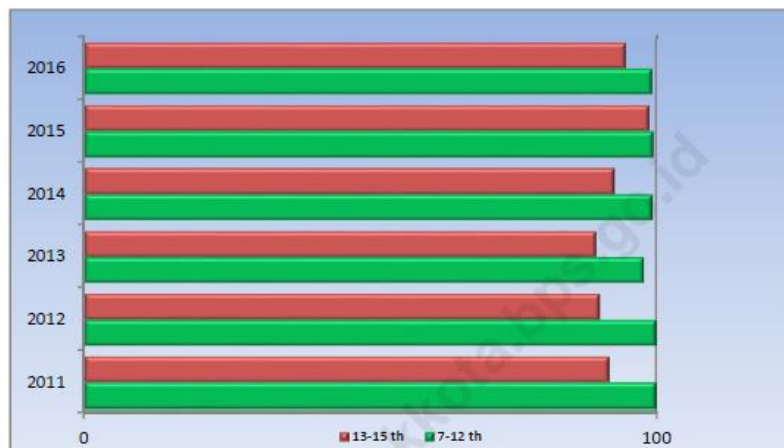
Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan, sehingga pendidikan menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan secara serius baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Beberapa Indikator dalam sub bab ini dapat digunakan untuk mengetahui gambaran umum mengenai keadaan pendidikan di Kota Pontianak.



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Pontianak untuk golongan umur 7-12 tahun selama tiga tahun terakhir ini sudah berkisar pada angka 100 persen, hal ini menandakan bahwa hamper seluruh penduduk usia 7-12 th di Kota Pontianak sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan yang ada sesuai dengan usia pada jenjang pendidikannya. Berbeda dengan kelompok umur 13-15 tahun, APS pada kelompok umur tersebut cukup berfluktuasi pada beberapa tahun terakhir. Namun demikian, partisipasi sekolah anak usia 13-15 tahun terus meningkat dan mendekati angka 100 persen.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kota Pontianak, pada tahun 2016 Kota Pontianak memiliki sebanyak 132 Taman Kanak-Kanak, 192 SD, 74 SMP, 64 SMA, dan 29 SMK. Dilihat dari sisi Rasio Murid Terhadap Guru, Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD) merupakan Jenjang pendidikan yang memiliki nilai rasio tertinggi yaitu 20,75 ini artinya ada sekitar 21 orang murid yang menjadi beban kerja seorang guru SD di Kota Pontianak dalam mengajar.



**Gambar 3.4** Angka Partisipasi Sekolah di Kota Pontianak 2011-2016



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

### 3.3.1.2 Keadaan Sosial Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Pontianak

Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) pada tahun 2016 di kota Pontianak yang tercatat oleh Badan Pemberdayaan masyarakat, Perempuan, Anak dan KB Kota Pontianak adalah sebanyak 96.597 pasangan, dimana pasangan yang menggunakan KB aktif adalah sebanyak 69,54 persen. Dari berbagai macam metode kontrasepsi yang ada, metode suntik KB adalah yang paling banyak digunakan.

**Tabel 3.5** Jumlah Tempat Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2016

<b>Kecamatan</b>	<b>Dokter Umum</b>	<b>Dokter Gigi</b>	<b>Bidan</b>	<b>Perawat</b>	<b>Ahli Gizi</b>	<b>Sarjana Kesehatan Masyarakat</b>
Pontianak Selatan	1	2	16	10	6	2
Pontianak Tenggara	1	2	9	7	3	3
Pontianak Timur	7	1	30	19	12	3
Pontianak Barat	3	3	18	17	7	1
Pontianak Kota	9	5	24	21	9	5
Pontianak Utara	4	3	25	27	9	4
Jumlah	25	16	122	101	46	18

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pontianak

### 3.3.1.3 Keadaan Sosial Lainnya Kota Pontianak

Jumlah sarana peribadatan masing-masing pemeluk agama yang ada di Kota Pontianak pada tahun 2016 adalah sebagai berikut: Masjid 373 , Surau 459, Mushola 118, Gereja Kristen 97, Gereja Katolik 8, Kapel 22, Vihara Budha 44, Cetiya Budha 8 buah, Pura Hindu 4, dan Kelenteng Kong Hu Cu 16 buah.





**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**Tabel 3.6** Jumlah Tempat Peribadatan Kota Pontianak Tahun 2016

<b>Kecamatan</b>	<b>Masjid</b>	<b>Surau</b>	<b>Mushola</b>	<b>Gereja Kristen</b>	<b>Gereja Katolik</b>
Pontianak Selatan	87	83	6	28	2
Pontianak Tenggara	34	58	64	9	1
Pontianak Timur	46	113	0	7	1
Pontianak Barat	60	81	20	8	1
Pontianak Kota	83	29	28	13	2
Pontianak Utara	63	95	0	32	1
Jumlah	373	459	118	97	8

Sumber : Kanor Kementerian Agama Kota Pontianak

### **3.3.2 Keadaan Sosial Kecamatan Pontianak Utara**

#### **3.3.2.1 Keadaan Sosial Pendidikan Kecamatan Pontianak Utara**

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kota Pontianak tahun 2016, Murid Taman Kanak-Kanak Kecamatan Pontianak Utara berjumlah 625 Murid dengan Murid terbanyak berada di Kelurahan Siantan Tengah yaitu 298 Murid atau sebesar 47,68 dan jumlah murid yang paling sedikit di kelurahan Siantan Hulu yaitu 52 Orang atau 8,32 persen. Apabila dilihat perbandingan dengan tahun 2015 maka jumlah murid TK di Kecamatan Pontianak Utara Mengalami peningkatan sebesar 28,87 persen.

Sementara itu, jumlah sekolah SD negeri di Pontianak Utara berjumlah 31 sekolah dengan rasio murid terhadap guru sebesar 18,99 dan SD swasta berjumlah 6 sekolah dengan rasio murid terhadap guru sebesar 19,38. Kemudian, jumlah SMP negeri sebanyak 5 sekolah dengan rasio murid terhadap guru sebesar 15,28 dan SMP swasta sebanyak 10 sekolah dengan rasio murid terhadap guru sebesar 10,98. Sementara itu, jumlah SMA Negeri di Pontianak Utara hanya 1 dan Swasta berjumlah 5 sekolah.



**Tabel 3.7** Jumlah Tempat Pendidikan Kota Pontianak Tahun 2016

Kecamatan	Tk	SD	SMP	SMA	SMK
Batu Layang	7	4	3	2	-
Siantan Hilir	6	11	3	-	3
Siantan Tengah	6	10	5	4	2
Siantan Hulu	25	12	4	-	1
Jumlah	44	37	15	6	6

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pontianak

### **3.4 Keadaan Pertanian**

#### **3.4.1 Keadaan Pertanian Kota Pontianak**

##### **3.4.1.1 Keadaan Pertanian Tanaman Pangan Kota Pontianak**

Data tentang Tanaman Pangan yang disajikan pada sub bab ini meliputi tanaman padi (padi sawah dan padi ladang) dan Palawija (jagung, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar). Selama tahun 2015, luas lahan sawah yang tercatat di Kota Pontianak adalah seluas 215 ha, jumlah ini berkurang sebanyak 5 ha atau sebesar 2 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Untuk luas panen padi sawah selama tahun 2015 adalah seluas 191 ha dengan jumlah produksi padi sebanyak 464 ton. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, luas panen padi sawah ini jumlahnya bertambah sebanyak 18 ha, namun dikarenakan angka produktivitas padi yang menurun yakni hanya sebesar 2,43 ton/ ha, mengakibatkan kenaikan produksi padi yang tidak begitu signifikan, yakni hanya meningkat sebanyak 7 ton atau sebesar 1,53 persen.

Sebagian besar produksi padi sawah di Kota Pontianak berasal dari Kecamatan Pontianak Barat dimana kontribusinya mencapai 47,6 persen, sedangkan Kecamatan Pontianak Selatan merupakan kecamatan dengan kontribusi produksi padi sawah terkecil, yaitu hanya sebesar 2,6 persen. Jenis tanaman palawija yang hasil produksinya paling besar di Kota Pontianak adalah tanaman ubi kayu, dimana pada tahun 2015 produksinya mencapai 1.676 ton, kemudian diikuti oleh Ubi jalar sebanyak 117 ton, dan jagung sebanyak 25 ton.



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**Tabel 3.8** Jumlah Luas Lahan Pertanian Kota Pontianak Tahun 2016

<b>Kecamatan</b>	<b>Tadah Hujan</b>	<b>Lahan Pertanian Bukan Sawah</b>
Pontianak Selatan	3	479
Pontianak Tenggara	7	370
Pontianak Timur	36	404
Pontianak Barat	90	119
Pontianak Kota	10	143
Pontianak Utara	75	2.061
Jumlah	221	3.576

Sumber : Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak

#### **3.4.1.2 Keadaan Pertanian Tanaman Holtikultura Kota Pontianak**

Data tentang Tanaman Holtikultura yang disajikan pada sub bab ini meliputi sayur-sayuran dan buah-buahan. Khusus untuk tanaman sayursayuran, tampak bahwa tanaman kangkung, petsai/sawi dan bayam merupakan komoditi yang dominan di Kota Pontianak, dimana pada tahun 2015 ini produksi masing-masing tanaman tersebut adalah sebesar 11.893 ton, 6.960 ton, dan 4.069 ton. Berdasarkan Tabel 5.2.2, dapat dilihat bahwa Kecamatan Pontianak Utara merupakan kecamatan penghasil sayuran terbesar di Kota Pontianak. Menyajikan tanaman buah-buahan yang ada di Kota Pontianak. Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa tanaman papaya dan nenas menjadi komoditi buah-buahan yang dominan pada tahun 2015 dengan produksi masing-masing sebesar 43.680 ton dan 13.831 ton.



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**Tabel 3.9 Jumlah Luas Lahan Tanaman Holtikultura Kota Pontianak Tahun 2016**

Kecamatan	Bawang Daun		Petai/Sawi		Kacang Panjang		Cabe Rawit		Timun	
	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ku)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ku)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ku)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ku)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ku)
Pontianak Selatan	10	1.200	10	600	2	300	17	1.020	0	0
Pontianak Tenggara	15	1.500	9	540	2	150	12	546	0	0
Pontianak Timur	0	0	0	0	0	0	1	90	0	0
Pontianak Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pontianak Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pontianak Utara	6	720	35	6.300	2	1.189	4	1.345	3	1.310
Kecamatan	Sawo		Belimbing		Duku Langsung		Durian		Jambu Biji	
	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ku)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ku)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ku)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ku)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ku)
Pontianak Selatan	120	189	300	360	150	374	95	172	900	825
Pontianak Tenggara	0	0	60	70	500	963	20	32	40	33
Pontianak Timur	32	53	45	53	0	0	14	11	70	52
Pontianak Barat	7	7	0	0	513	722	728	1.001	0	0
Pontianak Kota	29	31	20	17	220	347	14	20	0	0
Pontianak Utara	466	819	85	101	0	0	1.120	1.120	465	359
Kecamatan	Jeruk Siam/Kepron		Jeruk Besar		Mangga		Nangka		Nanas	
	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ku)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ku)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ku)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ku)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ku)
Pontianak Selatan	0	0	400	1.170	500	690	560	890	10.030	1.028
Pontianak Tenggara	0	0	0	0	140	229	1.200	1.834	4.000	224
Pontianak Timur	0	0	0	0	85	125	562	1.286	0	0
Pontianak Barat	587	663	138	232	233	386	822	575	0	0
Pontianak Kota	0	0	0	0	17	26	416	571	0	0
Pontianak Utara	65	78	42	146	76	153	762	1.643	168.420	9.554



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Kecamatan	Pepaya		Pisang		Rambutan		Salak		Sirsak	
	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ku)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ku)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ku)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ku)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ku)
Pontianak Selatan	0	0	3.800	3.200	1.560	1.731	0	0	300	86
Pontianak Tenggara	0	0	3.200	2.887	650	612	0	0	150	31
Pontianak Timur	0	0	484	443	0	0	240	39	18	14
Pontianak Barat	0	0	6.614	3.867	1.535	2.400	0	0	59	9
Pontianak Kota	0	0	1.094	502	259	305	0	0	27	4
Pontianak Utara	32.950	47.348	1.260	1.126	640	384	0	0	145	81
Kecamatan	Salak		Sirsak		Sukun		Melinjo		Petai	
	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ku)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ku)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ku)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ku)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ku)
Pontianak Selatan	0	0	300	86	35	39	0	0	0	0
Pontianak Tenggara	0	0	150	31	40	60	0	0	0	0
Pontianak Timur	240	39	18	14	0	0	285	152	0	0
Pontianak Barat	0	0	59	9	4	3	209	89	0	0
Pontianak Kota	0	0	27	4	13	8	726	302	0	0
Pontianak Utara	0	0	145	81	105	192	980	550	35	10
Kecamatan	Jaje		Lengkuas		Kencur		Kunyit		Lidah Buaya	
	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ku)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ku)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ku)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ku)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ku)
Pontianak Selatan	4.350	15.225	14.200	49.700	1.1925	4.183	13.000	44.000	0	0
Pontianak Tenggara	7.800	27.900	10.000	35.000	1.600	4.000	10.200	30.600	0	0
Pontianak Timur	600	2.400	125	625	0	0	450	1.450	0	0
Pontianak Barat	225	788	200	700	0	0	120	360	0	0
Pontianak Kota	0	0	1.550	5.425	0	0	110	330	0	0
Pontianak Utara	15.000	30.000	11.500	34.500	5.500	14.640	30.000	90.000	800.000	9.820.160

Sumber : Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak



### 3.4.1.3 Keadaan Perternakan Kota Pontianak

Data yang disajikan pada subbab ini meliputi ternak besar (sapi potong, sapi perah), ternak kecil (kambing dan babi) serta Unggas (ayam kampung, ayam petelur, ayam pedaging, dan itik). Pada tahun 2016, Dinas pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak mencatat bahwa populasi sapi potong mencapai 2.947 ekor, kambing 1.518 ekor, dan babi 142 ekor. Untuk ternak unggas, ayam pedaging merupakan populasi yang terbesar dibandingkan dengan unggas lainnya, yaitu mencapai 4.274.700 ekor, sedangkan ayam kampung dan itik masing-masing sebanyak 17.189 ekor dan 6.499 ekor.

**Tabel 3.10** Jumlah Populasi Perternakan Kota Pontianak Tahun 2016

<b>Kecamatan</b>	<b>Sapi Potong</b>	<b>Kambing</b>	<b>Babi</b>
Pontianak Selatan	224	263	-
Pontianak Tenggara	160	236	-
Pontianak Timur	350	210	-
Pontianak Barat	341	179	-
Pontianak Kota	543	262	-
Pontianak Utara	1.329	368	142
<b>Jumlah</b>	<b>2.947</b>	<b>1.518</b>	<b>142</b>

Sumber : Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak

### 3.4.2 Keadaan Pertanian Kecamatan Pontianak Utara

#### 3.4.2.1 Keadaan Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Kecamatan Pontianak Utara

Pada tahun 2016, luas lahan pertanian sebesar 3.793 Ha dengan sawah tadah hujan seluas 75 Ha dan pertanian bukan sawah seluas 2.061 Ha. Luas lahan pertanian Pontianak Utara mengalami peningkatan sebesar 76,34 persen.

**Tabel 3.11** Jenis Pertanian Kecamatan Pontianak Utara Tahun 2016

<b>Jenis Lahan</b>	<b>Tahun</b>		
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Sawah Tadah Hujan	75	75	75
Lahan Pertanian Bukan Sawah	2.082	2.076	3.718
<b>Jumlah</b>	<b>2.947</b>	<b>1.518</b>	<b>142</b>

Sumber : Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak



### 3.4.2.2 Keadaan Pertanian Tanaman Sayuran Kecamatan Pontianak Utara

Untuk jenis tanaman sayuran, produksi yang paling dominan adalah jenis tanaman ketimun, dimana jumlah produksinya di tahun 2016 adalah 13.310 Kuintal dengan rata-rata produksinya adalah 436,67 Kuintal/Ha. Kemudian, tanaman sayuran berikutnya yang memiliki produksi terbesar adalah Tomat, yakni 7.145 Kuintal dengan rata-rata produksi 3.572,50 kuintal/ Ha.

**Tabel 3.12** Jenis Pertanian Tanaman Sayuran Kecamatan Pontianak Utara Tahun 2016

Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)	Produksi (Kw)	Rata-Rata Produksi (Kw/Ha)
Bawang Daun	6	720	120
Petsai/Sawi	35	6.300	180
Lobak	1	150	150
Kacang Panjang	2	1.189	594,50
Cabe Rawit	4	1.345	336,25
Jamur	30	1.356	45,20
Tomat	2	7.145	3572,50
Terung	1	740	740,00
Ketimun	3	13.310	436,67
Kangkung	36	6.210	172,50
Bayam	34	2.360	69,41
Bawang Merah	3	210	70,00

Sumber : Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak

### 3.4.2.3 Keadaan Pertanian Buah-Buahan Kecamatan Pontianak Utara

Buah-Buahan Produksi buah terbanyak di Pontianak Utara adalah pepaya, dengan produksi 47.348 Kuintal pada tahun 2016. Akan tetapi, rata-rata produksi Pepaya (1,44) ini lebih kecil dibandingkan rata-rata produksi jeruk besar (3,48) yang produksinya hanya sebesar 146 Kuintal.



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**Tabel 3.13** Jenis Pertanian Buah - Buah  
Kecamatan Pontianak Utara Tahun 2016

Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)	Produksi (Kw)	Rata-Rata Produksi (Kw/Ha)
Belimbing	85	101	1,19
Durian	1.120	896	0,80
Jambu Buji	465	359	0,77
Jambu Air	156	150	0,96
Jeruk Siam	65	78	1,20
Jeruk Besar	42	146	3,48
Mangga	76	153	2,01
Nangka	762	1.643	2,16
Nanas	168,420	9.554	0,06
Pepaya	32,950	47.348	1,44
Pisang	1.260	1.126	0,89
Rambutan	640	384	0,60
Sawo	466	819	1,76
Sirsak	145	81	0,56
Sukun	105	192	1,83
Melinjo	980	550	0,56
Petai	35	10	0,29

Sumber : Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak

#### 3.4.2.4 Keadaan Tanaman Obat-Obatan Kecamatan Pontianak Utara

Untuk tanaman obat-obatan, di Pontianak Selatan Lidah Buaya memiliki luas lahan terbesar, yakni sebesar 800.000 M2 dengan produksi tahun 2016 sebesar 90 Ton. Sementara itu, tanaman obat-obatan yang memiliki luas lahan paling kecil adalah temulawak, yakni sebesar 500 M2 dengan produksi hanya sebesar 1 Ton.

**Tabel 3.14** Jenis Tanaman Obat - Obatan  
Kecamatan Pontianak Utara Tahun 2016

Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)	Produksi (Kw)	Rata-Rata Produksi (Kw/Ha)
Jahe	15.000	30.000	2,00
Laos	11.500	34.500	3,00
Kencur	5.500	14.640	2,66
Kunyit	30.000	90.000	3,00
Temulawak	500	1.0000	2,00
Lidah Buaya	800.000	9.820,160	12,28

Sumber : Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak





### **3.4.2.5 Keadaan Ternak dan Unggas Kecamatan Pontianak Utara**

Jumlah ternak di Kecamatan Pontianak Utara tahun 2016 yang terbanyak adalah jenis ternak ayam ras, yakni sebesar 4,2 juta ekor, apabila dibandingkan dengan tahun 2015 jumlah ayam ras ini mengalami kenaikan sebesar 21,34 persen.

**Tabel 3.15** Jenis Ternak dan Unggas  
Kecamatan Pontianak Utara Tahun 2016

<b>Jenis Ternak</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Sapi Potong	1.346	1.301	2.669	1.329
Kambing	756	555	67	368
Babi	200	275	14.163	142
Ayam Ras	70.000	350.000	3.500.419	4.247.400
Ayam Buras	5.400	5.630	3.740	4.354
Itik	4.500	3.300	1.500	1.113

Sumber : Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak

### **3.4.2.6 Keadaan Tanaman Unggulan Lidah Buaya**

Pembangunan pertanian yang berorientasi pada agribisnis dapat diharapkan sebagai sektor unggulan dalam pembangunan wilayah. Agar pembangunan pertanian ini berlangsung efisien dan efektif, maka diperlukan suatu pengembangan kawasan sentra agribisnis sebagai salah satu upaya bagi tercapainya usaha peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat disekitar kawasan.

Agribisnis pada dasarnya mencakup seluruh rantai produksi, pengolahan hasil dan pemasaran, baik yang menunjang hasil pertanian maupun yang ditunjang oleh hasil pertanian. Kegiatan tersebut menjadi tiga sektor besar, yaitu sektor masukan (perbekalan pertanian), sektor produksi dan keluaran. Sektor masukan terdiri atas kegiatan perbekalan pupuk, mesin, peralatan, pestisida, transportasi dan bibit. Sektor produksi terdiri atas kegiatan efisiensi biaya produksi dan penggunaan perbekalan, metode kerja serta penggunaan tenaga kerja. Sektor keluaran terdiri atas kegiatan industri dan penjualan.



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha ada dua yaitu faktor alam (pengaruh alam) dan faktor ekonomi (pengaruh ekonomi). Pengaruh ekonomi sangat ditentukan oleh dua hal yaitu tingkat harga yang berlaku di pasar dan tingkat harga dari sarana pertanian yang diperlukan untuk keperluan produksi.

Tanaman lidah buaya yang mudah tumbuh dengan baik di lahan gambut sekitar khatulistiwa memiliki manfaat dan nilai ekonomi yang cukup tinggi. Penggunaan tanaman lidah buaya dalam industri secara garis besar dapat dibagi menjadi empat jenis industri yaitu:

1. Industri pangan, sebagai makanan tambahan (*food supplement*), produk yang langsung dikonsumsi dan *flavour*.
2. Industri farmasi dan kesehatan, sebagai anti inflasi, anti oksidan, laksatif, anti mikrobial dan molusisidal, anti kanker, imunomodulator dan hepatoprotector. Paten yang telah dilakukan beberapa negara maju antara lain: CART 1000, CARN 750, Polymannoacetate, Aliminase, Alovex dan Carrsyn.
3. Industri kosmetika, sebagai bahan baku lotion, krem, lipstik, shampo dan kondisioner.
4. Industri pertanian, sebagai pupuk, suplemen hidroponik, suplemen untuk media kultur jaringan dan penambah nutrisi pakan ternak.

Penggunaan tanaman lidah buaya yang cukup besar di dalam industri dikarenakan komponen-komponen yang dimilikinya cukup lengkap dan bermanfaat. Komponen tersebut terdapat dalam cairan bening seperti jeli dan cairan yang berwarna kekuningan. Besarnya peluang penggunaan tanaman lidah buaya dalam industri tersebut, sehingga tanaman lidah buaya ditetapkan sebagai produk unggulan Kota Pontianak. Pengolahan Lidah buaya di bidang agriindustri diantaranya dengan membuat aneka makanan dan minuman seperti coklat, manisan, biskuit, kerupuk, stick, selai, teh lidah buaya, serbat, tepung lidah buaya, juice lidah buaya dan nata de aloe vera. Sementara sebagai pencinta tanaman hias, lidah buaya dapat dijadikan



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

tanaman hias maupun pelengkap dari koleksi tanaman hias yang sudah ada. Berdasarkan ragam manfaat tersebut, lidah buaya dapat dijadikan sebagai lahan bisnis yang dapat dikelola, tidak saja dalam skala rumah tangga tetapi juga dalam industri kecil, menengah maupun besar.

Tanaman lidah buaya yang berasal dari Pontianak (*Aloe chinensis*) merupakan varietas yang memiliki keunggulan produksi. Tanaman ini setiap pelepahnya memiliki berat sekitar 0,8 – 1,2 kg dan dapat dipanen dua kali dalam sebulan sejak bulan ke 10 -12 setelah penanaman hingga tahun kelima. Mutu panen setiap pelepah sebagian besar tergolong mutu A yaitu tanpa cacat atau serangan hama penyakit daun.

Saat ini permintaan lidah buaya Pontianak dalam bentuk pelepah segar berasal dari Jakarta. Umumnya pedagang di Jakarta mengirimkan lagi ke Taiwan dan Jepang mengingat dari Kota Pontianak tidak ada jalur pelayaran langsung ke negara-negara tersebut.

Produsen dalam skala industri yang telah mengolah pelepah lidah buaya menjadi makanan adalah PT. Nirmas dengan merk dagang Inaco dan PT. Keong Nusantara Abadi yang menggunakan merk Wong Coco, sedangkan eksportir pelepah segar yang tercatat diantaranya adalah PT. Sumber Aloe Vera. Industri kecil pengolahan lidah buaya di Kota Pontianak sampai dengan tahun 2017 berjumlah 23 industri kecil/rumah tangga.

Pembangunan industri pengolahan lidah buaya merupakan langkah strategis dalam upaya memberikan multiplier effect baik dari aspek ekonomi, peningkatan lapangan pekerjaan, kesejahteraan masyarakat berupa peningkatan PDRB maupun peningkatan PAD dalam upaya percepatan pembangunan. Pembangunan industri pengolahan lidah buaya tersebut memerlukan sarana dan prasarana yang memadai, berkualitas dan berstandar agar produk yang dihasilkan dapat diterima di pasar global.



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Potensi tanaman dan produksi lidah buaya di Kota Pontianak sangat menjanjikan baik dari segi pertumbuhan (ukuran tanaman yang terbaik saat ini) maupun dari segi kandungan gizinya. Luas areal saat ini sekitar 80 hektar dengan produksi sebanyak 9.820 ton. Sedangkan perkembangannya tanaman Lidah Buaya Kota Pontianak Tahun 2007-2016 ditampilkan pada **Tabel 3.16** berikut ini.

**Tabel 3.16.** Perkembangan Luas Areal dan Produksi Lidah Buaya Tahun 2007 -  
2016

Tahun	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)
2007	70	2.458
2008	67	5.530
2009	44	5.284
2010	37	4.546
2011	46	5.652
2012	79	6.359
2013	84	7.879
2014	84	8.294
2015	84	10.072
2016	80	9.820

Sumber : Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak, 2017.

Kota Pontianak berpotensi cukup baik untuk pengembangan budidaya tanaman lidah buaya. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor : 299 tanggal 15 Agustus tahun 2001 tentang Kawasan Sentra Agribisnis Kota Pontianak yaitu:



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

1. Ditetapkan lokasi di kelurahan Siantan Hilir, Siantan Tengah dan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara seluas 800 hektar sebagai kawasan Sentra Agribisnis Kota Pontianak.
2. Kawasan sentra Agribisnis dapat dimanfaatkan untuk kegiatan utama dan penunjang agribisnis di sektor pertanian dalam arti luas, penelitian dan atau kajian potensi sumberdaya lahan serta kegiatan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
3. Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan sentra Agribisnis dibawah koordinasi pemerintah Kota Pontianak
4. Pemanfaatan tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup terutama pada daerah-daerah yang masuk dalam kawasan pelestarian alam.

Dalam rencana pengembangannya, Kawasan Sentra Agribisnis Kota Pontianak dibagi menjadi 7 (tujuh) bagian (Hasil Rekomendasi Pengembangan pada penyusunan RDTR Kawasan Sentra Agribisnis Kota Pontianak Tahun Anggaran 2002 dan Penyusunan RPJM Kawasan Sentra Agribisnis kota Pontianak tahun Anggaran 2003) yang diantaranya merekomendasikan kawasan Tanaman Lidah Buaya, pepaya dan jagung seluas 674,70 hektar.

Perkembangan pengembangan sektor pangan di Kota Pontianak lebih di titik beratkan pada pengembangan diversifikasi produk yang mempunyai nilai ekonomis strategis dengan memanfaatkan keunggulan kompetitif komoditas unggulan daerah. Pengembangan kawasan sentra agribisnis dilakukan dengan cara menggali lebih dalam potensi yang dimiliki kawasan, mendorong pemanfaatan sumberdaya pertanian dan pengembangan infrastruktur penunjang kawasan secara optimal.

Faktor pendukung dalam rangka percepatan pembangunan pertanian adalah perkembangan teknologi yang diharapkan agar mampu:

- a. Meningkatkan produksi lidah Buaya segar maupun olahan
- b. Memperbaiki kualitas produksi segar Lidah Buaya



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

- c. Perbaikan penanganan pasca panen
- d. Pengemasan
- e. Peningkatan kualitas dan diversifikasi hasil olahan

Kelembagaan yang mendukung hal tersebut telah berdiri UPTD Agribisnis. Selain sebagai wahana untuk pusat pengembangan komoditas unggulan di Kota Pontianak, juga merupakan jendela informasi tentang segala hal yang berkaitan dengan komoditas unggulan tersebut, sehingga dapat berfungsi sebagai *Bank of Technology*. Kegiatan ini lebih diarahkan dalam bentuk pembangunan fisik serta fasilitas pusat pengkajian tersebut. Beberapa teknologi yang telah dikembangkan yaitu kultur jaringan, *aloe powder*, produk olahan (jus lidah buaya) dan teknologi budidaya lidah buaya. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor 710 tahun 2012 tentang Penetapan Produk Unggulan Daerah Kota Pontianak Tahun 2012 ditetapkan tanaman lidah buaya dan produk olahannya sebagai produk unggulan Kota Pontianak.

Fungsi UPTD Agribisnis khususnya dalam agribisnis lidah buaya adalah sebagai berikut:

- a. Pusat pengkajian penerapan dan pengembangan teknologi produksi bibit, budidaya, proses dan tekno-ekonomi agribisnis lidah buaya.
- b. Wahana bagi ilmuwan dari berbagai instansi, lembaga, praktisi dan swasta serta pengambil kebijakan untuk secara sinergis menghasilkan teknologi terapan yang layak dan dapat meningkatkan nilai tambah produk lidah buaya.
- c. Sebagai pusat pelatihan dan kerja praktek (magang).
- d. Sumber informasi teknologi dan agribisnis lidah buaya.
- e. Promosi investasi agribisnis dan agriwisata lidah buaya.
- f. Sebagai model sistem pertanian terpadu.

Pembangunan industri pengolahan lidah buaya merupakan langkah strategis dalam upaya memberikan multiplier effect baik dari aspek ekonomi, peningkatan



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

lapangan pekerjaan, kesejahteraan masyarakat berupa peningkatan PDRB maupun peningkatan PAD dalam upaya percepatan pembangunan.

Pembangunan industri pengolahan lidah buaya tersebut memerlukan sarana dan prasarana yang memadai, berkualitas dan berstandar agar produk yang dihasilkan dapat diterima di pasar global.

### **3.5 Keadaan Perindustrian Dan Energi**

#### **3.5.1 Keadaan Perindustrian Dan Energi Kota Pontianak**

##### **3.5.1.1 Keadaan Perindustrian Kota Pontianak**

Data industri Kota Pontianak yang terdapat dalam sub bab ini bersumber pada data yang dikumpulkan melalui Survei Perusahaan Industri Besar dan Sedang Tahunan Badan Pusat Statistik, dimana kategori industri yang digunakan adalah sebagai berikut :

- Industri Besar mempunyai tenaga kerja 100 orang atau lebih
- Industri Sedang dengan tenaga kerja 20 – 99 orang
- Industri Kecil dengan tenaga kerja 5 –19 orang
- Industri Mikro dengan tenaga kerja 1– 4 orang.

Jumlah perusahaan Industri Besar/Sedang di Kota Pontianak pada kondisi terakhir tahun 2015 adalah sebanyak 30 perusahaan, 18 perusahaan diantaranya terletak di Kecamatan Pontianak Utara, 5 perusahaan di Kecamatan Pontianak Selatan, 4 perusahaan di Kecamatan Pontianak Timur, 2 perusahaan di Kecamatan Pontianak Barat, dan 1 perusahaan di Kecamatan Pontianak Kota. Tenaga kerja yang diserap oleh perusahaan Industri Besar Sedang tersebut berjumlah 2.832 orang, terdiri dari 1.855 laki-laki dan 977 perempuan.



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**Tabel 3.17** Jenis Industri Besar Sedang Manufaktur  
Kota Pontianak Tahun 2016

<b>Kecamatan</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Pontianak Selatan	4	5	7
Pontianak Tenggara	0	0	0
Pontianak Timur	3	4	4
Pontianak Barat	3	2	3
Pontianak Kota	2	1	1
Pontianak Utara	15	18	24
<b>Jumlah</b>	<b>27</b>	<b>30</b>	<b>39</b>

Sumber : BPS Kota Pontianak

### 3.5.1.1 Keadaan Energi Kota Pontianak

Berdasarkan data yang diperoleh dari PT. PLN (Persero) Cabang Pontianak, bahwa pada kondisi akhir tahun 2016 yakni Bulan Desember, ada sebanyak 420.671 pelanggan yang tercatat di PT. PLN. Pelanggan ini meliputi rumah tangga, Industri, Perkantoran, Bisnis, Sosial, dan pelanggan prabayar. Produksi listrik PLN yang terjual selama tahun 2016 adalah sebanyak 1.141.604 MWH, dimana golongan pelanggan yang paling banyak menggunakan listrik PLN adalah golongan rumah tangga dengan konsumsi listrik sebanyak 45,05 persen dari total listrik yang diproduksi PLN, sedangkan pelanggan listrik kelas industri hanya mengkonsumsi listrik sebesar 6,06 persen.

**Tabel 3.18** Tenaga Kerja Industri Besar Sedang Manufaktur  
Kota Pontianak Tahun 2016

<b>Kecamatan</b>	<b>2014</b>		<b>2015</b>		<b>2016</b>	
	<b>Pekerja Produksi</b>	<b>Pekerja Lainnya</b>	<b>Pekerja Produksi</b>	<b>Pekerja Lainnya</b>	<b>Pekerja Produksi</b>	<b>Pekerja Lainnya</b>
Pontianak Selatan	88	34	59	39	163	62
Pontianak Tenggara	0	0	0	0	0	0
Pontianak Timur	69	7	107	22	102	22
Pontianak Barat	74	228	57	165	77	411
Pontianak Kota	35	10	18	8	18	7
Pontianak Utara	1.652	607	1.763	572	1.943	826
<b>Jumlah</b>	<b>1.918</b>	<b>886</b>	<b>2.004</b>	<b>806</b>	<b>2.303</b>	<b>1.328</b>

Sumber : BPS Kota Pontianak





### **3.5.2 Keadaan Perindustrian Dan Energi Kecamatan Pontianak Utara**

#### **3.5.2.1 Keadaan Perindustrian Kecamatan Pontianak Utara**

Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang di Kecamatan Pontianak Selatan tahun 2016 adalah 24 industri, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 18 industri. Kemudian tenaga kerja laki-laki berjumlah 1.822 orang, sementara tenaga kerja perempuan berjumlah 947 orang.

**Tabel 3.19** Jenis Industri Besar Sedang Manufaktur  
Kecamatan Pontianak Utara Tahun 2016

<b>Indikator</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Jumlah IBS	15	15	18	24
Tenaga Kerja Lk	1.311	1.436	1.459	1.822
Tenaga Kerja Pr	631	823	876	947
Pekerja Produksi	1.686	1.686	1.763	1.943
Pekerja Lainnya	256	607	572	826

Sumber : BPS Kota Pontianak

### **3.6 Keadaan Pendapatan Regional**

#### **3.6.1 Keadaan Pendapatan Regional Kota Pontianak**

##### **3.6.1.1 Keadaan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pontianak**

PDRB Kota Pontianak menurut lapangan usaha ADHK 2010 tahun 2015 mencapai 20,80 triliun rupiah. Jika dibandingkan dengan tahun 2014, volume produksi barang dan jasa yang dihasilkan di Kota Pontianak pada tahun 2015 meningkat sebanyak 0,96 triliun rupiah, atau dengan kata lain, kenaikan volume ini menunjukkan bahwa perekonomian di kota Pontianak tumbuh sebesar 4,84 persen.



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**Tabel 3.20** Produk Domestik Regional Bruto Kota Pontianak Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2014 - 2016

	Lapangan Usaha/Industry	2014*	2015*	2016**
	(1)	(2)	(3)	(4)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry and Fishing	361 774,50	390 512,72	417 217,05
B	Pertambangan dan Pengalihan/Mining and Quarrying	-	-	-
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	4 287 521,22	4 546 740,04	5 046 498,58
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	20 696,24	26 840,65	35 382,39
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	83 220,24	89 952,81	98 297,13
F	Konstruksi/Construction	4 033 412,72	4 780 989,23	4 997 766,67
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	4 688 860,14	5 260 213,93	5 671 884,73
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	2 226 675,42	2 451 909,73	2 702 911,45
I	Penyediaan Akomodasi dan Makanan dan Minuman/Accommodation and Food Service Activities	834 691,69	939 726,88	1 048 181,46
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	954 027,48	1 072 928,66	1 190 067,29
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	2 234 074,91	2 403 461,73	2 695 619,16
L	Real Estat/Real Estate Activities	669 139,38	730 577,37	784 814,42
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	155 281,16	178 673,44	202 304,38
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	1 860 186,48	2 158 348,20	2 489 269,58
			1 902 064,61	2 049 172,38
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	425 415,18	469 754,38	506 040,91
R,S,T,U	Jasa lainnya/Other Services Activities	475 372,68	517 442,21	544 661,73
	<b>PDRB/GRDP</b>	<b>25 069 682,22</b>	<b>27 920 136,59</b>	<b>30 480 089,32</b>

Sumber : BPS Kota Pontianak



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**Tabel 3.21** Produk Domestik Regional Bruto Kota Pontianak Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha Tahun 2014 - 2016

	Lapangan Usaha/Industry	2014 <sup>f</sup>	2015*	2016**
	(1)	(2)	(3)	(4)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry and Fishing	322 013,50	330 239,10	342 491,97
B	Pertambangan dan Pengolahan/Quarrying	-	-	-
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	3 451 969,33	3 534 632,14	3 688 108,19
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	23 339,06	24 656,36	29 358,03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	78 554,14	81 399,38	88 547,10
F	Konstruksi/Construction	3 033 467,25	3 301 849,43	3 361 328,44
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	3 855 828,55	4 079 128,21	4 286 338,39
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	1 926 810,80	2 001 082,15	2 121 145,93
I	Penyediaan Akomodasi dan Makanan dan Minum/Accommodation and Food Service Activities	670 651,48	705 069,40	758 424,46
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	886 762,75	984 906,35	1 086 908,71
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	1 691 914,84	1 727 240,39	1 857 777,88
L	Real Estat/Real Estate Activities	560 188,56	579 667,30	615 917,10
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	133 343,73	142 591,02	153 536,80
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	970 556,30	1 024 581,30	1 103 770,51
P	Jasa Pendidikan/Education	1 403 108,63	1 450 197,55	1 496 985,0
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Health and Social Work Activities	342 214,73	356 343,19	372 639,85
R,S,T,U	Jasa lainnya/Other Services Activities	410 612,29	423 911,48	442 910,64
	<b>PDRB/GRDP</b>	<b>19 761 335,94</b>	<b>20 747 494,76</b>	<b>21 806 188,99</b>

Sumber : BPS Kota Pontianak

### 3.6.1.2 Keadaan Struktur Ekonomi Kota Pontianak

Struktur Ekonomi Sektor Perdagangan, Hotel Dan Restoran merupakan basis perekonomian di Kota Pontianak selama tiga tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat dari Distribusi persentase PDRB menurut lapangan usaha ADHB, dimana Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memiliki peranan



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

terbesar terhadap total PDRB dibandingkan dengan sektor lainnya, yaitu sebesar 18,30 persen.

**3.6.2 Keadaan Pendapatan Regional Kecamatan Pontianak Utara**

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Kecamatan Pontianak Utara pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 4,98 Triliun Rupiah yang pada tahun sebelumnya sebesar 4,58 Triliun Rupiah. Sama halnya dengan PDRB atas dasar harga konstan yang mengalami peningkatan menjadi sebesar 3,62 Triliun rupiah pada tahun 2016 yang pada tahun sebelumnya sebesar 3,45 Triliun Rupiah. Kategori yang mendominasi PDRB Pontianak Utara adalah Industri Pengolahan, yakni sebesar 55,63 persen. Akan tetapi, pada tahun 2016, kategori ini hanya mengalami pertumbuhan sebesar 3,66 persen. Sementara, kategori yang mengalami pertumbuhan terbesar adalah kategori informasi dan komunikasi, yakni sebesar 9,62 persen

**Tabel 3.22 PDRB Kecamatan Pontianak Utara Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014-2016**

Kategori	Uraian	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	299.209,9	319.320,8	334.360,0
B	Pertambangan dan Pengalihan	0,0	0,0	0,0
C	Industri Pengolahan	2.217.136,7	2.514.517,9	2.767.613,7
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4.518,9	5.187,1	5.788,7
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16.175,8	17.970,3	19.299,8
F	Konstruksi	66.820,4	77.124,0	80.068,7
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Perjudian	507.088,1	554.300,9	595.313,3
H	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Perjudian	89.787,0	97.036,4	108.058,4
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.441,7	7.161,4	8.061,8
J	Informasi dan Komunikasi	21.682,4	25.518,2	28.808,9
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	186.499,2	201.526,5	223.607,9
L	Real Estate	48.313,3	50.583,2	53.403,0
M,N	Jasa Perusahaan	3.787,3	4.162,8	4.504,3
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa	269.288,6	317.591,9	350.512,0
P	Pendidikan	317.492,4	353.887,5	365.008,4
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	12.987,6	14.246,6	14.956,1
R,S,T,U	Jasa lainnya	13.660,1	14.869,0	15.687,0
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>4.080.889,5</b>	<b>4.575.004,5</b>	<b>4.975.051,5</b>

\* *Anaka sementara*  
 \*\* *Anaka sangat sementara*

Sumber : BPS Kota Pontianak



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**Tabel 3.23 PDRB Kecamatan Pontianak Utara Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014-2016**

Kategori	Uraian	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	266.661,4	276.527,4	287.157,7
B	Pertambangan dan Penggalian	0,0	0,0	0,0
C	Industri Pengolahan	1.829.771,4	1.920.679,2	2.036.695,0
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5.097,8	5.482,9	5.884,7
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	15.168,6	15.973,7	16.819,1
F	Konstruksi	49.661,1	53.555,5	54.978,9
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	417.774,7	437.542,0	452.875,0
H	Transportasi dan Pergudangan	77.735,8	80.533,9	85.639,7
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.242,3	5.493,1	5.762,2
J	Informasi dan Komunikasi	20.079,0	22.946,1	25.084,7
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	140.934,6	144.225,5	153.342,5
L	Real Estate	41.054,5	42.490,6	43.654,8
M,N	Jasa Perusahaan	3.337,1	3.523,4	3.657,0
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	140.501,9	152.762,9	160.876,8
P	Jasa Pendidikan	253.207,5	261.681,8	265.505,4
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10.487,2	10.820,9	11.046,3
R,S,T,U	Jasa lainnya	11.799,2	12.681,4	13.243,3
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>3.288.514,1</b>	<b>3.446.920,0</b>	<b>3.622.223,1</b>

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

Sumber : BPS Kota Pontianak



### **3.7 Potensi Ekspor Komoditas Lidah Buaya Indonesia ke Korea Selatan**

Kerjasama Korea Selatan dan Indonesia di Bidang ekonomi dan perdagangan sudah erat sekali, di samping Indonesia Negara dengan luas kawasan maritime nya, Korea Selatan melirik untuk kerjasama di bidang maritim, namun tak kalah gencarnya kerjasama di bidang perdagangan, yang mana Korea Selatan dan Indonesia menyepakati perjanjian dengan menargetkan volume perdagangan US\$ 50 Milliar dan US\$ 100 Milliar pada tahun 2020. Sebagai tambahan juga untuk produk berbahan dasar buah- buahan atau sejenisnya, pemerintah Korea Selatan melalui KFDA (*Korea Food and Drug Administration*) juga sudah bekerjasama dengan NADFC (*The National Agency of Drug and Food Control of Republic Indonesia*) pada tanggal 12 Juli 2012 di Jakarta, jadi Kami, ITPC merasa perlu untuk memberitahukan bagaimana potensi besar aloe vera Indonesia di Korea Selatan serta dengan dukungan perjanjian-perjanjian antarnegara.

Aloe Vera atau biasa kita sebut lidah buaya yang mempunyai Bahasa latin *Aloe barbadensis Milleer* sudah dikenal sejak beberapa ribu tahun silam dengan fungsi sebagai penyubur rambut, penyembuh luka, dan perawatan kulit, tumbuhan ini mudah tumbuh di kawasan tropis atau lahan kering, tumbuhan ini tumbuh di Negara-negara Afrika, tetapi juga sangat banyak juga tumbuh berlimpah di tanah Indonesia. Korea selatan memiliki iklim subtropis, jadi sangat sukar sekali untuk tanaman aloe vera tumbuh berkembang di Negara Korea Selatan. Jumlah ekspor produk hasil olahan aloe vera ke seluruh dunia sangat pesat di Korea, tercatat untuk produk olahan aloe vera menjadi shampoo (kode HS: 3305.10) pada tahun 2013 adalah \$US 40,417 dan pada tahun 2014 sebesar \$US 62,206 perubahannya sangat pesat sekali, adapun dengan produk minuman aloe vera (kode HS: 2202.90. 9000) tercatat pada tahun 2013 sebesar \$US 157,605 dan tahun 2014 sebesar \$US 179,340, dan untuk olahan cosmetics (Kode HS : 3304.99.1000 ) pada tahun 2013 sebesar \$US 513,033 dan 2014 sebesar \$US 831,727.



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Pada tahun 2014, Korea selatan mengimpor Aloe Vera dari dunia sebesar \$US 15,199, walaupun nilai impornya naik turun dari tahun ke tahun, tetapi nilainya lumayan signifikan, berikut tabel impor Aloe Vera Korea selatan terhadap dunia. Indonesia belum menjadi Negara Importer Aloe Vera untuk Korea Selatan, namun kami yakin dengan usaha keras dan strategy yang jitu aloe vera kita dapat menembus pasar Korea Selatan, tiga urutan teratas Negara pengimpor aloe vera ke Korea Selatan adalah China, Amerika Serikat, dan Mexico, berikut tabel impor Korea Selatan dari dunia:

**Tabel 3.24** Data Impor Komoditas Aloe Vera Korea Selatan

Exporter Country	2010	2011	2012	2013	2014
	Value	Value	Value	Value	Value
World	15,076	17,401	16,782	15,798	15,199
U.S.A	8,676	5,129	5,126	5,356	5,015
Pr.China	4,700	4,681	3,986	3,918	3,701
Mexico	1,526	7,119	7,187	5,944	5,178
South Africa	48	225	156	106	139
Hong Kong	0	-	-	-	-
Costa Rica	-	-	-	160	946
Germany	99	200	161	164	203
France	4	2	4	2	6
Indonesia	0	0	-	0	0
Thailand	17	34	78	7	9
India	4	12	29	139	0

Indonesia belum tercatat sebagai Negara impor untuk komoditas aloe vera bagi Negara Korea Selatan, Negara Asean pesaing Indonesia yang masuk adalah Thailand, ketika kita melihat pasar ekspor dunia untuk aloe vera ke Korea Selatan ini, maka jadi masih besar peluang besar untuk Indonesia memasarkan dan mengeksport aloe vera ke negeri ginseng ini.



## **Hasil Perencanaan**

---

---

### **4.1 Sinergitas Pembangunan**

Sinergitas berasal dari kata sinergi, dapat disebut pula dengan sinergisme ataupun sinergisitas. sinergi mengandung arti kombinasi unsur atau bagian yang dapat menghasilkan pengeluaran yang lebih baik atau lebih besar. pembangunan merupakan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building)”

#### **4.1.1 Sinergitas Pembangunan Infrastruktur Sarana Dan Prasarana**

Pentingnya peranan pariwisata dalam pembangunan ekonomi sudah tidak diragukan lagi, menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan di dalam perolehan devisa, penciptaan lapangan kerja, maupun pengentasan kemiskinan. Bentuk-bentuk penawaran dalam industry pariwisata pada umumnya, yang berasal dari alam maupun yang dibuat atau disediakan oleh manusia, sebagai berikut:

##### **A. Fasilitas Alami**

yang bersumber dari alam diantaranya adalah:

- Cuaca seperti: segarnya udara (mild), sinar matahari (sun shine)
- Tata letak tanah dan pemandangan alam
- Sylvan elements, yaitu hutan-hutan lebat, dan pohon-pohon langka.
- Flora dan fauna yang termasuk dalam kelompok ini adalah tumbuh-tumbuhan dan binatang yang aneh, unik, langka, dan beragam yang memungkinkan orang-orang melakukan penelitian, memancing, berburu, membuat foto, seperti pada taman nasional, kebun raya dan taman safari yang kita kenal.





**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

- Pusat-pusat kesehatan seperti pengolahan obat-obat herbal

**B. Sejarah, Budaya dan Agama**

Yang termasuk kelompok ini diantaranya adalah:

- Monumen bersejarah dan sisa-sisa peradaban masa lalu, yaitu monumen-monumen dan peninggalan-peninggalan bersejarah peradaban masa lalu.
- Tempat-tempat budaya, seperti museum, gedung kesenian, handicrafts industries, tugu peringatan, prasasti, tempat-tempat pertunjukan kesenian tradisional, tempat-tempat penjualan cenderamata, dan lain-lain.
- Acara-acara tradisional, seperti perayaan-perayaan tradisional, pameran karnaval, upacara-upacara adat, ziarah dan sebagainya.
- Bangunan-bangunan religius, yaitu bangunan atau gedung-gedung bersejarah seperti mesjid, gereja, wihara, klenteng, pura dan sebagainya.

**C. Infrastruktur**

Ada lima kategori yang termasuk dalam prasarana (infrastructures), masing-masing adalah:

- Prasarana Umum (General Infrastructures) meliputi prasarana umum, mencakup hal-hal sebagai berikut sistem penyediaan air bersih, tenaga listrik, jalan, terminal.
- Kebutuhan Masyarakat Banyak (Basic Needs of Civilized Life) Kebutuhan pokok manusia modern, seperti: kantor pusat dan telepon, rumah sakit, apotik bank, pusat-pusat perbelanjaan, bar dan restoran, salon kecantikan., barbershop, kantor polisi, toko obat, penjualan rokok, tokoacamata, toko-toko penjual Koran dan majalah, pompa bensin bengkel mobil, wartel, warnet dan lainnya.



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

- Prasarana Kepariwisataan

***Residential tourist plants*** Semua fasilitas yang dapat menampung kedatangan para wisatawan untuk menginap dan tinggal untuk sementara waktu di daerah tujuan wisata. Termasuk ke dalam kelompok ini adalah semua bentuk akomodasi yang diperuntukan bagi wisatawan dan juga segala bentuk rumah makan dan restoran yang ada. Misalnya hotel, motor hotel (motel), wisma, *homestay*, *cottages*, *camping*, *youth hostel*, serta rumah makan, restoran, *self-services*, *cafeteria*, *coffee shop*, *grill room*, *bar*, *tavern*, dan lain-lain.

***Receptive tourist plants*** Segala bentuk badan usaha atau organisasi yang kegiatannya khusus untuk mempersiapkan kedatangan wisatawan pada suatu daerah tujuan wisata, yaitu :

- Perusahaan yang kegiatannya adalah merencanakan dan menyelenggarakan perjalanan bagi orang yang akan melakukan perjalanan wisata (*tour operator and travel agent*).
- Badan atau organisasi yang memberikan penerangan, penjelasan, promosi dan propaganda tentang suatu daerah tujuan wisata (*Tourist Information Center* yang terdapat di *airport*, terminal, pelabuhan, atau suatu *resort*).

***Recreative and sportive plants*** Termasuk dalam kelompok ini adalah semua Fasilitas yang dapat digunakan untuk tujuan rekreasi dan olah raga. Termasuk ke dalam kelompok ini adalah fasilitas untuk bermain golf, kolam renang, *boating*, *surfing*, *fishing*, *tennis court*, dan fasilitas lainnya.



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan hasil analisis bahwa kawasan sentral bisnis mempunyai potensi besar untuk menjadi daya tarik wisata, bukan hanya UPTD saja yang akan berkembang akan tetapi kawasan sentral agribisnis juga mempunyai peran penting. Berdasarkan studi literature dapat mengacu rumah desa sade suku sasak Lombok tengah karena berdasarkan hasil refrensi jurnal dan kajian lokasi kedua tersebut mendekati kawasan sentral agribisnis. Di dalam konsep kedua lokasi pariwisata ini mengembakan sumber daya alam terus di jadikan pariwisata. Perlu adanya kordinasi masyarakat dalam kegiatan ini dan perlu penunjangan kawasan sentral agribisinis sesuai design tapak terencana dengan orang-orang yang handal dalam mengkaji design-design kawasan.



**Gambar 4.1.** Kawasan Wisata Rumah Sade

Begitu sederhana akan tetapi mempunyai daya tarik yang sangat besar sampai ke mancanegara sumber daya alam yang di jual di sana adalah rumput laut yang di jadikan dodol, pernak-pernik hiasan asli dari laut dan kain tenun. Untuk kawasan sentral agribisni juga bisa seperti itu mengubah lidah buaya dan papaya menjadi daya tarik dan di dukung sarana dan prasarana yang baik supaya mempunyai nilai daya tarik tinggi.



#### **D. Sarana Akses Dan Fasilitas Transportasi**

Berdasarkan kondisi lapangan untuk kondisi jaringan jalan menuju kawasan sentral agribisnis masih dalam pembangunan dan juga belum merata dalam segi pembangunannya. Jalan landak menjadi dan lokasi penyebarang feri siantan menjadi 2 kegiatan yang paling berpengaruh sehingga menimbulkan kemacetan. Dengan adanya pemerataan ekonomi untuk kedepannya untuk mengarahkan untuk jalur pulang dari ke Pontianak melalui jalan budi utomo dan jalan di kawasan sentral agribisnis agar mempunyai daya tarik besar terhadap petani di sana dalam menjual hasilnya.

Sangat jarang jalan budi utomo di lewati rata-rata banyak kendaraan besar yang melewati jalur tersebut sehingga kelihatan sepi. Serta mengurangi kemacetan yang di timbulkan di kawasan siantan karena di sana terdapat kapal penyebrang fery, perdagangan dan jasa, industry dan perkantoran.

Berbeda dengan lokasi jl. Budi Utomo untuk tata guna lahan tidak bervariasi dominanmayorisa di sana perdagangan jasa, permukiman, gudang, ruang terbuka jijau dan perkebunan untuk bangkitan tariknya masih lemah daripada di jalan siantan.

#### **E. Sarana Pengairan**

Konsep penataan drainase berwawasan lingkungan mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 /PRT/M/2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan dengan mengedepankan penataan drainase yang ramah lingkungan. Kondisi ramah lingkungan dapat terwujud dengan adanya perlindungan dan pengembangan ruang terbuka hijau di kawasan tangkapan air hujan di daerah pengembangan kawasan agribisnis-agrieduwisata. Penanaman tanaman di sepanjang tepian saluran jalan raya juga dapat meningkatkan penyerapan air hujan sehingga *run off* yang dihasilkan akan



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

berkurang yang berakibat kapasitas penampung terjaga dan bertambahnya air tanah dari penyerapan air hujan.

Tanaman yang untuk digunakan di sepanjang tepian jalan raya di daerah pengembangan kawasan agribisnis-agrieduwisata adalah pohon perdu yang bisa mereduksi polusi udara. Menurut penelitian di laboratorium, terdapat 5 jenis pohon yang bisa mengurangi polusi udara sekitar 47 – 69%, antara lain adalah Pohon Felicium (*Filicium decipiens*), Pohon Mahoni (*Swietenia mahogani*), Pohon Kenari (*Canarium commune*), Pohon Salam (*Syzygium polyanthum*) dan Pohon Anting-anting (*Elaeocarpus grandiforus*). Sementara itu, jenis tanaman perdu yang baik untuk mengurangi polusi udara adalah tanaman Puring (*Codiaeum variegatum*), Werkisiana, Nusa Indah (*Mussaenda* sp), Soka (*Ixora javanica*) dan Kembang Sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) (Sulistyanto, 2017).



**Gambar 4.2** Pohon Mahoni



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**



**Gambar 4.3** Pohon Tanjung

Salah satu kota yang menggunakan pohon perdu untuk mengurangi pencemaran udara adalah Kota Bandung, tepatnya pada ruas Jalan L. L. RE. Martadinata. Penggunaan Mahoni dan Pohon Tanjung sebagai tanaman tepi jalan berfungsi sebagai tanaman peneduh dan penyerap bahan pencemaran udara, terutama emisi yang dihasilkan dari kendaraan bermotor (Sulistyanto, 2017).

Penataan pedestrian juga perlu dilakukan agar kondisi jalan raya di daerah pengembangan kawasan agribisnis-agrieduwisata dengan standar internasional agar budaya berjalan kaki akan lebih meningkat seiring dengan kondisi udara yang akan membaik dengan adanya penanaman tanaman perdu di kawasan pedestrian daerah pengembangan kawasan agribisnis-agrieduwisata.

Air merupakan sumber daya dan faktor determinan yang menentukan kinerja sektor pertanian, karena tidak ada satu pun tanaman pertanian dan ternak yang tidak memerlukan air. Meskipun perannya sangat strategis, namun pengelolaan air masih jauh dari yang diharapkan, sehingga air yang semestinya merupakan sahabat petani berubah menjadi penyebab bencana bagi petani. Indikatornya, di musim kemarau, ladang dan sawah sering kali kekeringan dan sebaliknya di musim penghujan, ladang dan sawah banyak yang terendam air. Secara kuantitas, permasalahan air bagi pertanian terutama di lahan kering adalah persoalan ketidaksesuaian distribusi air antara kebutuhan dan pasokan menurut



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

waktu (temporal) dan tempat (spatial). Teknologi Embung atau tandon air merupakan salah satu pilihan yang menjanjikan karena teknologinya sederhana, biayanya relatif murah dan dapat dijangkau kemampuan petani.

Ketersediaan air pada lahan di Kecamatan Pontianak Utara sangat tergantung dari curah hujan. Pada saat musim kemarau umumnya lahan tidak dapat ditanami, karena air tidak tersedia. Embung merupakan salah satu teknologi adaptasi ketidakpastian iklim khususnya untuk Kecamatan Pontianak Utara.

Embung atau tandon air merupakan waduk berukuran mikro di lahan pertanian (*small farm reservoir*) yang dibangun untuk menampung kelebihan air hujan di musim hujan. Air yang ditampung tersebut selanjutnya digunakan sebagai sumber irigasi suplementer untuk budidaya komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi (*high added value crops*) di musim kemarau atau di saat curah hujan makin jarang. Embung merupakan salah satu teknik pemanenan air (water harvesting) yang sangat sesuai di segala jenis agriekosistem.

Fungsi dari embung sendiri tidak hanya berguna untuk kegiatan pertanian dan perkebunan, melainkan dapat bermanfaat sebagai sumber air bersih sementara saat musim kemarau yang berakibat intrusi air laut menuju Sungai Kapuas, sehingga akses air bersih untuk penggunaan sebagai air baku memiliki kualitas air yang asin. Hal ini juga dapat berdampak pada iklim lokal yang memiliki suhu relatif lebih stabil sehingga tidak menimbulkan daerah titik *hotspot* yang dapat menyebabkan kebakaran hutan.

Beberapa syarat yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan pembuatan embung yaitu:

- Agar fungsinya sebagai penampung air dapat terpenuhi, embung sebaiknya dibuat pada lahan dengan tanah liat berlempung.





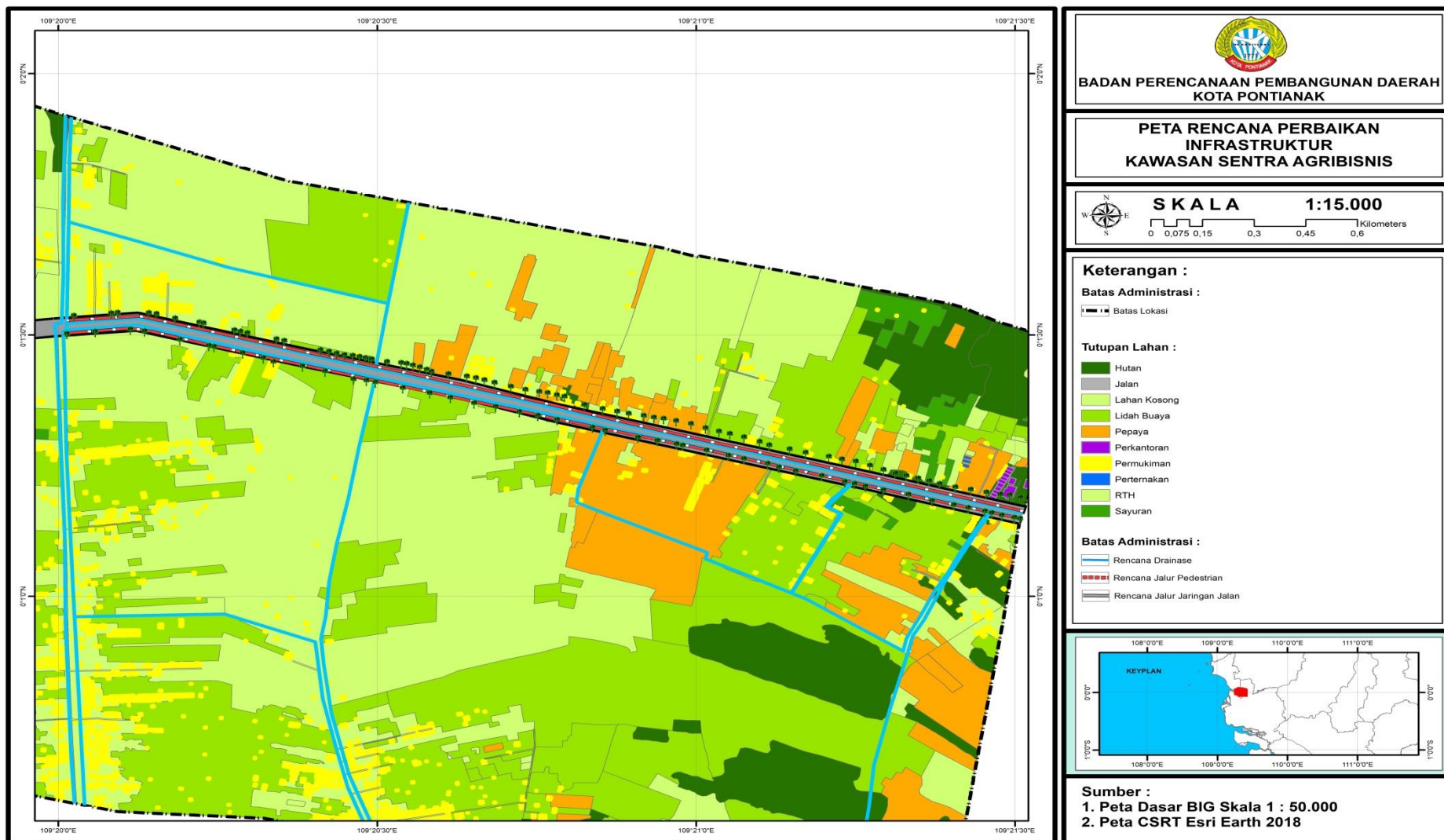
**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

- Pada tanah berpasir yang porous (mudah meresapkan air) tidak dianjurkan pembuatan embung karena air cepat hilang. Kalau terpaksa, dianjurkan memakai alas plastik atau ditembok sekeliling embung.
- Embung sebaiknya dibuat pada areal pertanian yang bergelombang dengan kemiringan antara 8 - 30%. Agar limpahan air permukaan dapat dengan mudah mengalir kedalam embung dan air embung mudah disalurkan ke petak-petak tanaman, maka harus ada perbedaan ketinggian antara embung dan petak tanaman.
- Pada lahan yang datar akan sulit untuk mengisi air limpasan ke dalam embung.
- Pada lahan yang terlalu miring (> 30%), embung akan cepat penuh dengan endapan tanah karena erosi.
- Penempatan embung sebaiknya dekat dengan saluran air yang ada disekitarnya, supaya pada saat hujan, air di permukaan tanah mudah dialirkan kedalam embung.
- Lebih baik lagi kalau dibuat di dekat areal tanaman yang akan diairi.
- Lokasinya memiliki daerah tangkapan hujan.





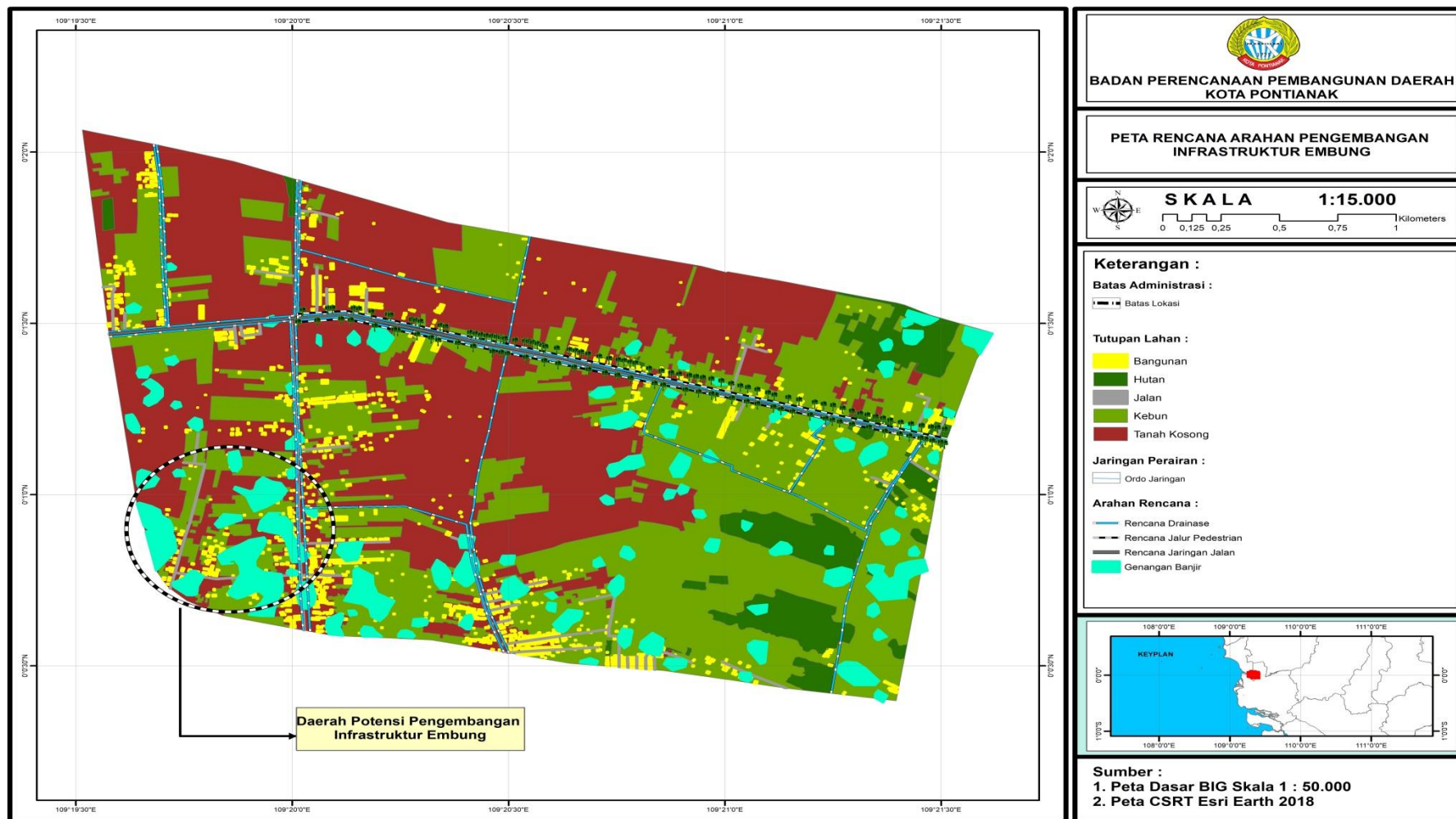
**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**



**Gambar 4.4** Rencana Perbaikan Infrastruktur Kawasan Sentral Agribisnis



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

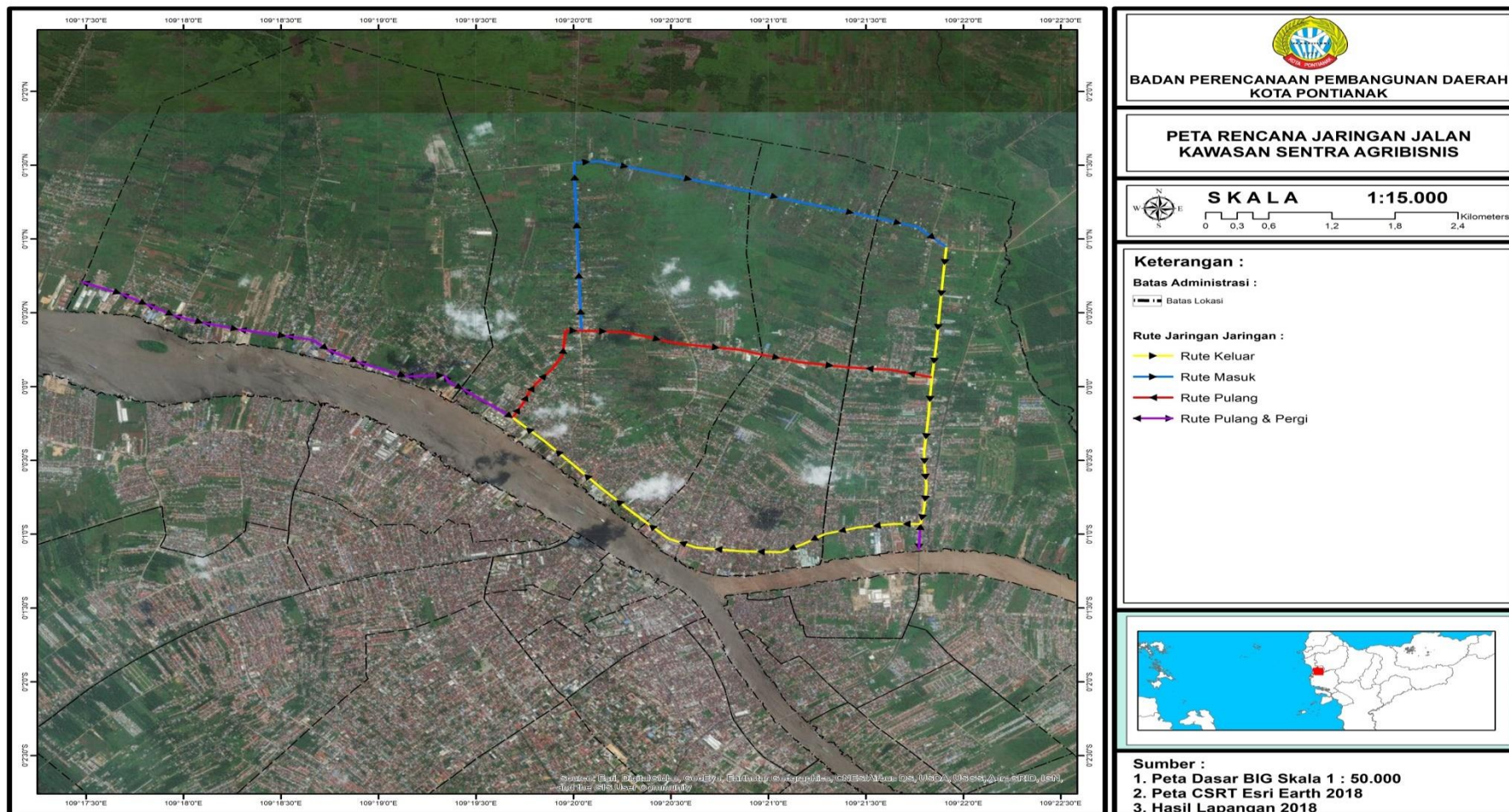


**Gambar 4.5** Rencana Arahan Pembangunan Infrastruktur Embung Kawasan Sentral Agribisnis





**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**



**Gambar 4.6** Rencana Jaringan Jalan Kawasan Sentral Agrisuburb



#### **4.1.2 Sinergitas Pembangunan Agribisnis**

Berdasarkan arahan RTRW Kota Pontianak No 2 tahun 2013-2033, struktur kegiatan yang akan dikembangkan bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang serasi, selaras, seimbang, produktif, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan berbasis pada pengembangan agribisnis, perindustrian, pariwisata serta kawasan perbatasan negara guna meningkatkan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat. Dengan arahan strategi pengembangan wilayah yang berbasis pertanian dalam mendukung kegiatan agribisnis untuk percepatan peningkatan ekonomi wilayah meliputi meningkatkan produksi dan produktifitas di sektor pertanian, mengembangkan kegiatan pertanian berbasis keunggulan komparatif dan daya dukung lokal, mengembangkan usaha agribisnis di sektor pertanian, menetapkan kawasan yang merupakan lahan pertanian yang berkelanjutan, dan mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengelolaan sektor pertanian.

Pada wilayah perencanaan memiliki berbagai potensi serta masalah, yaitu dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk setiap tahunnya menyebabkan bertambahnya kebutuhan pemanfaatan lahan untuk berbagai kegiatan, sehingga perlu di arahkan dengan mengacu pada RTRW Kota Pontianak. Salah satu pemanfaatan lahan yang terdapat di Kota Pontianak adalah kawasan pertanian, sebagai salah satu percepatan peningkatan ekonomi wilayah dengan meningkatkan produksi dan produktifitas di sektor pertanian. Konsep Dasar dalam pengembangan kawasan agripolitan di Kota Pontianak tetap harus sesuai dengan rencana hirarki ruang yang telah dibuat sebelumnya, yaitu pada hirarki tersebut telah membagi 3 sistem fungsional pada penentuan kawasan agripolitan, yaitu kawasan agribisnis hulu, agribisnis tengah (on-farm), dan agribisnis hilir. Pada masing-masing peruntukkan tersebut dapat menimbulkan berbagai permasalahan. Berikut adalah tabel konsep rencana yang terdapat di wilayah perencanaan. Berikut pemaparannya :



#### **4.1.2.1. Konsep Rencana Pengembangan Agribisnis**

##### **1. Agribisnis Hulu**

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan untuk bidang pertanian, maka dapat diketahui komodi-komoditi yang memiliki potensi yaitu diantaranya untuk pertanian lahan kering yaitu tanaman hortikultura berupa aloevera dan pepaya yang sudah mulai di kembangkan di berbagai kelurahan yang ada di Kecamatan Pontianak Utara. Selain itu diperlukan adanya pengolahan secara optimal untuk produk-produk hasil pertanian/perkebunan agar produk-produk hasil pertanian/perkebunan tidak langsung dijual dalam bentuk mentah/belum jadi. Melainkan menjual hasil produk-produk pertanian/perkebunan dalam bentuk barang setengah jadi untuk lebih meningkatkan nilai jual barang yang dapat menambah dan meningkatkan pendapatan daerah. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.1** Konsep Rencana Agribisnis Hulu

<b>No</b>	<b>Sub Aspek</b>	<b>Konsep Rencana</b>
1	Lahan Pertanian	Menyediakan lahan dan memberi penyuluhan tentang pembibitan dan penggunaan pupuk
		Menentukan areal yang memiliki kriteria yang cocok untuk penggunaan lahan perkebunan
		Memberikan kemudahan memperoleh pupuk dan modal harga bibit dengan harga yang terjangkau oleh petani
		Mengoptimalkan penggunaan lahan dengan mengendalikan kondisi lingkungan
2	Komoditi pertanian	Menciptakan bibit unggul untuk meningkatkan hasil pertanian.
		Membangun kerjasama sektoral sebagai modal usaha pengembangan pertanian untuk mempermudah mendapatkan edukasi tentang sistem pengolahan pertanian dan dapat menciptakan inovasi untuk meningkatkan produksi pertanian
3	Teknologi pertanian	Modernisasi peralatan pertanian dan sistem pertanian untuk meningkatkan produksi pertanian.
		Memberikan penyuluhan dan pelatihan mengenai teknologi pengolahan pertanian untuk peningkatan produksi dan memperbaiki sistem pengolahan pertaniannya.
		Meningkatkan infrastruktur pendukung usaha pertanian dengan menambah alat-alat pengolahan pertaniannya.

Sumber : hasil analisis 2018



## 2. Agribisnis Tengah

**Tabel 4.2** Konsep Rencana Agribisnis Tengah

Aspek	Sub Aspek	Analisa	Konsep Rencana	Strategi
Sistem Usaha Tani	Sistem lahan	Penanaman sudah sesuai dengan lahan yang cocok	Mempertahankan lahan pertanian	Mencegah konversi lahan pertanian untuk penggunaan diluar pertanian dengan cara Mempertahankan lahan pertanian untuk mendukung program ketahanan pangan nasional.
	Pola Tanam	Pola tanam masih secara tradisional	Meperbaiki sistem pola tanam yang tidak optimal	Melakukan pola tanam dan pola tata tanam yang baik dengan memperhatikan asas konservasi tanah dan air kawasan budidaya tanaman
	Kualitas dan Kuantitas	Kualitas dan kuantitas hasil produksi hanya mencukupi diri sendiri	Meningkatkan produktivitas hasil pertanian	Penggunaan teknologi dan modernisasi dalam pengelolaan pertanian
Sub Sistem Pendukung Usaha Tani	Modal	Modal didapat dari dana pemerintah dan dari kelompok tani	Meningkatkan investasi	Menarik simpati investor dengan cara meningkatkan kualitas hasil pertanian
	SDM	Untuk SDM tenaga kerja yang dimiliki sudah cukup baik, walaupun pendidikan pekerja masih rendah tetapi bagi pemerintah petani merupakan aset Negara yang	Memberikan penyuluhan, pemberdayaan, dan bimbingan kepada kelompok tani	Mengadakan konsultasi dengan ahli pertanian mengenai hal hal yang dapat memperbaiki kualitas pertanian



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Aspek	Sub Aspek	Analisa	Konsep Rencana	Strategi
		sangat penting		
	Sapras Pengelolaan Hasil Pertanian	Sapras sudah memadai walaupun dengan cara sederhana	Mengembangkan sapras untuk pertanian	Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pertanian untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil pertanian.

Sumber : hasil analisis 2018

### 3. Agribisnis Hilir

Pengembangan sarana pengolahan dan sarana penyimpanan merupakan kegiatan pengolahan hasil pertanian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.3** Konsep Rencana Agribisnis Hilir

No	Sub Aspek	Konsep Rencana
1	Sarana Pengolahan	Pengembangan industri kecil pengolah hasil produksi pertanian, khususnya hortikultura (aloevera, pepaya).
		Peningkatan sumberdaya masyarakat dalam mengolah hasil pertanian.
		Pengadaan teknologi pengolahan hasil pertanian.
2	Sarana Penyimpanan	Pengembangan gudang penyimpanan hasil produksi

Sumber : hasil analisis 2018

#### 4.1.3 Sinergitas Pembangunan Agrieduwisata

Untuk Sekolah Alam Di Kawasan Sentral Agribisnis adalah sekolah yang merubah paradigma pendidikan Indonesia saat ini. Bukan sekadar perubahan sistem, metode dan target pembelajaran, melainkan perubahan paradigma pendidikan secara menyeluruh yang pada akhirnya mengarah pada perbaikan mutu dan hasil akhir dari proses pendidikan itu sendiri. Anak dibebaskan menjadi diri mereka dan mengembangkan potensi dirinya untuk





tumbuh menjadi manusia yang berkarakter, berakhlak mulia, berwawasan ilmu pengetahuan, dan siap menjadi pemimpin sesuai dengan hakikat penciptaan manusia untuk menjadi pemimpin di muka bumi. Anak dibebaskan dari tekanan 'mengejar' nilai dan ranking. Mereka didorong untuk menumbuhkan tradisi ilmiah.

Prestasi setiap anak tidak dilihat dalam perbandingan dengan anak lain, tapi dari upaya mereka memaksimalkan potensi diri dan menjadi lebih baik. Belajar menjadi sesuatu yang menyenangkan, tidak membebani." Belajar menjadi kebutuhan, bukan keharusan, Sekolah tidak menjadi penjara yang membosankan. Dengan Kondisi Alam yang masih dapat di Kawasan Sentral Agribisnis sangat cocok untuk kegiatan sekolah akan tetapi pengembangan infrastruktur dan sosialisasi masyarakat dapat terjalin dengan baik agar para murid-murid merasa nyaman.

#### **4.2. Konsep Rencana Zonasi Agribisnis**

Peraturan Zonasi memuat materi wajib yang meliputi ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, ketentuan prasarana dan sarana minimal, ketentuan pelaksanaan, dan materi pilihan yang terdiri atas ketentuan tambahan, ketentuan khusus, standar teknis, dan ketentuan pengaturan zonasi. Dalam pengertian yang lain peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. Sedangkan zonasi adalah pembagian kawasan ke dalam beberapa zona sesuai dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi-fungsi lain. Adapun manfaat Peraturan Zonasi yaitu:





**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

- + Menjamin dan menjaga kualitas ruang yang ditetapkan
- + Menjaga kualitas dan karakteristik zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik zona.
- + Meminimalkan gangguan atau dampak negative terhadap zona.

Ketentuan penamaan kode zonasi adalah sebagai berikut: Setiap zonasi diberi kode yang mencerminkan fungsi zonasi yang dimaksud. Nama kode zonasi dapat disesuaikan dengan RTRW Kota Pontianak yang berlaku. Nama kode zonasi diupayakan bersifat umum, yaitu mewakili karakter/sifat dari zona yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table. Adapun contoh kesesuaian kode zonasi dengan deskripsi zona yang dapat dirujuk :

- + Kode **R** untuk zona Perumahan
- + Kode **K** untuk zona Perdagangan dan Jasa/ Komersil
- + Kode **SU** untuk zona Sarana Umum
- + Kode **IG** untuk zona Industri dan Pergudangan
- + Kode **RT** untuk zona Ruang Terbuka Hijau
- + Kode **KS** untuk zona Fungsi Khusus

**Tabel 4.4. Kode dan Klasifikasi Zonasi**

Kode dan Klasifikasi Zonasi		Defenisi dan Tujuan Penetapan Zonasi
<b>R</b>	<b>Permukiman</b>	Definisi: Zona Permukiman adalah peruntukkan tanah yang terdiri dari kelompok rumah tinggal yang mewadahi perikehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya. Tujuan Penetapan : <ul style="list-style-type: none"><li>- Menyediakan lahan untuk pengembangan hunian dengan kepadatan yang bervariasi;</li><li>- Mengakomodasi bermacam tipe hunian dalam rangka mendorong penyediaan hunian</li></ul>



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Kode dan Klasifikasi Zonasi		Defenisi dan Tujuan Penetapan Zonasi
		<p>bagi semua lapisan masyarakat;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Merefleksikan pola-pola pengembangan yang diinginkan masyarakat pada lingkungan-lingkungan hunian yang ada dan untuk masa yang akan datang.</li> </ul>
<b>K</b>	<b>Perdagangan dan Jasa</b>	<p>Definisi :</p> <p>Zona perdagangan dan jasa adalah peruntukkan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan, sarana umum produksi dan distribusi, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi.</p> <p>Tujuan Penetapan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyediakan lahan untuk menampung tenaga kerja dalam wadah berupa perkantoran, pertokoan, jasa, rekreasi dan pelayanan masyarakat;</li> <li>- Menyediakan ruang yang cukup bagi penempatan kelengkapan dasar fisik berupa sarana-sarana penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya dapat berfungsi sebagaimana mestinya;</li> <li>- Menyediakan ruang yang cukup bagi sarana-sarana umu, terutama untuk melayani kegiatan-kegiatan produksi dan distribusi yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.</li> </ul>
<b>SU</b>	<b>Sarana Umum</b>	<p>Definisi :</p> <p>Zona sarana umum dalah kelompok kegiatan yang berupa sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana sosial, sarana olahraga dan rekreasi, sarana pelayanan umum, sarana perbelanjaan/niaga, dan sarana transportasi dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam rencana kota.</p> <p>Tujuan Penetapan :</p>



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Kode dan Klasifikasi Zonasi		Defenisi dan Tujuan Penetapan Zonasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyediakan lahan untuk pengembangan sarana sosial dan umum dengan kebutuhan dan daya dukung untuk menjamin pelayanan pada masyarakat;</li> <li>- Mengakomodasi bermacam tipe fasilitas sosial dan umum untuk mendorong penyediaan pelayanan bagi semua lapisan masyarakat;</li> <li>- Merefleksikan pola-pola pengembangan yang diinginkan masyarakat pada lingkungan hunian yang ada dan untuk masa yang akan datang.</li> </ul>
<b>IG</b>	<b>Industri dan Pergudangan</b>	<p>Definisi :</p> <p>Zona Industri dan Pergudangan adalah peruntukkan tanah yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan yang berhubungan dengan proses produksi dan tempat penyimpanan bahan mentah dan barang hasil produksi.</p> <p>Tujuan Penetapan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyediakan ruang bagi kegiatan-kegiatan produksi suatu barang yang mempunyai nilai lebih untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang- bangun dan perkerayaan yang berkaitan dengan lapangan kerja perekonomian lainnya;</li> <li>- Memberikan kemudahan pertumbuhan industri baru dengan mengendalikan pemanfaatan ruang lainnya untuk menjaga keserasian lingkungan sehingga mobilitas antar ruang tetap terjamin serta terkendalinya kualitas lingkungan.</li> </ul>
<b>RT</b>	<b>Ruang Terbuka</b>	<p>Definisi :</p> <p>Zona ruang terbuka hijau adalah pengembangan ruang terbuka yang mempunyai makna historis, estetika, median ruang, keseimbangan ekologis, sebagai fungsi penghubung aktivitas-aktivitas kota yang berbeda dan tempat bersosialisasi</p>



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Kode dan Klasifikasi Zonasi		Defenisi dan Tujuan Penetapan Zonasi
		<p>yang potensial dikembangkan. Salah satu pengembangan ruang terbuka (open source) yang sangat penting di daerah perkotaan adalah pengembangan ruang terbuka hijau untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup, sarana pengaman lingkungan perkotaan, menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan. Keberadaan ruang terbuka hijau di perkotaan ini difungsikan sebagai perlindungan ekosistem, menciptakan K3, rekreasi, pengaman lingkungan hidup, penelitian dan pendidikan, perlindungan plasma nutfah, memperbaiki iklim mikro dan pengatur tata air.</p> <p>Tujuan Penetapan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan fasilitas-fasilitas lingkungan yang berkaitan dengan ruang terbuka;</li> <li>- Melestarikan/melindungi lahan-lahan sarana kota/lingkungan yang digunakan rekreasi di luar bangunan, sebagai sarana pendidikan, dan untuk dinikmati nilai-nilai keindahan visualnya;</li> <li>- Preservasi dan perlindungan lahan-lahan yang rawan lingkungan hidup;</li> <li>- Pengamanan jaringan prasarana dan penyekatan-penyekatan (buffer) antara fungsi-fungsi pemanfaatan lahan yang saling mengganggu;</li> <li>- Pemanfaatan nilai ekonominya sebagai sarana budidaya pertanian.</li> </ul>
<b>KS</b>	<b>Khusus</b>	<p>Definisi :  Zona fungsi khusus adalah peruntukkan tanah yang difungsikan untuk menampung kegiatan yang sifatnya khusus.</p> <p>Tujuan Penetapan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyediakan ruang bagi kegiatan-kegiatan</li> </ul>



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Kode dan Klasifikasi Zonasi	Defenisi dan Tujuan Penetapan Zonasi
	tertentu yang karena sifatnya mempunyai kekhususan di luar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pada zona perumahan, zona perdagangan dan jasa, zona sarana umum, zona industri dan pergudangan, dan zona ruang terbuka hijau, misalnya menyangkut keamanan Negara, tingkat resiko atau dampak yang berat terhadap lingkungan hidup sehingga memerlukan penanganan operasional, desain dan spesifikasi yang khusus.

*Sumber: Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum*

#### **4.2.1 Tipologi Kawasan Agribisnis**

Kecamatan Pontianak Utara merupakan kawasan yang memiliki karakteristik komoditas lahan kering yang beragam. Hal ini akan berpengaruh pada konsekuensi penggunaan lahan yang beragam pada kawasan ini. Berikut ini karakter penentu tipologi kawasan agribisnis :



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**Tabel 4.5. Zoning Text**

Peruntukan Kawasan	Jenis Lahan	Zonasi	Kode Zonasi Eksisting	Kecamatan	Komoditas	Fungsi Yang Boleh Ada	Fungsi Yang Tidak Boleh Ada	Ketentuan RTRW
Kawasan Sentra Agribisnis-Eduwisata	Lahan Kering	I	R	Siantan Hulu	Lidah Buaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RTH</li> <li>- Kawasan Pertanian dan Perkebunan</li> <li>- Kawasan perdagangan dan jasa</li> <li>- Kawasan permukiman skala rendah</li> <li>- Fasilitas peribadatan</li> <li>- Kantor pemerintahan</li> </ul>	Fungsi yang tidak diperbolehkan adalah : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk permukiman padat tidak diperbolehkan dibangun dikarenakan tingkat kepadatan yang tinggi tidak sesuai dengan ketentuan KSA dan RTRW</li> <li>- Industri Skala Besar</li> </ul>	Aturan Intensitas Pemanfaatan Ruang : <ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB 20%</li> <li>- KLB 0,6-2,45 lantai</li> <li>- KDH 80%</li> </ul>
			SU		Pepaya			
			RT		Sayuran			
		II	R	Siantan Tengah	Sayuran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kawasan perdagangan dan jasa</li> <li>- Kawasan permukiman skala rendah-menengah</li> <li>- Kawasan Pertanian Perkebunan</li> </ul>	Fungsi yang tidak diperbolehkan adalah : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk permukiman padat tidak diperbolehkan dibangun dikarenakan tingkat kepadatan yang tinggi tidak sesuai dengan ketentuan KSA dan RTRW</li> <li>- Industri Skala Besar</li> </ul>	Aturan Intensitas Pemanfaatan Ruang : <ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB 10-45%</li> <li>- KLB 0,6-3 lantai</li> <li>- KDH 10-45 %</li> </ul>
RT	Pepaya	Kegiatan yang boleh ada pada zona ini adalah : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitas pendidikan</li> <li>- Fasilitas peribadatan :</li> </ul>						



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Peruntukan Kawasan	Jenis Lahan	Zonasi	Kode Zonasi Eksisting	Kecamatan	Komoditas	Fungsi Yang Boleh Ada	Fungsi Yang Tidak Boleh Ada	Ketentuan RTRW
						<p>mushola dan langgar/ surau</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fasilitas kesehatan : puskesmas, posyandu, klinik, dan praktek dokter</li><li>- Terminal KSA</li><li>- Industri dan Pergudangan skala kecil-sedang</li></ul>		



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Tipologi kawasan agribisnis ditentukan berdasarkan matriks hubungan fungsional kegiatan yang ditinjau dari kondisi fisik lahan, kesesuaian lahan terhadap pengembangan pertanian dan potensi wisata yang dimilikinya serta berdasarkan kegiatan dominan yang mungkin dikembangkan. Berdasarkan kesesuaian Lahan zona kawasan agribisnis terbagi atas 2 Zona yaitu :

 Zona 1

Kawasan pada zona I merupakan areal pertanian lahan kering di Kecamatan Siantan Hulu yaitu, di jalan kebangkitan nasional yang sesuai berdasarkan kriteria. Adapun luasan lahan yang sesuai untuk pertanian lahan kering yaitu 156,5 Ha untuk lahan komoditas lidah buaya, 70,5 lahan komoditas pepaya, 15,5 Ha lahan komoditas sayuran. Kawasan pada zona 2 ini memiliki kondisi topografi yang cenderung datar sampai dengan bergelombang dengan tingkat kelerengan kurang dari 33-49%. Merupakan kawasan yang memiliki karakteristik lahan yang cocok untuk dikembangkan Tanaman Aloe vera, Tanaman Pepaya, Tanaman Palawija dan Wisata Alam-Edukasi. Arah pengembangan untuk zona ini adalah :

- Sebagai kawasan pengembangan tanaman aloe vera, tanaman pepaya, tanaman palawija
- Sebagai kawasan pengembangan wisata alam-edukasi

 Zona 2

Kawasan pada zona 2 adalah wilayah yang sesuai untuk dijadikan kawasan pertanian lahan kering di Kecamatan Siantan Hilir. Adapun lahan yang memiliki kesesuaian untuk pengembangan kawasan pertanian lahan kering yaitu 2 Ha lahan komoditas sayuran dan 3 Ha lahan komoditas pepaya. Kawasan pada zona 2 ini memiliki kondisi topografi yang cenderung datar sampai dengan





**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

bergelombang dengan tingkat kelerengan kurang dari 33-49%. Merupakan kawasan yang memiliki karakteristik lahan yang cocok untuk dikembangkan Tanaman Pangan dan Pengolahan Hasil Industri. Arah pengembangan untuk zona ini adalah :

- Sebagai kawasan pengembangan tanaman pangan
- Sebagai kawasan pengembangan industri pengolahan hasil pertanian.
- Sebagai kawasan pusat kegiatan ekonomi (pasar, terminal, dan sebagainya)





### **4.3 Analisa Hirarki Proses**

Penentuan prioritas Review Kawasan Sentra Agribisnis Kota Pontianak dengan konsep Agribisnis dan Agrieduwisata dirancang dengan menggunakan metode AHP dengan bantuan program *Microsoft Excel* sebagai arahan dalam *road map* pembangunan di Kota Pontianak khususnya di Kecamatan Pontianak Utara dengan luasan deliniasi sekitar 775 hektar.

Penilaian dilakukan terhadap responden yang berjumlah 5 orang dari berbagai unsur profesi yang ada di Kota Pontianak yaitu, 3 orang dari Bappeda Kota Pontianak, 1 orang dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak dan 1 orang dari UPTD Aloe Vera Kota Pontianak. Kriteria yang digunakan adalah kriteria analisa ekonomi dengan sub kriteria PDRB, kriteria analisa agribisnis hulu yang terbagi menjadi lima sub kriteria yaitu geografi dan topografi; tanah dan geologi; hidrologi dan klimatologi; ketersediaan lahan dan teknologi, kriteria agribisnis tengah yang terbagi menjadi dua sub kriteria yaitu pola tanam dan modal, kriteria agribisnis hilir yang terbagi menjadi tiga sub kriteria yaitu kelembagaan, SDM dan sarana, kriteria agrieduwisata yang terbagi menjadi tujuh sub kriteria yaitu permeabilitas, keragaman, kejelasan, kekuatan, kesesuaian visual, kekayaan dan personalisasi.

Kriteria-kriteria yang sudah ditentukan tersebut kemudian diperoleh matrik penilaian perbandingan berpasangan dan urutan prioritas Review Kawasan Sentra Agribisnis Kota Pontianak. Data matrik perbandingan berpasangan terdiri dari perbandingan berpasangan dari tingkat kepentingan antar masing-masing kriteria dan sub kriteria. Urutan prioritas terdiri dari urutan kriteria, urutan sub kriteria dari masing-masing kriteria dan alternatif prioritas Review Kawasan Sentra Agribisnis Kota Pontianak.



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Alternatif yang direncanakan terdapat lima pilihan alternatif yaitu:

- a. Pengembangan Produksi Komoditas
- b. Perda Kawasan Agribisnis-Agriwisata
- c. Program Agribisnis-Agriwisata
- d. Integrasi Kelembagaan
- e. *Siteplan* dan DED Agribisnis-Agriwisata

#### 4.2.1 Data Perbandingan Pasangan

Data perbandingan berpasangan adalah data hasil penilaian responden terhadap tingkat kepentingan kriteria dan sub kriteria. Prioritas rehabilitasi Jaringan irigasi DI Ketiat B untuk masing-masing kriteria dan sub kriteria dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.6** Matrik Penilaian Perbandingan Pasangan Tingkat Kepentingan Antar Masing-Masing Kriteria Berkenaan dengan Penentuan Prioritas Review Kawasan Agriwisata dan Agribisnis

No	Faktor	Analisa Ekonomi	Analisa Agribisnis Tengah	Analisa Agribisnis Tengah	Analisa Agribisnis Hilir	Analisa Agrowisata
1	Analisa Ekonomi	1,00	2,11	1,11	0,81	1,18
2	Analisa Agribisnis Hulu	0,47	1,00	2,27	0,97	2,11
3	Analisa Agribisnis Tengah	0,90	0,44	1,00	1,03	3,21
4	Analisa Agribisnis Hilir	1,24	1,03	0,97	1,00	2,81
5	Analisa Agrowisata	0,84	0,47	0,31	0,36	1,00

Sumber : hasil analisis 2018



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**Tabel 4.7** Matrik Penilaian Perbandingan Pasangan Tingkat Kepentingan Antar Masing-Masing Kriteria Analisa Agribisnis Hulu Berkenaan dengan Penentuan Prioritas Review Kawasan Agrieduwisata dan Agribisnis

No	Analisa Agribisnis Hulu	Geografi dan Topografi	Tanah dan Geologi	Hidrologi dan Klimatologi	Ketersediaan Lahan	Teknologi
1	Geografi dan Topografi	1,00	1,04	0,51	0,93	0,46
2	Tanah dan Geologi	0,96	1,00	0,51	0,31	0,47
3	Hidrologi dan Klimatologi	1,97	1,97	1,00	0,46	0,21
4	Ketersediaan Lahan	1,07	3,21	2,18	1,00	1,00
5	Teknologi	2,18	2,11	4,74	1,00	1,00

Sumber : hasil analisis 2018

**Tabel 4.8** Matrik Penilaian Perbandingan Pasangan Tingkat Kepentingan Antar Masing-Masing Kriteria Analisa Agribisnis Tengah Berkenaan dengan Penentuan Prioritas Review Kawasan Agrieduwisata dan Agribisnis

No.	Analisa Agribisnis Tengah	Pola Tanam	Modal
1	Pola Tanam	1,00	0,93
2	Modal	1,07	1,00

Sumber : hasil analisis 2018

**Tabel 4.9** Matrik Penilaian Perbandingan Pasangan Tingkat Kepentingan Antar Masing-Masing Kriteria Analisa Agribisnis Hilir Berkenaan dengan Penentuan Prioritas Review Kawasan Agrieduwisata dan Agribisnis

No	Analisa Agribisnis Hilir	Kelembagaan	SDA	Sarana
1	Kelembagaan	1,000	3,845	0,789
2	SDA	0,260	1,000	0,445
3	Sarana	1,267	2,246	1,000

Sumber : hasil analisis 2018



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**Tabel 4.10** Matrik Penilaian Perbandingan Pasangan Tingkat Kepentingan Antar Masing-Masing Kriteria Analisa Agrieduwisata Berkenaan dengan Penentuan Prioritas Review Kawasan Agrieduwisata dan Agribisnis

No	Analisa Agrieduwisata	Permeabilitas	Keragaman	Kejelasan	Kekuatan	Kesesuaian Visual	Kekayaan	Personaliasi
1	Permeabilitas	1,000	0,169	0,814	0,871	0,491	0,762	2,141
2	Keragaman	5,933	1,000	3,630	1,037	0,818	3,393	3,393
3	Kejelasan	1,229	0,276	1,000	1,835	0,935	1,904	3,624
4	Kekuatan	1,149	0,964	0,545	1,000	0,582	1,496	1,552
5	Kesesuaian Visual	2,036	1,222	1,070	1,719	1,000	1,607	1,607
6	Kekayaan	1,312	0,295	0,525	0,668	0,622	1,000	1,552
7	Personaliasi	0,467	0,295	0,276	0,644	0,622	0,644	1,000

Sumber : hasil analisis 2018

**Tabel 4.11** Matrik Penilaian Perbandingan Pasangan Tingkat Kepentingan Antar Alternatif Penentuan Skala Prioritas Rehabilitasi Review Kawasan Agrieduwisata dan Agribisnis Berkenaan dengan PDRB

No	Alternatif	Pengembangan Produksi Komoditas	Program Agribisnis-Agrieduwisata	Program Agribisnis-Agrieduwisata	Integrasi Kelembagaan	Siteplan dan DED Agribisnis-Agrieduwisata
1	Pengembangan Produksi Komoditas	1,00	0,46	0,53	0,27	0,34
2	Perda Kawasan Agribisnis-Agrieduwisata	2,18	1,00	4,30	2,25	3,12
3	Program Agribisnis-Agrieduwisata	1,90	0,23	1,00	1,64	1,29
4	Integrasi Kelembagaan	3,76	0,45	0,61	1,00	1,48
5	Siteplan dan DED Agribisnis-Agrieduwisata	2,91	0,32	0,78	0,67	1,00

Sumber : hasil analisis 2018



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**Tabel 4.12** Matrik Penilaian Perbandingan Pasangan Tingkat Kepentingan Antar Alternatif Penentuan Skala Prioritas Rehabilitasi Review Kawasan Agrieduwisata dan Agribisnis Berkenaan dengan Geografi dan Topografi

No	Alternatif	Pengembangan Produksi Komoditas	Program Agribisnis-Agroeduwisata	Program Agribisnis-Agroeduwisata	Integrasi Kelembagaan	Siteplan dan DED Agribisnis-Agroeduwisata
1	Pengembangan Produksi Komoditas	1,00	0,46	0,53	0,27	0,34
2	Perda Kawasan Agribisnis-Agroeduwisata	2,18	1,00	1,23	2,25	3,12
3	Program Agribisnis-Agroeduwisata	1,90	0,81	1,00	3,02	1,29
4	Integrasi Kelembagaan	3,76	0,45	0,33	1,00	1,48
5	Siteplan dan DED Agribisnis-Agroeduwisata	2,91	0,32	0,78	0,67	1,00

Sumber : hasil analisis 2018

**Tabel 4.13** Matrik Penilaian Perbandingan Pasangan Tingkat Kepentingan Antar Alternatif Penentuan Skala Prioritas Rehabilitasi Review Kawasan Agrieduwisata dan Agribisnis Berkenaan dengan Tanah dan Geologi

No	Alternatif	Pengembangan Produksi Komoditas	Program Agribisnis-Agroeduwisata	Program Agribisnis-Agroeduwisata	Integrasi Kelembagaan	Siteplan dan DED Agribisnis-Agroeduwisata
1	Pengembangan Produksi Komoditas	1,00	0,45	0,23	1,77	2,54
2	Perda Kawasan Agribisnis-Agroeduwisata	2,25	1,00	1,16	1,36	1,48
3	Program Agribisnis-Agroeduwisata	4,30	0,87	1,00	5,30	2,83
4	Integrasi Kelembagaan	0,56	0,73	0,19	1,00	1,30
5	Siteplan dan DED Agribisnis-Agroeduwisata	0,39	0,68	0,35	0,77	1,00

Sumber : hasil analisis 2018



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**Tabel 4.14** Matrik Penilaian Perbandingan Pasangan Tingkat Kepentingan Antar Alternatif Penentuan Skala Prioritas Rehabilitasi Review Kawasan Agrieduwisata dan Agribisnis Berkenaan dengan Hidrologi dan Klimatologi

No	Alternatif	Pengembangan Produksi Komoditas	Program Agribisnis-Agroeduwisata	Program Agribisnis-Agroeduwisata	Integrasi Kelembagaan	Siteplan dan DED Agribisnis-Agroeduwisata
1	Pengembangan Produksi Komoditas	1,00	3,00	1,90	4,15	2,71
2	Perda Kawasan Agribisnis-Agroeduwisata	0,33	1,00	0,48	1,96	1,38
3	Program Agribisnis-Agroeduwisata	0,53	2,10	1,00	5,30	5,75
4	Integrasi Kelembagaan	0,24	0,51	0,19	1,00	1,48
5	Siteplan dan DED Agribisnis-Agroeduwisata	0,37	0,72	0,17	0,67	1,00

Sumber : hasil analisis 2018

**Tabel 4.15** Matrik Penilaian Perbandingan Pasangan Tingkat Kepentingan Antar Alternatif Penentuan Skala Prioritas Rehabilitasi Review Kawasan Agrieduwisata dan Agribisnis Berkenaan dengan Ketersediaan Lahan

No	Alternatif	Pengembangan Produksi Komoditas	Program Agribisnis-Agroeduwisata	Program Agribisnis-Agroeduwisata	Integrasi Kelembagaan	Siteplan dan DED Agribisnis-Agroeduwisata
1	Pengembangan Produksi Komoditas	1,00	1,48	0,93	3,88	1,38
2	Perda Kawasan Agribisnis-Agroeduwisata	0,68	1,00	1,32	1,33	1,38
3	Program Agribisnis-Agroeduwisata	1,07	0,76	1,00	4,62	2,46
4	Integrasi Kelembagaan	0,26	0,75	0,22	1,00	1,21
5	Siteplan dan DED Agribisnis-Agroeduwisata	0,72	0,72	0,41	0,83	1,00

Sumber : hasil analisis 2018





**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**Tabel 4.16** Matrik Penilaian Perbandingan Pasangan Tingkat Kepentingan Antar Alternatif Penentuan Skala Prioritas Rehabilitasi Review Kawasan Agrieduwisata dan Agribisnis Berkenaan dengan Teknologi

No	Alternatif	Pengembangan Produksi Komoditas	Program Agribisnis-Agroeduwisata	Program Agribisnis-Agroeduwisata	Integrasi Kelembagaan	Siteplan dan DED Agribisnis-Agroeduwisata
1	Pengembangan Produksi Komoditas	1,00	4,30	1,04	2,42	2,81
2	Perda Kawasan Agribisnis-Agroeduwisata	0,23	1,00	0,32	1,00	1,04
3	Program Agribisnis-Agroeduwisata	0,96	3,12	1,00	5,19	3,90
4	Integrasi Kelembagaan	0,41	1,00	0,19	1,00	1,48
5	Siteplan dan DED Agribisnis-Agroeduwisata	0,36	0,96	0,26	0,67	1,00

Sumber : hasil analisis 2018

**Tabel 4.17** Matrik Penilaian Perbandingan Pasangan Tingkat Kepentingan Antar Alternatif Penentuan Skala Prioritas Rehabilitasi Review Kawasan Agrieduwisata dan Agribisnis Berkenaan dengan Pola Tanam

No	Alternatif	Pengembangan Produksi Komoditas	Program Agribisnis-Agroeduwisata	Program Agribisnis-Agroeduwisata	Integrasi Kelembagaan	Siteplan dan DED Agribisnis-Agroeduwisata
1	Pengembangan Produksi Komoditas	1,00	4,60	2,11	4,02	4,02
2	Perda Kawasan Agribisnis-Agroeduwisata	0,22	1,00	0,49	1,04	1,04
3	Program Agribisnis-Agroeduwisata	0,47	2,04	1,00	2,83	2,83
4	Integrasi Kelembagaan	0,25	0,96	0,35	1,00	0,54
5	Siteplan dan DED Agribisnis-Agroeduwisata	0,25	0,96	0,35	1,84	1,00

Sumber : hasil analisis 2018



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**Tabel 4.18** Matrik Penilaian Perbandingan Pasangan Tingkat Kepentingan Antar Alternatif Penentuan Skala Prioritas Rehabilitasi Review Kawasan Agrieduwisata dan Agribisnis Berkenaan dengan Modal

No	Alternatif	Pengembangan Produksi Komoditas	Program Agribisnis-Agroeduwisata	Program Agribisnis-Agroeduwisata	Integrasi Kelembagaan	Siteplan dan DED Agribisnis-Agroeduwisata
1	Pengembangan Produksi Komoditas	1,00	4,30	4,30	3,76	2,53
2	Perda Kawasan Agribisnis-Agroeduwisata	0,23	1,00	0,51	1,48	1,20
3	Program Agribisnis-Agroeduwisata	0,23	1,97	1,00	1,53	5,19
4	Integrasi Kelembagaan	0,27	0,68	0,65	1,00	0,93
5	Siteplan dan DED Agribisnis-Agroeduwisata	0,39	0,83	0,19	1,07	1,00

Sumber : hasil analisis 2018

**Tabel 4.19** Matrik Penilaian Perbandingan Pasangan Tingkat Kepentingan Antar Alternatif Penentuan Skala Prioritas Rehabilitasi Review Kawasan Agrieduwisata dan Agribisnis Berkenaan dengan Kelembagaan

No	Alternatif	Pengembangan Produksi Komoditas	Program Agribisnis-Agroeduwisata	Program Agribisnis-Agroeduwisata	Integrasi Kelembagaan	Siteplan dan DED Agribisnis-Agroeduwisata
1	Pengembangan Produksi Komoditas	1,00	0,48	1,97	0,91	2,54
2	Perda Kawasan Agribisnis-Agroeduwisata	2,10	1,00	2,37	1,25	3,74
3	Program Agribisnis-Agroeduwisata	0,51	0,42	1,00	1,04	5,38
4	Integrasi Kelembagaan	1,10	0,80	0,96	1,00	3,76
5	Siteplan dan DED Agribisnis-Agroeduwisata	0,39	0,27	0,19	0,27	1,00

Sumber : hasil analisis 2018



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**Tabel 4.20** Matrik Penilaian Perbandingan Pasangan Tingkat Kepentingan Antar Alternatif Penentuan Skala Prioritas Rehabilitasi Review Kawasan Agrieduwisata dan Agribisnis Berkenaan dengan SDM

No	Alternatif	Pengembangan Produksi Komoditas	Program Agribisnis-Agroeduwisata	Program Agribisnis-Agroeduwisata	Integrasi Kelembagaan	Siteplan dan DED Agribisnis-Agroeduwisata
1	Pengembangan Produksi Komoditas	1,00	0,48	1,97	0,91	2,14
2	Perda Kawasan Agribisnis-Agroeduwisata	2,10	1,00	2,37	1,25	3,74
3	Program Agribisnis-Agroeduwisata	0,51	0,42	1,00	1,04	3,13
4	Integrasi Kelembagaan	1,10	0,80	0,96	1,00	2,63
5	Siteplan dan DED Agribisnis-Agroeduwisata	0,47	0,27	0,32	0,38	1,00

Sumber : hasil analisis 2018

**Tabel 4.21** Matrik Penilaian Perbandingan Pasangan Tingkat Kepentingan Antar Alternatif Penentuan Skala Prioritas Rehabilitasi Review Kawasan Agrieduwisata dan Agribisnis Berkenaan dengan Sarana

No	Alternatif	Pengembangan Produksi Komoditas	Program Agribisnis-Agroeduwisata	Program Agribisnis-Agroeduwisata	Integrasi Kelembagaan	Siteplan dan DED Agribisnis-Agroeduwisata
1	Pengembangan Produksi Komoditas	1,00	1,04	1,34	0,90	4,68
2	Perda Kawasan Agribisnis-Agroeduwisata	0,96	1,00	1,15	1,25	1,84
3	Program Agribisnis-Agroeduwisata	0,75	1,15	1,00	1,97	2,81
4	Integrasi Kelembagaan	1,11	0,80	0,51	1,00	1,38
5	Siteplan dan DED Agribisnis-Agroeduwisata	0,21	0,54	0,36	0,72	1,00

Sumber : hasil analisis 2018



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**Tabel 4.22** Matrik Penilaian Perbandingan Pasangan Tingkat Kepentingan Antar Alternatif Penentuan Skala Prioritas Rehabilitasi Review Kawasan Agrieduwisata dan Agribisnis Berkenaan dengan Permeabilitas

No	Alternatif	Pengembangan Produksi Komoditas	Program Agribisnis-Agroeduwisata	Program Agribisnis-Agroeduwisata	Integrasi Kelembagaan	Siteplan dan DED Agribisnis-Agroeduwisata
1	Pengembangan Produksi Komoditas	1,00	3,76	0,97	3,76	3,25
2	Perda Kawasan Agribisnis-Agroeduwisata	0,27	1,00	0,27	1,38	1,38
3	Program Agribisnis-Agroeduwisata	1,03	3,76	1,00	3,76	3,76
4	Integrasi Kelembagaan	0,27	0,72	0,27	1,00	0,36
5	Siteplan dan DED Agribisnis-Agroeduwisata	0,31	0,72	0,27	2,81	1,00

Sumber : hasil analisis 2018

**Tabel 4.23** Matrik Penilaian Perbandingan Pasangan Tingkat Kepentingan Antar Alternatif Penentuan Skala Prioritas Rehabilitasi Review Kawasan Agrieduwisata dan Agribisnis Berkenaan dengan Keragaman

No	Alternatif	Pengembangan Produksi Komoditas	Program Agribisnis-Agroeduwisata	Program Agribisnis-Agroeduwisata	Integrasi Kelembagaan	Siteplan dan DED Agribisnis-Agroeduwisata
1	Pengembangan Produksi Komoditas	1,00	2,26	0,48	0,96	2,72
2	Perda Kawasan Agribisnis-Agroeduwisata	0,44	1,00	0,51	1,38	1,38
3	Program Agribisnis-Agroeduwisata	2,10	1,97	1,00	4,02	3,00
4	Integrasi Kelembagaan	1,04	0,72	0,25	1,00	0,68
5	Siteplan dan DED Agribisnis-Agroeduwisata	0,37	0,72	0,33	1,48	1,00

Sumber : hasil analisis 2018



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**Tabel 4.24** Matrik Penilaian Perbandingan Pasangan Tingkat Kepentingan Antar Alternatif Penentuan Skala Prioritas Rehabilitasi Review Kawasan Agrieduwisata dan Agribisnis Berkenaan dengan Kejelasan

No	Alternatif	Pengembangan Produksi Komoditas	Program Agribisnis-Agroeduwisata	Program Agribisnis-Agroeduwisata	Integrasi Kelembagaan	Siteplan dan DED Agribisnis-Agroeduwisata
1	Pengembangan Produksi Komoditas	1,00	0,24	0,46	1,78	1,00
2	Perda Kawasan Agribisnis-Agroeduwisata	4,15	1,00	2,04	4,15	0,93
3	Program Agribisnis-Agroeduwisata	2,18	0,49	1,00	2,63	0,63
4	Integrasi Kelembagaan	0,56	0,24	0,38	1,00	0,72
5	Siteplan dan DED Agribisnis-Agroeduwisata	1,00	1,07	1,58	1,38	1,00

Sumber : hasil analisis 2018

**Tabel 4.25** Matrik Penilaian Perbandingan Pasangan Tingkat Kepentingan Antar Alternatif Penentuan Skala Prioritas Rehabilitasi Review Kawasan Agrieduwisata dan Agribisnis Berkenaan dengan Kekuatan

No	Alternatif	Pengembangan Produksi Komoditas	Program Agribisnis-Agroeduwisata	Program Agribisnis-Agroeduwisata	Integrasi Kelembagaan	Siteplan dan DED Agribisnis-Agroeduwisata
1	Pengembangan Produksi Komoditas	1,00	1,00	1,08	1,90	1,78
2	Perda Kawasan Agribisnis-Agroeduwisata	1,00	1,00	0,68	1,38	1,38
3	Program Agribisnis-Agroeduwisata	0,93	1,48	1,00	0,93	1,72
4	Integrasi Kelembagaan	0,53	0,72	1,07	1,00	0,65
5	Siteplan dan DED Agribisnis-Agroeduwisata	0,56	0,72	0,58	1,53	1,00

Sumber : hasil analisis 2018



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**Tabel 4.26** Matrik Penilaian Perbandingan Pasangan Tingkat Kepentingan Antar Alternatif Penentuan Skala Prioritas Rehabilitasi Review Kawasan Agrieduwisata dan Agribisnis Berkenaan dengan Kesesuaian Visual

No	Alternatif	Pengembangan Produksi Komoditas	Program Agribisnis-Agroeduwisata	Program Agribisnis-Agroeduwisata	Integrasi Kelembagaan	Siteplan dan DED Agribisnis-Agroeduwisata
1	Pengembangan Produksi Komoditas	1,00	4,30	0,68	1,96	2,63
2	Perda Kawasan Agribisnis-Agroeduwisata	0,23	1,00	0,36	1,48	1,48
3	Program Agribisnis-Agroeduwisata	1,48	2,81	1,00	3,76	4,30
4	Integrasi Kelembagaan	0,51	0,68	0,27	1,00	0,61
5	Siteplan dan DED Agribisnis-Agroeduwisata	0,38	0,68	0,23	1,63	1,00

Sumber : hasil analisis 2018

**Tabel 4.27** Matrik Penilaian Perbandingan Pasangan Tingkat Kepentingan Antar Alternatif Penentuan Skala Prioritas Rehabilitasi Review Kawasan Agrieduwisata dan Agribisnis Berkenaan dengan Kekayaan

No	Alternatif	Pengembangan Produksi Komoditas	Program Agribisnis-Agroeduwisata	Program Agribisnis-Agroeduwisata	Integrasi Kelembagaan	Siteplan dan DED Agribisnis-Agroeduwisata
1	Pengembangan Produksi Komoditas	1,00	3,63	3,76	4,30	3,52
2	Perda Kawasan Agribisnis-Agroeduwisata	0,28	1,00	0,51	1,38	1,38
3	Program Agribisnis-Agroeduwisata	0,27	1,97	1,00	2,05	1,97
4	Integrasi Kelembagaan	0,23	0,72	0,49	1,00	0,38
5	Siteplan dan DED Agribisnis-Agroeduwisata	0,28	0,72	0,51	2,63	1,00

Sumber : hasil analisis 2018



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**Tabel 4.28** Matrik Penilaian Perbandingan Pasangan Tingkat Kepentingan Antar Alternatif Penentuan Skala Prioritas Rehabilitasi Review Kawasan Agrieduwisata dan Agribisnis Berkenaan dengan Personalisasi

No	Alternatif	Pengembangan Produksi Komoditas	Program Agribisnis-Agroeduwisata	Program Agribisnis-Agroeduwisata	Integrasi Kelembagaan	Siteplan dan DED Agribisnis-Agroeduwisata
1	Pengembangan Produksi Komoditas	1,00	1,72	0,44	1,61	1,61
2	Perda Kawasan Agribisnis-Agroeduwisata	0,58	1,00	0,60	0,80	0,80
3	Program Agribisnis-Agroeduwisata	2,26	1,66	1,00	1,04	0,54
4	Integrasi Kelembagaan	0,62	1,25	0,97	1,00	0,39
5	Siteplan dan DED Agribisnis-Agroeduwisata	0,62	1,25	1,84	2,54	1,00

Sumber : hasil analisis 2018

#### 4.3.2. Hasil Bobot Prioritas Kriteria dan Sub Kriteria

Pembobotan tiap kriteria dan sub kriteria yang terlibat dalam penentuan prioritas Review Kawasan Agrieduwisata dan Agribisnis dianalisis dengan bantuan *Microsoft Excel* dari pengolahan tersebut akan mendapatkan bobot prioritas sebagai berikut.

**Tabel 4.29** Nilai Bobot Masing-masing Kriteria

No	Kriteria	Bobot
1	Analisa Ekonomi	0,2331
2	Analisa Agribisnis Hulu	0,2308
3	Analisa Agribisnis Tengah	0,2017
4	Analisa Agribisnis Hilir	0,2314
5	Analisa Agroeduwisata	0,1031
<i>Consistency Ratio</i>		0,08

Sumber : hasil analisis 2018



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa kriteria analisis ekonomi menjadi faktor yang paling penting dalam menentukan prioritas utama dalam kajian Review Kawasan Agribisnis Kota Pontianak dengan bobot 0,2331.

Di urutan kedua ada kriteria analisa agribisnis hulu dengan nilai 0,2314. Hal ini berarti setelah unsur analisa ekonomi hal yang harus dipertimbangkan dalam penentuan prioritas Review Kawasan Agribisnis Kota Pontianak adalah kriteria analisa agribisnis hilir. Di urutan ketiga adalah kriteria analisa agribisnis hulu dengan bobot 0,2308. Urutan keempat yang harus diperhatikan adalah kriteria analisa agribisnis tengah dalam rehabilitasi jaringan irigasi dengan bobot 0,2017. Kriteria analisa agrieduwisata menjadi urutan prioritas terakhir dalam penentuan prioritas rehabilitasi jaringan irigasi dengan bobot 0,1031.





**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**4.3.3. Hasil Bobot Prioritas Alternatif**

**Tabel 4.30** Prioritas Lokasi Alternatif untuk Masing - Masing Sub Kriteria

No	Alternatif	Prioritas Lokal								
		PDRB	Geografi dan Topografi	Tanah dan Geologi	Hidrologi dan Klimatologi	Ketersediaan Lahan	Teknologi	Pola Tanam	Modal	Kelembagaan
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pengembangan Produksi Komoditas	0,086	0,087	0,149	0,376	0,271	0,325	0,447	0,469	0,208
2	Perda Kawasan Agribisnis-Agroduwisata	0,409	0,317	0,248	0,132	0,206	0,098	0,105	0,111	0,327
3	Program Agribisnis-Agroduwisata	0,172	0,263	0,392	0,328	0,291	0,376	0,245	0,224	0,189
4	Integrasi Kelembagaan	0,188	0,178	0,108	0,081	0,104	0,108	0,089	0,100	0,214
5	Siteplan dan DED Agribisnis-Agroduwisata	0,146	0,154	0,103	0,082	0,129	0,093	0,114	0,097	0,062

No	Alternatif	Prioritas Lokal									
		SDM	Sarana	Permeabilitas	Keragaman	Kejelasan	Kekuatan	Kesesuaian Visual	Kekayaan	Personalisasi	
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Pengembangan Produksi Komoditas	0,206	0,270	0,342	0,227	0,131	0,251	0,297	0,474	0,226	
2	Perda Kawasan Agribisnis-Agroduwisata	0,336	0,219	0,109	0,149	0,358	0,204	0,120	0,124	0,137	
3	Program Agribisnis-Agroduwisata	0,171	0,248	0,358	0,383	0,197	0,232	0,381	0,191	0,235	
4	Integrasi Kelembagaan	0,209	0,172	0,074	0,123	0,092	0,154	0,096	0,082	0,146	
5	Siteplan dan DED Agribisnis-Agroduwisata	0,078	0,092	0,118	0,118	0,222	0,160	0,105	0,129	0,256	

Sumber : hasil analisis 2018

**4.3.4. Hasil Rekap Bobot Prioritas Review Kawasan Agribisnis Kota Pontianak**



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**Tabel 4.31 Hasil Rekap Bobot Prioritas**

Kriteria	Sub Kriteria	Alternatif					Siteplan dan DED Agribisnis- Agroeduw
		Pengembangan Produksi Komoditas	Perda Kawasan Agribisnis- Agroeduwisata	Program Agribisnis- Agroeduwisata	Integrasi Kelembagaan	Agroeduw	
Analisa Ekonomi	0,233065	PDRB	0,0859	0,4091	0,1716	0,1877	0,1457
	Analisa Ekonomi		0,0859	0,4091	0,1716	0,1877	0,1457
Analisa Agribisnis Hulu	0,230757	Geografi dan Topografi	0,0118	0,0428	0,0356	0,0241	0,0209
		Tanah dan Geologi	0,0155	0,0257	0,0407	0,0112	0,0106
		Hidrologi dan Klimatologi	0,0574	0,0201	0,0501	0,0124	0,0126
		Ketersediaan Lahan	0,0716	0,0546	0,0768	0,0274	0,0340
		Teknologi	0,1120	0,0336	0,1294	0,0372	0,0319
	Analisa Agribisnis Hulu		0,2682	0,1769	0,3326	0,1123	0,1100
Analisa Agribisnis Tengah	0,201679	Pola Tanam	0,2159	0,0508	0,1186	0,0429	0,0550
		Modal	0,2423	0,0572	0,1157	0,0514	0,0502
	Analisa Agribisnis Tengah		0,4581	0,1080	0,2343	0,0944	0,1052
Analisa Agribisnis Hilir	0,231351	Kelembagaan	0,0898	0,1412	0,0815	0,0926	0,0267
		SDM	0,0300	0,0489	0,0248	0,0304	0,0113
		Sarana	0,1141	0,0925	0,1048	0,0726	0,0388
	Analisa Agribisnis Hilir		0,2339	0,2826	0,2111	0,1956	0,0768
Analisa Agroeduwisata	0,103149	Permeabilitas	0,0307	0,0098	0,0322	0,0067	0,0106
		Keragaman	0,0666	0,0436	0,1125	0,0360	0,0347
		Kejelasan	0,0203	0,0553	0,0304	0,0142	0,0343
		Kekuatan	0,0314	0,0256	0,0291	0,0193	0,0201
		Kesesuaian Visual	0,0539	0,0218	0,0691	0,0173	0,0191
		Kekayaan	0,0427	0,0112	0,0172	0,0074	0,0116
		Personaliasi	0,0148	0,0089	0,0154	0,0096	0,0167
	Kondisi Fisik Jaringan		0,2604	0,1762	0,3057	0,1105	0,1471
	Bobot Global Alternatif		1,3065	1,1529	1,2554	0,7005	0,5848

Sumber : hasil analisis 2018

Secara keseluruhan dari berbagai macam kriteria dan sub kriteria dalam penentuan prioritas Review Kawasan Agribisnis Kota Pontianak di dapat prioritas pertama pada alternatif Pengembangan Produksi Komoditas dengan nilai bobot global 1,3065. Pengembangan produksi komoditas berhubungan dengan kegiatan atau usaha dalam meningkatkan jumlah produksi komoditas yang unggul di daerah kajian yaitu Kecamatan Pontianak Utara khususnya dengan luasan kurang lebih 775 hektar. Komoditas yang dapat dikategorikan unggul adalah komoditas *aloe vera* dan anggrek sehingga dapat diambil kebijakan dalam merancang suatu rencana yang dapat mengembangkan jumlah produksi komoditas tersebut agar menghasilkan PDRB yang tinggi. Hal ini akan berdampak pada perekonomian daerah dan kesejahteraan petani memengingat banyaknya manfaat yang dapat dihasilkan dari produk komoditas unggulan tersebut terutama *aloe vera* dan peluang yang besar dalam kegiatan ekspor



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

keluar negeri akibat dari *demand* yang besar dari konsumen pengguna produk kecantikan dan kesehatan dengan bahan dasar *aloe vera*.

Untuk peringkat kedua, prioritas dalam Review Kawasan Agribisnis Kota Pontianak menghasilkan bobot prioritas global sebesar 1,2554 dengan alternatif Program Agribisnis-Agriwisata. Dengan urutan prioritas inilah maka dapat dilihat potensi Kecamatan Pontianak Utara yang dapat ditata sedemikian rupa dengan program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi dengan konsep Agribisnis maupun edukasi dan wisata dengan konsep Agriwisata yang dapat diwujudkan dalam kegiatan revisi selanjutnya melihat kondisi eksisting dan potensi prioritas alternatif tersebut.

Alternatif Perda Kawasan Agribisnis-Agriwisata menjadi prioritas ketiga dari hasil pengambilan keputusan prioritas Review Kawasan Agribisnis Kota Pontianak. Peraturan tersebut dapat berfungsi sebagai wadah dalam mengintegrasikan dan mengkoordinasi seluruh dinas terkait serta masyarakat agar kegiatan pengembangan Kawasan Agribisnis-Agriwisata dapat berjalan dengan maksimal sehingga semua manfaat dari konsep pengembangan wilayah Kecamatan Pontianak Utara dengan Program Agribisnis-Agriwisata dapat memberikan kontribusi nyata terhadap daerah dan masyarakat.

Integrasi kelembagaan menjadi penting untuk dirancang melihat alternatif tersebut masuk dalam urutan prioritas Review Kawasan Agribisnis Kota Pontianak dengan bobot prioritas global 0,7005. Hal ini akan berdampak pada kinerja antar dinas terkait dalam proses pengembangan Kawasan Agribisnis-Agriwisata sehingga semua pihak yang terkait dalam pengembangan Agribisnis Hulu, Agribisnis Tengah, Agribisnis Hilir dan Agriwisata dapat tertata dan bekerja dengan baik sesuai dengan rencana Program Agribisnis-Agriwisata yang berpotensi baik berdasarkan hasil kajian revisi di masa mendatang.

*Siteplan* dan DED Kawasan Agribisnis-Agriwisata menjadi alternatif terakhir dalam pengambilan keputusan prioritas Review Kawasan Agribisnis-



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Agrieduwisata Kota Pontianak. Dalam hal ini terlihat bahwa semua persiapan yang harus dilakukan dalam mengembangkan dan menata Kawasan Agribisnis di Kecamatan Pontianak Utara dengan Konsep Agribisnis-Agrieduwisata didahulukan dengan keempat alternatif yang telah dijelaskan di atas, yakni pengembangan produksi komoditas, program agribisnis-agrieduwisata, perda kawasan agribisnis-agrieduwisata dan integrasi kelembagaan yang dapat dikemas dalam Kajian Revisi Kawasan Agribisnis Kota Pontianak di masa mendatang dalam wujud alternatif *siteplan* dan DED sehingga semua alternatif tersebut dapat disempurnakan dengan detail rancangan desain di kondisi eksisting.



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**



## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

---

---

### **5.1 Kesimpulan**

Pada dasarnya program-program pengembangan yang terkandung didalam Agribisnis Kecamatan Pontianak Utara adalah untuk menciptakan Kawasan Agribisnis yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, secara garis besar mengenai program-program yang terkait dengan Pembangunan Kawasan Agribisnis yang perlu diprioritaskan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun mendatang adalah sebagai berikut :

#### **5.1.1 Program Agribisnis**

##### **5.1.1.1 Program 5 Tahun Pertama (Tahun 2018 - 2022)**

- ✚ Program Pengembangan Agribisnis, yaitu :
  - a. Intensifikasi dan penyuluhan lahan kering berupa tanaman aloevera, pepaya, dan sayuran.
  - b. Penelitian varietas unggul pertanian lahan kering berupa tanaman aloevera, pepaya, dan sayuran.
  - c. Pengadaan peralatan pembuatan pupuk organik
  - d. Pengadaan peralatan pertanian modern
  - e. Pengadaan kandang sehat
  - f. Penyusunan rencana strategi pemasaran komoditas pertanian
  - g. Pengembangan industri kecil pengolah komoditas tanaman aloevera dan pepaya
  - h. Pengembangan organisasi pertanian (Kelompok Tani, HIPPA)
  - i. Pelatihan PPL dalam pengembangan budidaya pertanian tanaman aloevera, pepaya, dan sayuran.
  - j. Pelatihan staff perintis pembimbing dan pengawas pelaksana pengembangan industri kecil



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

- k. Kredit usaha tani
- l. Penyusunan sistem informasi Agribisnis
- m. Studi banding luar wilayah

✚ Program Pengembangan Fasilitas Pendukung

- a. Pembangunan gudang pupuk
- b. Pembangunan balai penelitian dan pembenihan
- c. Pembangunan dan Pengembangan STA
- d. Pengadaan Koperasi Unit Desa
- e. Pembangunan Greenhouse
- f. Pembangunan Landmark Agribisnis
- g. Pengadaan Warnet Tani
- h. Pembangunan Laboratorium Bersama
- i. Tourist Information Centre

✚ Program Pengembangan Prasarana Jalan

- a. Pelebaran dan perkerasan jalan desa usaha tani
- b. Pembangunan jalan tembus menuju kawasan sentra agribisnis
- c. Perbaikan jalan kebangkitan nasional

✚ Program Pengembangan Pariwisata

- a. Pembangunan jalan tembus menuju kawasan KSA
- b. Pembangunan tempat parkir
- c. Pembangunan home stay
- d. Pembangunan sentra tanaman hias
- n. Pengembangan agribisnis-eduwisata tanaman aloe vera, pepaya, dan sayuran.

**5.1.1.2 Program 5 Tahun Kedua (Tahun 2023 – 2027)**

Program pembangunan 5 (lima) tahun kedua merupakan kelanjutan dari program-program sebelumnya, terutama pada rencana-rencana pemanfaatan



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

ruang, pengembangan kebutuhan vitalitas penduduk dan transportasi jalan raya yang dinyatakan layak dalam studi yang telah dilakukan. Program-program pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedua adalah sebagai berikut :

- ✚ Melanjutkan pengembangan fasilitas penunjang pengembangan kawasan agribisnis
- ✚ Melanjutkan pengembangan jaringan jalan dengan membuka jalan baru antar desa-desa yang jauh dari pusat agribisnis

### **5.1.2 Program Agrieduwisata**

Berdasarkan pembahasan analisis data yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pada Agrieduwisata memiliki modelMPMBS(Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah), hal initerlihat dari fugsi manajemen yang di terapkan sebagai berikut:

#### **5.1.2.1 Pada Aspek Planing**

Hal ini terlihat dari sistem pembagian perencanaan kepada dua bagaian penanggungjawab pelaksana, yaitu:

A. Pertama,

Perencanaan secara umum dilakukan oleh dewan sekolah yang bersifat kebijakan-kebijakan untuk pengambilan keputusan skala besar (umum).

B. Kedua,

perencanaan secara khusus yaitu perencanaan dan pengembangan pendidikan dilakukan oleh direktur pendidikan dengan mengadakan raker masing-masing yang melibatkan guru, orang tua, dan komunitas.Raker guru untuk perencanaan pembelajaran setahun kedepan.

#### **5.1.2.2 Pada Aspek Organisasi**

Pada dasarnya cukup baik dalam hal strukturisasi kepengurusan Sekolah Alam Indonesia, yaitu dengan menggunakan bentuk komunitas, tentunya





**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

organisasi dalam bentuk komunitas ini terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya yaitu bentuk organisasi komunitas ini tidaklah ada yang superior atau monopoli baik kebijakan dan yang lainnya dalam menjalankan manajemen Sekolah Alam. Kekurangannya yaitu kurang efektif dan efisien karena dalam setiap pengambilan keputusan harus selalu berkoordinasi dengan beberapa pihak sesuai dengan kaidah organisasi yang berlaku pada manajemen yang bersifat komunitas.

Kerjasama dengan Dinas Perhubungan dan Dinas Pendidikan untuk mengkoordinasi kegiatan Agrieduwisata dengan menggunakan transportasi BUS Sekolah dalam mengikuti kegiatan sekolah alam di kawasan sentral agribisnis. Layanan transportasi sekolah merupakan sarana transportasi bagi siswa untuk kelancaran proses belajar mengajar. Siswa akan merasa aman dan dapat masuk atau pulang sekolah dengan waktu yang tepat. Penyelenggara transportasi sekolah adalah sekolah itu sendiri atau pihak swasta yang bekerja sama dengan sekolah tersebut.

## **5.2. Rekomendasi**

1. Untuk lanjutan kajian yang lebih dalam yaitu memperhitungkan supply chain management organisasi wisata dan bisnis dari hilir, tengah dan hulu. Memperhitungkan konsep management sebagai perencanaan pembangunan wisata dan bisnis di kawasan sentral agribisnis.
2. Mengubah konsep lingkungan wisata tanaman lidah buaya dan pepaya dengan keberadaan air sebagai pendukung sarana dan prasarana penunjang agrieduwisata untuk mengurangi tingkat panas di kawasan sekitar.
3. Pembuatan Mastrplan mengikuti kaidah tapak dan landscape untuk memberikan keharmonisan antara wisata dan lingkungan sekitar agar membuat mereka lebih lama berkunjung.



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

4. Membuat webgis 3D Building dan Landscape untuk pengembangan teknologi modern agar menjadi daya tarik dan bekerjasama dengan media sosial terkenal yang ada di kota pontianak untuk sebagai pendukung pemasaran seperti Instagram dan facebook di Pontianak Informasi pasar.
5. Jalan Sungai Selamat sebagai kawasan prioritas untuk pembuatan embung berdasarkan analisis hidrologi kawasan tersebut merupakan kawasan dengan cekungan yang dapat menyebabkan bencana banjir.
6. Jalan Kebangkitan Nasional sebagai kawasan prioritas untuk rencana kawasan wisata alam-edukasi
7. Untuk lanjutan kajian yang lebih dalam yaitu memperhitungkan supply chain management organisasi wisata dan bisnis dari hilir, tengah dan hulu. Memperhitungkan konsep management sebagai perencanaan pembangunan wisata dan bisnis di kawasan sentral agribisnis.
8. Mengubah konsep lingkungan wisata tanaman lidah buaya dan papaya dengan keberadaan air sebagai pendukung sarana dan prasarana penunjang agrieduwisata untuk mengurangi tingkat panas di kawasan sekitar.
9. Pembuatan Masterplan mengikuti kaidah tapak dan landscape untuk memberikan keharmonisan antara wisata dan lingkungan sekitar agar membuat mereka lebih lama berkunjung.
10. Membuat webgis 3D Building dan Landscape untuk pengembangan teknologi modern agar menjadi daya tarik dan bekerjasama dengan media sosial terkenal yang ada di kota pontianak untuk sebagai pendukung pemasaran seperti Instagram dan facebook di Pontianak Informasi.



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**